

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SANTRI
DALAM MEWUJUDAKAN LULUSAN YANG UNGGUL

A. Landasan Filosofis

Salah satu aliran filsafat yang paling relevan dalam mendasari manajemen peningkatan mutu pembelajaran santri adalah Filsafat Pragmatisme, karena aliran ini mendorong pengelolaan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan berfokus pada hasil yang terukur. Dalam konteks pesantren, yang secara tradisional mengedepankan pendidikan nilai dan pembentukan karakter melalui kajian kitab kuning, pendekatan pragmatisme membuka ruang untuk transformasi model pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif, tanpa meninggalkan akar tradisi keilmuan Islam. Artinya, pesantren tetap mempertahankan esensinya sebagai pusat pendidikan nilai, namun pada saat yang sama juga menyelaraskan kurikulumnya dengan tuntutan zaman.

Manajemen mutu dalam kerangka pragmatisme menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan (*continuous improvement*), pengambilan keputusan berbasis data, dan pengembangan sistem pendidikan yang mampu merespons kebutuhan peserta didik secara realistis. Pendekatan ini menuntut keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari santri, ustaz/ustazah, kyai, hingga masyarakat sekitar pesantren, dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran yang dinamis dan partisipatif. Dengan demikian, peningkatan mutu bukan hanya dipahami sebagai peningkatan nilai ujian atau kelulusan formal, tetapi juga sebagai peningkatan kemampuan adaptasi santri dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual mereka.

Pembelajaran yang berorientasi pragmatis menempatkan santri sebagai subjek aktif yang belajar melalui pengalaman nyata dan pemecahan

masalah kontekstual. Proses ini dapat diterjemahkan dalam berbagai strategi inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), kewirausahaan berbasis pesantren, pelatihan teknologi informasi, serta integrasi nilai-nilai Islam dengan keterampilan abad 21. Melalui pendekatan ini, lulusan santri diharapkan tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan hidup (life skills), kemampuan berpikir kritis, dan karakter adaptif dalam menghadapi dinamika global.

Dengan mendasarkan pengelolaan mutu pembelajaran pada prinsip pragmatisme, pesantren akan memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi institusi pendidikan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada masa depan, tanpa kehilangan karakter keislamannya. Lulusan unggul yang dihasilkan dari proses ini adalah pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial, mampu menjadi agen perubahan yang membawa kemaslahatan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pragmatisme memberikan kerangka filosofis yang kuat dalam pengembangan strategi manajemen peningkatan mutu pembelajaran santri. Landasan ini tidak hanya menekankan pada ketercapaian target akademik, tetapi juga pada keterwujudan profil santri yang utuh: cakap dalam ilmu, luhur dalam akhlak, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

B. Landasan Sistem Nilai

1. Nilai Teologis

Pendidikan pesantren tidak dapat dipisahkan dari dimensi teologis yang menjadi inti dari seluruh aktivitas pembelajaran. Nilai-nilai teologis dalam konteks pesantren bukan sekadar menjadi fondasi moral, melainkan juga menjadi sumber motivasi transendental dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam upaya manajemen peningkatan mutu pembelajaran. Dalam manajemen pendidikan Islam, nilai teologis menjadi pondasi ideologis dan spiritual yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran kepada tujuan yang lebih tinggi, yakni membentuk insan

kamil yang mampu mengabdikan diri kepada Allah SWT sekaligus memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Konsep teologis dalam manajemen mutu pembelajaran santri merujuk pada pemahaman bahwa proses pendidikan bukan semata-mata aktivitas duniawi yang bersifat administratif dan teknis, tetapi juga bagian dari ibadah (*ibādah*), amanah (*trust*), dan jihad ilmiah (*struggle for knowledge*). Dalam QS. Al-Mujādilah ayat 11, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَانْشُرُوا ۚ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujādilah: 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa kekuatan iman dan penguasaan ilmu menjadi dasar utama dalam membentuk pribadi yang berkualitas dan unggul. Oleh karena itu, peningkatan mutu pembelajaran santri diarahkan bukan hanya pada peningkatan kompetensi kognitif semata, tetapi juga pada penguatan iman, akhlak, dan adab sebagai nilai teologis utama.

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, nilai teologis melahirkan prinsip-prinsip manajerial yang berorientasi pada keikhlasan, tanggung jawab, amanah, musyawarah, dan ihsan (optimalisasi kualitas kerja). Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Total Quality Management* (TQM), tetapi memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam. Sebagai contoh, prinsip *continuous improvement* dalam TQM dapat dimaknai sebagai *ijtihad* berkelanjutan dalam konteks pesantren untuk terus memperbaiki sistem pembelajaran demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain itu, nilai teologis dalam pembelajaran santri juga mencakup niat (niyyah) yang tulus dalam menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

.. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِغُلَّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, lulusan unggul dalam perspektif teologis bukan hanya dinilai dari aspek penguasaan ilmu atau keterampilan profesional, tetapi juga dari kesadaran spiritual, integritas moral, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi oleh keikhlasan dan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan karakter santri yang tangguh, rendah hati, amanah, dan siap menjadi pemimpin dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, manajemen mutu berbasis nilai teologis dapat diwujudkan melalui:

- a. Penguatan kurikulum integratif antara ilmu agama dan ilmu umum dengan pendekatan nilai-nilai ilahiyah.
- b. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang menilai aspek afektif dan spiritual santri, bukan hanya aspek kognitif.
- c. Pembinaan ruhaniyah dan adab melalui pembiasaan ibadah, dzikir, dan kajian kitab yang memperkuat hubungan santri dengan Allah SWT.
- d. Pembentukan budaya mutu berbasis akhlak karimah, di mana setiap pelaku pendidikan bekerja dengan niat ibadah dan semangat kolektif. Secara keseluruhan, nilai teologis memberikan dasar yang kokoh bagi manajemen peningkatan mutu pembelajaran di pesantren. Ia tidak hanya menjadi sumber motivasi internal, tetapi juga menjadi kompas moral yang mengarahkan seluruh kebijakan dan praktik pendidikan menuju terbentuknya lulusan yang unggul: cerdas, berakhlak, berilmu, dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT dan masyarakat.

Menurut Suroya Kiswati (2019), kata teologi berasal dari bahasa asing, yaitu; bahasa Inggris *thelogy*; berasal dari bahasa Yunani *Theologia* dari *theos* (Tuhan, Allah) dan *logos* (wacana ilmu). Dalam bahasa Yunani, teologi berasal dari dua kata, yaitu *theos*, yang berarti Tuhan, dan *logia*, yang berarti kata-kata, ucapan, atau wacana. Dengan demikian, secara etimologis, teologi berarti suatu catatan atau wacana tentang para dewa atau Tuhan. Sedangkan secara terminologi Resse, dalam *Dictionary of Philosophy Religion*, teologi berarti pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan berdasarkan iman.

Menurut Harun Nasution (1995), disiplin teologi dalam Islam dikenal dengan istilah ‘ilm al-Tauhid. Dalam kerangka ajaran Islam yang berlandaskan prinsip monoteisme, tauhid dimaknai sebagai penegasan terhadap keesaan dan keunikan Allah SWT. Konsep ini menempati posisi fundamental dalam sistem kepercayaan Islam, karena menjadi sifat dasar dan paling utama dari seluruh atribut ketuhanan yang ada dalam teologi Islam. Teologi Islam disebut pula ‘ilm al-Kalam. Kalam adalah kata-kata, sehingga dengan pengertian kalam ini muncul dua pemahaman. Pertama, kalam ialah firman Tuhan. Karena soal kalam sebagai firman Tuhan atau al-Quran di kalangan umat Islam pada abad ke sembilan dan ke sepuluh Masehi pernah menimbulkan pertentangan-pertentangan keras sehingga timbul penganiayaan dan pembunuhan-pembunuhan terhadap sesama muslim pada masa itu. Kedua, yang dimaksud kalam adalah kata-kata manusia, karena kaum teolog Islam bersilat lidah dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing. Teolog dalam Islam dinamai dengan *mutakallimun*, yaitu ahli debat yang pandai memakai kata-kata.

Menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk (ketentuan atau perjanjian). Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, istilah “kalam” digunakan untuk menggambarkan segala bentuk ujaran, tanpa memandang jumlah katanya, yang mencakup

berbagai jenis percakapan (*likulli ma yatakallamu bihi*); atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Dalam ayat 144 surah al-A'raf, menyebut bi kalam yang ditujukan kepada Nabi Musa AS, menurut al-Baidawi maksudnya bi kalam iyyaka (Aku berbicara langsung kepadamu). Dalam ayat 15 surah al-Fath, kalama Allah diartikan janji atau ketentuan Allah SWT yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia.

Sebagai bentuk nomina dari kata taklim, istilah kalam memiliki dua makna utama, yaitu "berbicara" dan "hukum" atau "undang-undang". Dalam Surah Al-Baqarah ayat 75, kata kalam dipahami sebagai komunikasi langsung Allah SWT dengan Nabi Musa AS, atau sebagai representasi dari hukum Allah SWT yang dikenal dengan istilah din al-Islam. Sementara itu, dalam Surah At-Taubah ayat 6, kalam merujuk pada wahyu Allah SWT atau substansi ajaran Islam yang bersifat nyata dan komprehensif. Dalam konteks Al-Qur'an, kalam sebagai verba sering digunakan untuk menunjukkan tindakan berbicara kepada seseorang yang menjadi objek komunikasi. Abu Hasan al-Asy'ari dalam karya al-Ibanah mendefinisikan taklim sebagai al-Musyafahah bi al-Kalam, yaitu bentuk komunikasi verbal yang berlangsung secara langsung antara dua pihak.

Menurut Dini (2018), tujuan utama dari pendidikan karakter adalah membentuk peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak mulia dan moralitas yang baik. Pembentukan karakter ini diharapkan mampu mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keamanan, dan kemakmuran bersama. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pemerintah menginisiasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai upaya strategis untuk membudayakan nilai-nilai karakter dalam lingkungan pendidikan. Program PPK akan dilaksanakan dengan bertahap dan sesuai kebutuhan. Program PPK bertujuan untuk mendorong pendidikan berkualitas dan

bermoral yang merata di seluruh bangsa. Penerbitan Peraturan Presiden nomor 87 pasal 2 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), PPK memiliki tujuan: 1) Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. 2) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, dan 3) Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa karakter identik dengan akhlak, moral, dan etika. Menurut pandangan Islam, akhlak yang luhur terbentuk melalui implementasi ajaran syariat secara menyeluruh, yang didasari oleh keyakinan (*akidah*) yang kuat dan berlandaskan al-Qur'an serta al-Sunnah (*Hadits*).

Ibn Maskawaih (320-421/932-1030) mengartikan akhlak sebagai “*a state of the soul which causes it to perform its actions without thought or deliberation,*” keadaan jiwa yang karenanya menyebabkan munculnya perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran atau pertimbangan yang mendalam’. Definisi senada juga dikatakan oleh imam al-Ghazali sebagai berikut:

“Akhlak adalah keadaan sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (Arifin, 2002: 14)”.

Pendidikan karakter terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan karakter. Dalam Islam pendidikan karakter berarti usaha sadar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa

berbudaya yang baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk serta mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah.

2. Nilai-nilai Fisik-Fisiologis

Dalam upaya mewujudkan lulusan santri-siswa yang unggul, perhatian terhadap aspek fisik dan fisiologis menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Nilai fisik-fisiologis mencakup kebutuhan dasar santri-siswa yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, kebugaran jasmani, kebutuhan gizi, kebersihan, kenyamanan tempat tinggal, dan lingkungan belajar yang mendukung. Aspek ini secara langsung memengaruhi kesiapan belajar santri-siswa dan secara tidak langsung berdampak pada mutu hasil pembelajaran.

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow (1943), kebutuhan fisiologis menempati posisi paling fundamental dalam sistem motivasi manusia. Santri-siswa yang mengalami gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan fisik seperti rasa lapar, kelelahan, atau lingkungan belajar yang tidak nyaman, akan mengalami hambatan dalam konsentrasi, semangat belajar, dan keterlibatan dalam aktivitas pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, maka kebutuhan fisik-fisiologis ini harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pembelajaran.

Manajemen pesantren yang memperhatikan kualitas layanan fisik-fisiologis akan lebih mampu menciptakan suasana belajar yang sehat, produktif, dan berorientasi pada pengembangan potensi santri-siswa secara holistik. Hal ini dapat meliputi:

- a. Penyediaan asrama yang layak dengan ventilasi, pencahayaan, dan kebersihan yang baik.

- b. Pola makan dan asupan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan tumbuh kembang remaja.
- c. Kegiatan olahraga atau kebugaran jasmani yang terprogram dan berkelanjutan.
- d. Penyediaan fasilitas sanitasi dan kebersihan pribadi yang memadai.
- e. Penjadwalan aktivitas harian yang seimbang antara waktu belajar, ibadah, istirahat, dan rekreasi.

Kajian pendidikan Islam juga menunjukkan pentingnya perhatian terhadap jasmani dalam pembentukan pribadi yang seimbang. Rasulullah SAW bersabda:

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah..." (HR. Muslim)

Kekuatan fisik, sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini, menjadi bagian dari keutamaan seorang mukmin termasuk santri-siswa, karena tubuh yang sehat menjadi sarana untuk menunaikan ibadah dan menuntut ilmu dengan maksimal. Dalam konteks mutu pembelajaran, santri-siswa yang sehat secara fisik akan lebih siap menerima pelajaran, aktif berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, serta memiliki daya tahan terhadap tekanan akademik dan sosial.

Lebih jauh, aspek fisik-fisiologis juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan jadwal belajar, lama kegiatan mengaji, hingga desain ruang belajar yang ergonomis dan ramah santri-siswa. Pesantren yang berhasil menerapkan manajemen berbasis kesejahteraan fisik cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih kondusif, tingkat kehadiran yang tinggi, serta iklim pembelajaran yang positif.

Dari perspektif manajemen mutu, pemenuhan nilai fisik-fisiologis santri-siswa dapat dimasukkan dalam dimensi kualitas layanan pendukung pembelajaran (*supporting services quality*), sebagaimana ditegaskan oleh Sallis (2012) bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pengajaran, tetapi juga pada semua sistem pendukung yang menjamin efektivitas pembelajaran.

Lulusan unggul bukan hanya mereka yang cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual, tetapi juga mereka yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan prima, sehingga mampu menjalankan peran sosial, keagamaan, dan kepemimpinan dengan lebih optimal. Penguatan dimensi fisik-fisiologis sejak masa pembelajaran di pesantren menjadi strategi preventif dan produktif untuk mencetak santri-siswa yang kuat, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Karakter pada dasarnya dibentuk dan ditempa dimana lingkungan manusia berada. Karakter manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis berkaitan dengan aspek genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Dalam batas tertentu, sifat dan karakteristik orang tua cenderung diwariskan kepada keturunannya. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi takdir sifat dan pembawaan orang tua secara otomatis akan menurun pada si anak. Meskipun demikian faktor genetik atau biologis ini bukan menjadi dominan, karena harus melewati seleksi lingkungan yang lebih banyak berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Faktor lingkungan terdiri dari tiga, yaitu: (1) Lingkungan keluarga berfungsi sebagai unit sosial paling dasar yang menjadi wadah utama dalam proses sosialisasi individu (pewarisan nilai dan budaya). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan perkembangan karakter seseorang.

Anak akan memiliki karakter keras jika perilaku orang tua menunjukkan kekerasan dalam keluarga. Apa yang dilakukan orang tua akan dilihat dan dicontoh oleh anak-anaknya. Padahal hampir sepanjang waktu anak bersama keluarga sehingga semua yang dilakukan oleh orang tua akan terekam oleh anak dan secara tidak sadar akan mempengaruhi pembentukan karakter si anak. Sebaliknya, orang tua yang lembut, penuh kasih sayang, rajin, menghargai waktu, dan peduli terhadap anggota keluarga maka si anak kemudian hari akan menjadi anak yang rajin, sopan, dan memiliki rasa peduli terhadap sesama. (2) Lingkungan masyarakat atau teman sebaya. Masyarakat berperan sebagai media sosialisasi sekunder

setelah keluarga. Lingkungan yang baik, aman, tenang, dan damai akan menambah dan mewarnai karakter anak hingga tumbuh menjadi anak yang baik. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang bising, tidak aman, penuh dengan pelanggaran norma-norma sosial maka secara tidak langsung anak akan terpapar oleh nilai-nilai yang tidak baik sehingga dikemudian hari anak akan mudah menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada. (3) Sekolah berperan sebagai lingkungan ketiga yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter anak dan berkontribusi dalam menentukan arah masa depannya.

Sebagai lingkungan pendidikan utama, sekolah memainkan peran signifikan dalam membentuk kepribadian dan nilai-nilai karakter anak. Pewarisan budaya melalui lingkungan pendidikan menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter santri-siswa. Bahkan, sekolah menjadi wahana paling komprehensif dalam pembentukan karakter anak, karena mencakup pembelajaran pengetahuan umum, *science*, dan pengetahuan agama secara lengkap diberikan di bangku sekolah. Tidak hanya itu di lembaga pendidikan sekolah santri-siswa dilatih ketrampilan, bakat, dan minat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, tidak salah jika pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk kebutuhan pendidikan. Tugas sekolah sangat berat, harus mengemban amanah pemerintah, lewat kebijakan sekolah dan melalui tangan-tangan guru nasib masa depan bangsa ada di tangan mereka.

Oleh karena itu, pola pembentukan karakter di lingkungan sekolah harus benar-benar maksimal dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu,

sekolah harus memenuhi beberapa syarat yaitu: (1) Sekolah harus bisa menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik sebelum terjun di masyarakat. (2) Sekolah harus dapat menerapkan tata tertib, aturan dan disiplin sebagaimana mestinya. (3) Sekolah harus dapat menjadi tempat berlindung dari gangguan-gangguan yang dapat mengancam anak, baik ancaman dari sesama teman maupun ancaman dari luar sekolah. (4) Sekolah harus dapat memberikan bekal ketrampilan dan keahlian sesuai dengan bakat minat siswa. Sekolah harus dapat memberikan empati dan kasih sayang terhadap sesama.

Sekolah harus dapat mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Apabila itu dilakukan dengan baik maka santri-siswa ketika lulus dari bangku sekolah akan menjadi manusia yang baik, memiliki ketrampilan, toleransi, dan dapat mengembangkan bakat yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya.

Peran guru dan warga sekolah dalam pembentukan karakter santri-siswa sangatlah penting. Guru adalah orang tua kedua setelah di rumah. Sebagaimana layaknya orang tua, guru harus memperlakukan santri-siswa sebagaimana anaknya sendiri. Tidak boleh ada diskriminasi, perlakuan kasar, maupun kata-kata yang dapat menyakitkan hati anak. Guru harus menjadi contoh dan tauladan bagi santri-siswa. Sepatutnya guru harus menghindari hal-hal sebagai berikut: 1) guru mengajarkan rajin atau disiplin tapi gurunya sendiri sering terlambat, 2) guru mengajarkan toleransi terhadap sesama tapi gurunya tidak punya kepedulian terhadap anak didik, 3) guru mengajarkan hidup sederhana tapi gurunya sendiri hidup mewah, 4) guru mengajarkan kelembutan dan kasih sayang tapi gurunya sendiri kasar terhadap anak didik, 5) guru mengajarkan kebersihan tapi guru tidak pernah mengingatkan ketika ada sampah di kelas. Itulah beberapa hal yang mungkin masih kita temukan di beberapa sekolah.

Figur sebagai pendidik tidaklah mudah, karena guru memiliki peran ganda dalam mendidik anak. Di satu sisi guru dituntut mendidik

keluarganya sendiri dengan segala persoalannya tetapi di sisi lain guru juga harus berperan sebagai pendidik di sekolah. Dua peran ganda ini tidak boleh saling tumpang tindih (*Overlapping*), apabila guru sedang menghadapi persoalan keluarga di rumah jangan sampai dibawa ke sekolah, begitu juga ketika guru memiliki persoalan di sekolah jangan sampai di bawa ke rumah, karena apabila hal itu tidak bisa dihindarkan maka yang terjadi adalah pelampiasan emosi karena penempatan persoalan yang tidak pada tempatnya. Guru tidak hanya sekedar mengajar saja tapi bagaimana seorang guru bisa memberikan apa yang terbaik bagi anak didiknya. Seni di dalam mengelola permasalahan sangat diperlukan oleh guru karena bukan tidak mungkin guru setiap waktu pasti dihadapkan dengan berbagai persoalan dari santri-siswa. Mulai dari persoalan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran maupun persoalan di luar kelas.

Membangun karakter santri-siswa di lingkungan sekolah tidaklah mudah, perlu dukungan semua pihak dari seluruh warga sekolah, baik guru, tata usaha, kepala sekolah, maupun dari pihak terkait, seperti orang tua dan lembaga/instansi lainnya, seperti dinas kesehatan, kepolisian, BNN dan lain sebagainya. Sekolah harus berupaya menciptakan budaya karakter yang diinginkan. Proses penanaman nilai-nilai budaya dalam rangka pembentukan karakter peserta didik tidak bisa berjalan secara instan. Perlu dibiasakan, perlu kesabaran, dan yang lebih penting adalah komitmen bersama untuk membangun budaya karakter yang baik peserta didik.

Dukungan orang tua diperlukan untuk mewujudkan pembangunan karakter santri-siswa. Partisipasi orang tua dalam membantu pembentukan karakter sangat menentukan keberhasilan santri-siswa. Orang tua hendaknya harus percaya kepada sekolah, bahwa sekolah adalah lembaga terbaik selain keluarga yang dapat membangun karakter positif santri-siswa. Biarkan sekolah mendidik anak-anak mereka dengan pola dan sistem yang berlaku di sekolah. Jangan terlalu reaktif jika ada persoalan

yang menimpa anaknya, akan lebih baik jika dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak sekolah berdasarkan asas saling percaya. Hal ini akan menguatkan pihak sekolah bahwa sekolah mendapat kepercayaan dan dukungan yang baik dari pihak orang tua/wali.

Peran kepolisian dalam mengontrol perkembangan santri-siswa juga diperlukan, deteksi dini paham radikalisme dan potensi tindakan melanggar hukum perlu dikenalkan pihak kepolisian. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta penanganan kasus kriminal yang berpotensi pidana dan melawan hukum harus ditangani secara baik melalui kerja sama sekolah dengan lembaga kepolisian. Bila perlu kepolisian dapat melakukan razia ke sekolah-sekolah untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum. Secara psikologis kerja sama yang baik antara sekolah dengan pihak kepolisian juga akan menimbulkan rasa aman, tenang, dan tentram bagi seluruh warga sekolah. Pola kerja sama seperti ini harus dilakukan secara kontinu agar dapat menciptakan budaya tertib dan disiplin serta budaya taat hukum.

Peran Dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas juga tidak kalah pentingnya. Puskesmas dapat memberikan penyuluhan tentang bagaimana membudayakan pola hidup sehat dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Menciptakan budaya bersih, cinta terhadap lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya perlu digalakkan mengingat karakter santri-siswa masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi santri-siswa dengan latar belakang keluarga yang beragam tentunya kebiasaan mereka di rumah pasti terbawa ke sekolah. Tentunya ini memerlukan penanganan yang tidak mudah dari pihak sekolah terutama guru, bagaimana mengubah pola hidup mereka yang selama ini tidak sopan, tidak jujur, jorok, malas, sering terlambat, manja, dapat berubah menjadi sopan, jujur, rajin, sadar akan kebersihan, mandiri, dan bertanggung jawab tentu memerlukan kesabaran yang luar biasa.

Membiasakan santri-siswa berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, shalat tepat pada waktunya, mendirikan kantin kejujuran dapat melatih peserta didik agar bersikap jujur, bersyukur dan taat beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan upacara tiap hari senin untuk membentuk rasa patriotisme dan memberi bantuan terhadap korban bencana alam dapat melatih peserta didik memiliki rasa peduli terhadap sesama. Kuncinya agar penanaman pendidikan karakter di sekolah dapat berhasil tentunya memerlukan kesabaran dari pihak sekolah terutama guru sebagai orang tua di sekolah dengan tidak bosan-bosannya senantiasa melakukan secara terus-menerus menanamkan budaya bertanggungjawab di lingkungan sekolah. Aturan dan tata tertib sekolah perlu ditegakkan sesuai dengan porsinya dan guru harus benar-benar menerapkan prinsip “Tutwuri Handayani” maka pembentukan karakter di sekolah Insya Allah akan terwujud, sehingga tidak lagi kita jumpai pelajar-pelajar yang bringas, arogan, anarkis, dan terlibat kriminal. Tentu ini adalah harapan dari pemerintah dan masyarakat bagaimana menciptakan generasi-generasi emas di masa yang akan datang sehingga dapat membawa bangsa ini ke arah kemajuan yang *rahmatu lil alamiin*.

3. Nilai Etik

Pendidikan pesantren pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam. Dalam hal ini, nilai etik menjadi pilar fundamental dalam seluruh proses pendidikan, termasuk dalam strategi manajemen peningkatan mutu pembelajaran santri. Nilai etik mencakup seperangkat norma, prinsip moral, dan standar perilaku yang mengarahkan tindakan individu dan lembaga ke arah yang benar, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, nilai etik berperan penting sebagai pengarah dan pengontrol dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Manajemen yang etis akan melibatkan prinsip kejujuran

(*ṣidq*), amanah, adil (*‘adl*), tanggung jawab (*mas’uliyah*), dan konsistensi (*istiqāmah*) dalam setiap aspek kebijakan dan tindakan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pimpinan pesantren atau guru, tetapi juga ditanamkan secara sistemik dalam proses pembelajaran santri.

Dalam konteks peningkatan mutu, nilai etik berperan sebagai jaminan integritas sistem pendidikan, sehingga mutu yang dicapai bukan semata hasil teknis atau administratif, tetapi juga mencerminkan mutu moral dan integritas karakter semua pelaku pendidikan. Mutu pembelajaran yang etis berarti:

- a. Proses belajar-mengajar dijalankan dengan kejujuran dan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan santri.
- b. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.
- c. Interaksi antar santri, guru, dan pengelola pesantren dilandasi sikap saling menghormati dan tidak menyalahi hak-hak orang lain.

Etika juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan lulusan yang unggul. Lulusan pesantren tidak hanya diharapkan menguasai ilmu-ilmu keislaman dan keterampilan hidup, tetapi juga memiliki keteladanan moral (*qudwah ḥasanah*), kepekaan sosial, dan sikap profesional yang berbasis etika Islam. Dalam Islam, akhlak dan etika menjadi cerminan kualitas pribadi yang sejati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan yang unggul adalah pendidikan yang menghasilkan pribadi-pribadi beretika tinggi, bukan sekadar berprestasi secara akademik. Oleh karena itu, pengelolaan mutu pembelajaran santri harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga bernilai secara moral.

Secara institusional, nilai etik dalam manajemen mutu juga menuntut akuntabilitas publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan terhadap evaluasi dan kritik. Etika institusi pendidikan

pesantren yang kuat akan menumbuhkan budaya mutu yang berkelanjutan (*quality culture*) karena didasari oleh rasa tanggung jawab moral terhadap amanah pendidikan dan kepercayaan masyarakat.

Etika dan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial bermasyarakat, dalam hal persahabatan, hubungan orang tua, saudara, serta hubungan berbangsa dan bernegara. Sejatinya “Etika Moral” tidaklah merujuk pada satu pengertian tunggal, melainkan mencerminkan konsep yang kompleks. “Etika Moral” berasal dari penggabungan dua kata yang berbeda, yaitu etika dan moral. Keduanya pun memiliki arti yang berbeda. Menurut Robert Kreitner (2010) *Ethics involves the study of moral issues and choices. It is concerned with right versus wrong, good versus bad, and the many shades of gray supposedly black-and white issues. Moral implication spring from virtually every decussion, both on and of the job.*

Etika tidak terlepas dari pilihan-pilihan dan isu-isu moral yang berkaitan khususnya dalam membedakan antara yang benar dan salah, serta yang baik dan buruk. Implikasi etika dan moral banyak muncul di setiap kondisi baik masyarakat dan dunia pekerjaan. Sehingga etika dapat dipahami sebagai seperangkat norma moral yang menjadi pedoman dalam membedakan perilaku yang benar dan yang salah. Etika seorang individu tercermin dalam sikap dan perilaku dalam menyikapi lingkungan sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang berlaku.

Moral dan etika selalu menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini, pendapat dari Colquitt, Lepine dan Wesson (2011) “*ethics reflects the the degree to which the behaviors of an authority are in accordance with generally accepted moral norms*”. Dalam hal ini etika merefleksikan perilaku dari individu seseorang sesuai dengan moral dan standar norma yang berlaku. Pada dasarnya seseorang bertanggung jawab atas perilaku sosial di masyarakat yang seharusnya dilandasi oleh moral yang berlaku di masyarakat. Jadi selalu ada kendali moral terhadap setiap perilaku dan sikap seseorang di lingkungan sosial. Etika dapat dipahami sebagai

suatu batasan yang diterima oleh banyak orang terhadap suatu nilai moral dan dilandasi dengan kepercayaan, rasa tanggung jawab dan integritas yang menjadi bagian dari sistem nilai sosial masyarakat.

Etika dan pendidikan memiliki peran yang berbeda, namun keduanya berjalan seiring dalam membentuk karakter dan integritas peserta didik. Untuk membangun pemahaman yang tepat pada kedua pokok ini sebagai modal awal dalam pemahaman yang benar tentang etika pendidikan harus didasarkan pada suatu pengertian yang benar tentang etika pendidikan itu sendiri.

Dalam konteks pendidikan etika dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kebiasaan, kemampuan, potensi, bakat, serta minatnya secara seimbang dengan nilai-nilai moral yang benar, sehingga mampu menjalani kehidupannya secara bertanggung jawab dan bermartabat. “Rata-rata semua orang mengenali pendidikan dan melaksanakan pendidikan baik formal atau non formal. Pendidikan tidak terpisah dari etika dalam kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan setelah anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka juga akan memberi pendidikan dari orang tuanya dan mendidik anak mereka dengan baik, sesuai dengan etika yang biasanya diwariskan atau bisa disebut adat istiadat”.

Etika dan pendidikan adalah dua aspek yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang yang memiliki pendidikan dan dikatakan berpendidikan akan tercermin melalui sikap, perilaku, serta tutur katanya yang mencerminkan etika yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini menjadi landasan etika, karena menurut Umar Tirtaraharja (2005) bahwa Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan dapat dipahami sebagai dasar atau kapasitas awal yang

memungkinkan individu berkembang sepenuhnya sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan itu berlangsung dengan efektif dan mencapai keberhasilan jika seorang pendidik mampu memahami dan menerapkan konsep keteladanan yang baik berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang baik.

Sedang karakter merujuk pada serangkaian sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), motivasi (*motivation*), dan keterampilan (*skill*) yang melekat pada diri manusia. Seorang yang berkarakter baik akan menerapkan dan mencerminkan nilai-nilai etika pada kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan yang bermakna.

Menurut Lickona (1991) setidaknya ada tujuh alasan fundamental mengapa pendidikan karakter perlu diberikan kepada warga Negara sejak usia dini, yaitu:

- a. Untuk memastikan para anak didik memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya sehingga mampu berkembang menjadi manusia yang baik dan mampu membedakan benar dan salah, serta mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.
- b. Dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Karakter positif seperti disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab terbukti berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan hasil belajar anak didik.
- c. Untuk membekali anak didik dengan nilai-nilai moral universal. Anak didik dikenalkan pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Untuk membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk.
- e. Untuk mempersiapkan anak menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Karakter yang kuat menjadikan individu lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas dan bangsa.

- f. Untuk membentuk dan memperkuat nilai-nilai keluarga.
- g. Sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian integral dari pembangunan dan kelangsungan suatu peradaban.

Dari penjelasan di atas, kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Menurut Kristiawan (2016).Pembinaan karakter harus dilaksanakan terus menerus secara holistik di semua lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

4. Nilai Estetik

Nilai estetik dalam pendidikan mengacu pada dimensi keindahan, keteraturan, keharmonisan, dan rasa seni yang terinternalisasi dalam lingkungan, proses, maupun hasil pendidikan. Dalam konteks manajemen peningkatan mutu pembelajaran santri, nilai estetik berperan dalam menciptakan suasana belajar yang inspiratif, nyaman, dan menyenangkan, sekaligus membentuk pribadi santri yang mencintai keindahan, keteraturan, dan kehalusan budi pekerti. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya nilai keindahan.

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."

(HR. Muslim, No. 91)

Hadis ini menunjukkan bahwa keindahan adalah bagian dari nilai Ilahiyah, dan karenanya pendidikan yang berkualitas seharusnya mengandung dan menampilkan aspek estetik dalam setiap aspeknya. Dalam konteks pembelajaran santri, nilai estetik bisa dimaknai sebagai keindahan visual, spiritual, verbal, dan moral yang menyatu dalam kegiatan belajar mengajar dan kehidupan pesantren sehari-hari.

Secara praktis, nilai estetik dalam manajemen pembelajaran mencakup beberapa hal berikut:

- a. Penataan ruang belajar dan lingkungan pesantren yang bersih, rapi, dan asri, sehingga menciptakan kenyamanan dan ketenangan dalam belajar.
- b. Penggunaan media pembelajaran yang menarik secara visual dan artistik, untuk merangsang minat belajar dan daya apresiasi santri.
- c. Pengembangan ekspresi seni Islami, seperti kaligrafi, nasyid, seni baca Al-Qur'an (*tilawah*), dan teater dakwah, yang memperkuat dimensi emosional dan spiritual santri.
- d. Pembiasaan sikap santun, tertib, dan anggun dalam bersikap dan berpakaian, sebagai bagian dari estetik moral dan budaya.

Dari sisi manajemen mutu, nilai estetik berperan dalam membentuk iklim sekolah yang harmonis dan kondusif, karena keindahan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup suasana emosional dan relasi sosial yang sehat. Pesantren yang memperhatikan unsur estetika akan lebih mampu:

- a. Menumbuhkan kecintaan santri terhadap lingkungan dan proses pembelajaran.
- b. Meningkatkan motivasi internal dan ketenangan jiwa, sehingga santri lebih fokus dan produktif dalam belajar.
- c. Membentuk karakter santri yang halus perasaan, kreatif, dan berempati tinggi, sebagai bagian dari profil lulusan unggul.

Nilai estetik juga mendorong hadirnya pembelajaran yang bermakna dan menyentuh, karena keindahan mampu menjadi medium untuk membangkitkan emosi positif dan memperkuat keterikatan terhadap nilai-nilai keislaman. Dalam pendidikan Islam klasik, keindahan (*al-jamāl*) bahkan dianggap sebagai bagian dari jalan menuju kedekatan dengan Allah, sebagaimana tercermin dalam seni Islam yang mendalam dan penuh makna.

Lulusan santri yang unggul tidak hanya ditandai dengan kecerdasan intelektual dan kekuatan spiritual, tetapi juga dengan kepekaan estetik terhadap nilai-nilai keindahan hidup, baik dalam bentuk moral,

budaya, maupun ekspresi kreatif. Mereka akan tampil sebagai individu yang:

- a. Menjaga kerapian, kebersihan, dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memiliki rasa seni dan daya apresiasi terhadap kebudayaan Islami.
- c. Menghargai harmoni sosial dan keindahan perilaku dalam interaksi masyarakat.

Manajemen pembelajaran yang menanamkan nilai estetik secara konsisten akan melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam substansi keilmuan, tetapi juga menawan dalam kepribadian, ekspresi, dan kontribusi sosial.

Dalam buku yang ditulis Wibisono, dkk. Liang Gie (1989:6.57), menjelaskan bahwa istilah *estetika* berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*aisthetika*” yang berarti hal-hal yang dapat diserap dengan panca indra, dan dari kata “*aisthesis*” yang berarti persepsi indra (*sense perception*). Adapun menurut Kadir dalam buku Wibisono, dkk. (1989:6.57), menyatakan, bahwa secara etimologis estetika dipahami sebagai teori mengenai ilmu pengindraan. Istilah estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan, pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gattlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman (1714 – 1762). Pemikiran tentang keindahan dan seni dimulai sejak masa Yunani Kuno, dengan sebutan filsafat keindahan. Adapun pengertian estetika secara umum dapat disimpulkan sebagai cabang filsafat yang membahas tentang keindahan/hal yang indah.

Estetika memiliki dua persoalan pokok, yaitu persoalan tentang nilai estetis dan persoalan pengalaman estetis. Dalam kajian teori nilai, keindahan dipandang sebagai salah satu bentuk nilai yang setara kedudukannya dengan nilai-nilai lain seperti nilai moral, nilai ekonomi, nilai religius, dan berbagai nilai penting lainnya dalam kehidupan manusia. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan

dengan pengertian keindahan disebut nilai estetis (Koento Wibisono, dkk.1989:6.72).

Nilai estetis sebagai salah satu nilai manusiawi, menurut The Liang Gie (1976), tersusun dari sejumlah nilai yang dalam estetika dikenal sebagai kategori-kategori keindahan atau kategori-kategori estetis. Tiga pasang kategori estetis tersebut mencakup kategori antara yang agung dan yang elok, kategori antara yang kosmis dan yang tragis, dan kategori antara yang indah dan yang buruk.

Pengertian keindahan menurut cakupannya dibedakan antara keindahan sebagai kualitas abstrak (*beauty*) dan keindahan yang merujuk pada objek atau benda tertentu yang dianggap indah (*the beautyful*). Dalam praktiknya, kedua bentuk pemahaman ini kerap kali saling berpadu dan tidak dipisahkan secara tegas. Menurut Wibisono (1989: 6.72) keindahan dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori menurut luasnya yaitu keindahan dalam arti terluas, keindahan dalam arti estetis murni, dan keindahan dalam arti terbatas khususnya yang berkaitan dengan aspek visual atau penglihatan. Keindahan dalam arti luas dipahami sebagai representasi dari ide tentang kebaikan. Aristoteles sendiri memandang keindahan sebagai sesuatu yang bersifat baik dan menyenangkan. Sementara itu, keindahan dalam arti terbatas hanya menyangkut pada objek-objek yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan, seperti keindahan bentuk dan warna. Menurut The Liang Gie, sebagaimana dikutip dalam Wibisono (1989:6.73 mengemukakan bahwa keindahan adalah Kumpulan sifat atau kualitas pokok tertentu yang melekat pada suatu objek. Kualitas-kualitas tersebut meliputi kesatuan (*unity*), kesetangkupan (*harmony*), keseimbangan (*balance*), perlawanan (*kontras*), dan keselarasan (*symmetry*). Berdasarkan sejumlah kualitas tersebut, keindahan terbentuk dari berbagai keselarasan dan kebalikan dari unsur-unsur garis, warna, bentuk, nada, maupun kata-kata. Dengan kata lain, keindahan dapat dipahami sebagai suatu kumpulan

dari hubungan yang selaras dalam suatu benda, hubungan benda dengan pengamat.

Aspek kedua yang menjadi perhatian dalam kajian estetika adalah pengalaman estetis. Pengalaman estetis ini merujuk pada respons atau tanggapan subjektif seseorang terhadap suatu objek yang memiliki nilai estetis. Pengalaman estetis adalah suatu pengalaman psikologis, yang bercirikan sebagai sifat yang tidak berkepentingan, yaitu pengamatan tanpa adanya tujuan apa pun, kecuali perbuatan pengamatan itu sendiri. John Hospera dalam Wibisono (1989:6.74) menyebut bahwa pengalaman estetis sebagai keterlibatan seseorang dalam mengapresiasi objek-objek yang memiliki nilai estetik baik dalam bentuk seni maupun fenomena alam. Hal yang bertentangan dengan pengalaman estetis adalah kesenadaan (monoton) dan kekacaubalauan (*confusion*).

Suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan memegang peranan penting dalam menunjang efektivitas proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman, baik secara fisik maupun psikologis, berkontribusi langsung terhadap peningkatan konsentrasi peserta didik serta stimulasi pengembangan kreativitas. Oleh karena itu, Semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, mulai dari pimpinan sekolah, karyawan, siswa, terlebih guru, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim pembelajaran yang positif dan menyenangkan tersebut. Keindahan lingkungan fisik serta ketenangan dan keluhuran jiwa menjadi faktor penting yang turut mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kajian tentang keindahan merupakan bagian dari cabang filsafat yang dikenal dengan istilah estetika. Dalam konteks pendidikan, unsur keindahan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai aspek proses pembelajaran. Hal ini mencakup estetika fisik bangunan sekolah, penataan ruang kelas, lingkungan sekitar sekolah, penggunaan media pembelajaran yang menarik, penampilan dan sikap profesional guru, kualitas layanan yang diberikan oleh guru dan tenaga kependidikan, pola komunikasi yang

harmonis, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, inspiratif, dan bermakna bagi peserta didik. Apabila seluruh aspek tersebut dikelola dan disajikan dengan sentuhan estetika yang baik, maka lingkungan sekolah akan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi seluruh warganya. Dalam praktiknya, aspek keindahan fisik sekolah, ruang kelas, mutu pelayanan, serta kualitas komunikasi antarwarga sekolah masih memerlukan upaya pembenahan yang berkelanjutan. Sekolah idealnya diposisikan sebagai rumah kedua, di mana keindahan dan keharmonisan lingkungan perlu dijaga secara kolektif oleh seluruh elemen yang terlibat dalam proses pendidikan.

Mengacu pada pemahaman mengenai keindahan dalam makna yang luas, yaitu keindahan sebagai representasi dari ide tentang kebaikan dan hal-hal yang menyenangkan, maka proses pembelajaran pun seyogianya mengandung unsur keindahan. Keindahan dalam pembelajaran tersebut harus berangkat dari landasan ide kebaikan, yang antara lain tercermin dalam niat yang tulus dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apabila dikaji secara mendasar, tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas harkat martabat kemanusiaan serta memberikan tambahan nilai bagi manusia secara umum, khususnya peserta didik. Apabila tujuan pembelajaran ini tercapai, hal tersebut akan membawa dampak positif dan menyenangkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Peserta didik dan guru harus memahami bahwa proses pembelajaran adalah proses transformasi diri yakni upaya pemberian nilai tambah yang berdampak tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sudah tidak relevan lagi apabila peserta didik memaknai pembelajaran semata-mata sebagai sarana untuk meraih kelulusan atau nilai tinggi yang melebihi batas standar minimal. Demikian pula, pendidik tidak seharusnya menjalankan pembelajaran sebatas formalitas pemenuhan

tugas tanpa perencanaan yang matang dan pendekatan yang komprehensif.

Selanjutnya, untuk pengertian keindahan dalam arti terbatas, yaitu keindahan dipahami sebatas sesuatu yang berkaitan dengan objek-objek yang dapat ditangkap melalui indra penglihatan (keindahan bentuk dan warna). Proses pembelajaran yang memiliki keindahan sehingga menyenangkan adalah proses pembelajaran yang didukung dengan fasilitas, sarana, prasarana, dan lingkungan dengan bentuk dan warna yang menarik dan menyenangkan, sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan memotivasi peserta didik. Kreativitas sekolah, baik guru maupun peserta didik untuk mendesain sarana prasarana pembelajaran dan lingkungan pembelajaran, perlu dilatih dan dibudayakan sebagai bagian dari upaya menciptakan proses belajar yang inovatif dan bermakna. Misalnya, media pembelajaran yang dirancang dengan bentuk dan warna yang menarik dan sesuai dengan materi ajar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Penggunaan buku saku, ilustrasi kartun, bahan pengembangan materi ajar yang unik, penciptaan suasana kelas yang bervariasi, akan menciptakan suasana kelas merupakan upaya strategis untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Mengacu pada definisi mengenai keindahan adalah sejumlah kualitas esensial yang melekat pada suatu objek tertentu, yaitu kualitas kesatuan (*unity*), keselarasan (*harmony*), keseimbangan (*balance*), perlawanan (*kontras*), dan kesetangkupan (*symmetry*), maka proses pembelajaran yang memiliki keindahan sehingga menyenangkan adalah proses pembelajaran yang mampu meyatukan semua kualitas keindahan ke dalam kegiatan pembelajaran dan terpadu. Semua pihak dan hal yang terlibat dalam proses pembelajaran harus membentuk satu kesatuan (*unity*), tidak boleh ada salah satu hal atau pihak yang terpisahkan. Contohnya, seorang guru idealnya mampu menyatu secara utuh dengan peserta didik dan materi ajar. Hal ini berarti bahwa guru perlu membangun kedekatan emosional dan interaksi yang hangat dengan

peserta didik, sekaligus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap buku ajar sebagai sumber referensi. Penyatuan ini mencerminkan keterlibatan penuh guru dalam proses pembelajaran, baik secara pedagogis maupun afektif. Guru yang tidak paham dengan materi ajar dapat menciptakan jarak psikologis antara guru dan peserta didik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan suasana pembelajaran yang monoton dan kurang menarik, sehingga menghambat keterlibatan aktif peserta didik dan tidak mendorong tumbuhnya kreativitas maupun semangat belajar untuk berkembang secara optimal. Proses pembelajaran yang mengandung unsur keindahan ditandai oleh adanya kualitas keselarasan (*harmony*), yaitu kesesuaian dan kesinkronan proses pembelajaran yang memuat cara berpikir dan tujuan yang akan dicapai di antara semua komponen proses pembelajaran. Keberadaan kualitas keselarasan ini akan mempermudah jalannya pembelajaran, memperlancar interaksi antar komponen, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung keterlibatan peserta didik secara optimal. Kualitas ketiga adalah yang mencerminkan keindahan dalam pembelajaran adalah keseimbangan (*balance*). Pembelajaran akan menyenangkan apabila di dalamnya tercipta keseimbangan dalam berbagai aspek, seperti kemampuan berpikir kritis dan reflektif, perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta didik, serta pemberian kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan berpikir, perlakuan, pemberian kesempatan yang berat sebelah dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang kurang kondusif dan tidak menyenangkan. Kondisi semacam ini berisiko menurunkan motivasi belajar serta menghambat partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kualitas keempat dalam estetika pembelajaran adalah perlawanan atau kontras (*contrast*), proses pembelajaran akan menyenangkan apabila terdapat ruang bagi perbedaan pendapat yang bersifat argumentatif dan konstruktif. Perbedaan pandangan yang dilandasi oleh alasan logis dapat mendorong diskusi yang sehat,

memperkaya perspektif peserta didik, serta menumbuhkan budaya berpikir kritis dalam lingkungan belajar. Kualitas kelima adalah kesetangkupan (*symmetry*). Dalam proses pembelajaran kualitas ini dapat diwujudkan dalam penataan ruang kelas yang tertib, proporsional, dan serasi. Penataan fisik ruang belajar yang simetris tidak hanya menciptakan kenyamanan visual, tetapi juga mendukung suasana belajar yang teratur dan menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa estetika, sebagai cabang filsafat, memiliki kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan, terarah, dan berorientasi pada kemajuan.

Kontribusi filsafat keindahan/estetika dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkembang adalah semua pihak dalam pembelajaran memiliki ide bahwa pembelajaran adalah proses peningkatan harkat martabat manusia, proses pemberian nilai tambah kepada manusia, sehingga harus dilaksanakan dengan kesungguhan dan kebaikan. Selain itu proses pembelajaran diupayakan untuk selalu didukung oleh sarana prasarana dan lingkungan yang menarik, penuh kreativitas. Agar proses menyenangkan dan berkembang, perlu diperhatikan kualitas kesatuan, keselarasan, keseimbangan, perlawanan, dan kesetangkupan, dalam semua aspek sistem pembelajaran.

5. Nilai Logis-Rasional

Nilai logis-rasional memegang peran krusial dalam sistem pendidikan yang menekankan penggunaan akal sehat, nalar ilmiah, dan argumentasi sistematis dalam memahami, mengelola, dan mengembangkan proses pembelajaran. Dalam konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, nilai logis-rasional sangat relevan dalam mendukung pembelajaran santri agar tidak hanya mengandalkan hafalan dan taqlid, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif sebagai dasar mewujudkan lulusan yang unggul.

Islam sendiri sangat menghargai akal dan rasionalitas sebagai salah satu anugerah tertinggi dari Allah SWT kepada manusia. Al-Qur'an secara

konsisten mendorong manusia untuk menggunakan akal (*'aql*), berpikir (*tafakkur*), dan merenung (*tadabbur*) dalam memahami tanda-tanda kebesaran-Nya.

Ayat ini menegaskan bahwa proses berpikir dan menggunakan logika adalah bagian integral dari pendekatan Islami terhadap ilmu dan kehidupan. Oleh karena itu, sistem manajemen pembelajaran santri harus mendorong lahirnya budaya berpikir ilmiah, penyusunan argumentasi, serta pemecahan masalah yang rasional dalam setiap aspek kurikulum dan aktivitas pendidikan.

Lulusan unggul dari sistem pendidikan pesantren yang menerapkan nilai logis-rasional adalah individu yang:

- a. Memiliki kekuatan intelektual dan nalar sehat dalam memahami ajaran Islam serta problematika sosial.
- b. Mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan penalaran modern, menjembatani antara tradisi dan kemajuan.
- c. Siap menjadi pemimpin masyarakat yang kritis, sistematis, dan solutif, baik dalam menyampaikan fatwa maupun dalam mengambil kebijakan.

Keunggulan santri tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kitab yang dihafal, tetapi juga oleh kemampuannya dalam memahami konteks, menyusun argumen, dan mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas dan nilai-nilai *syar'i*. Dalam konteks ini, nilai logis-rasional menjadi prasyarat bagi terbentuknya ulama intelektual, pemikir reformis, dan pembaru sosial yang lahir dari pesantren. Nilai Logis terbagi menjadi beberapa aliran, diantaranya:

a. Esensialisme

Menurut Ornstein (2004) aliran filsafat pendidikan esensialisme, pengetahuan mencakup keterampilan-keterampilan dasar serta mata pelajaran akademik yang esensial. Selain itu, pengetahuan juga meliputi penguasaan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang dianggap penting untuk

membentuk individu yang terdidik. Tenaga pendidik memiliki otoritas keilmuan dalam bidang studi yang menjadi tanggung jawab pengajarannya, sehingga perannya tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang sah dalam proses pembelajaran. Guru berperan dalam mentransmisikan berbagai bentuk pengetahuan, sikap, dan nilai tradisional. Kurikulum difokuskan pada penguasaan keterampilan-keterampilan dasar melalui mata pelajaran utama, mata pelajaran utama antara lain: bahasa pribumi (*indigenous language*) seperti bahasa nasional Indonesia dan bahasa daerah contohnya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda; bahasa asing (*foreign language*) seperti bahasa Inggris, bahasa Arab; sains; sejarah; dan matematika. Arah pengembangan kurikulum ini menunjukkan penekanan pada penguatan fondasi akademik, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, serta pencapaian keunggulan dalam pendidikan.

b. Rekonstruksionisme

Begitu pula fakta empirik dengan aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang menurut Harmon, Deborah A. dkk (2005) bahwa dalam mereka percaya bahwa sekolah harus menghasilkan kebijakan dan kemajuan yang akan membawa reformasi tatanan sosial, dan guru harus menggunakan kekuasaan mereka untuk memimpin yang muda dalam program reformasi sosial. Kaum rekonstruksionis setuju filsafat pendidikan yang berbasis pada budaya dan tumbuh dari pola budaya tertentu terkondisikan oleh kehidupan pada waktu tertentu di tempat tertentu. Mereka percaya bahwa budaya adalah dinamis, bahwa manusia dapat membentuk kembali budayanya sehingga ia membuka kemungkinan optimal untuk pembangunan.

c. Progresivisme

Aliran filsafat pendidikan Progresivisme Dewey (2011), menyatakan bahwa pendidikan yang sejati bersifat progresif jika didasarkan pada pengalaman langsung dan hasil interaksi aktif individu dengan lingkungannya. Proses belajar seharusnya

mencerminkan kehidupan nyata dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti filsafat eksperiensial, pendidikan seharusnya tidak berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan eksternal semata, melainkan menjadikan pengalaman itu sendiri sebagai hasil utama, yang kemudian menjadi dasar dan pengarah bagi pengalaman-pengalaman belajar selanjutnya secara berkelanjutan dan reflektif. Situasi tersebut dapat diwujudkan melalui penciptaan lingkungan belajar yang mendukung, serta melalui kegiatan praktik yang selaras dengan minat peserta didik, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk memilih dan mengembangkan potensi diri sesuai minatnya masing-masing. Filsafat ini pada umumnya tidak diterapkan secara menyeluruh dalam keseluruhan struktur kurikulum, melainkan lebih diarahkan pada bidang-bidang tertentu dalam lembaga pendidikan yang relevan dengan pendekatan pengalaman, kreativitas, dan kebutuhan peserta didik, seperti dalam kegiatan berbasis proyek, seni, atau pembelajaran kontekstual. berakar pada aliran pragmatisme, yang menekankan pentingnya pengalaman dan konteks nyata dalam proses belajar. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mendorong terbentuknya kehidupan sosial yang demokratis, partisipatif, dan berkeadaban melalui pendidikan. Pengetahuan berperan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan, proses pembelajaran secara langsung, fokus pada pembelajaran aktif yang relevan.

d. Perenialisme

Filsafat pendidikan perenialisme berdasarkan filsafat realisme. Aliran ini adalah untuk mendidik orang yang rasional dan untuk menanamkan intelektualitas. Pengetahuan difokuskan pada warisan pengetahuan lampau, studi permanen, dan pengetahuan abadi. Guru membantu siswa untuk berpikir secara rasional dengan menggunakan metode sokrates (*socratic method*), penyampaian secara lisan, pengajaran nilai-nilai tradisional secara eksplisit. Fokus

kurikulum adalah mata pelajaran klasik, analisis literal, dan kurikulum konstan. Tren yang berhubungan dengan kurikulum adalah karya-karya besar, proposal paideia. Dengan cirinya yang berupa pola klasik yang menekankan pada aspek berfikir rasional filsafat pendidikan seperti ini dapat terlaksana dalam ruang-ruang diskusi yang mengandalkan argumen-argumen dan nalar para peserta didik. Sehingga filsafat pendidikan seperti ini teraplikasi dalam metode dan strategi pengajaran di kelas dengan pilihan topik berdasarkan realitas objektif yang relevan.

6. Nilai Teleologik

Teleologik berasal dari akar kata Yunani, yaitu *telos*, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan *logos*, perkataan. Teleologik adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Nilai teleologik dalam filsafat pendidikan mengacu pada orientasi terhadap tujuan akhir (*telos*) dari suatu proses atau tindakan.

Menurut Christian Wolff (seorang filsuf Jerman, Abad ke-18) teleologik merupakan sebuah kajian mengenai gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana seluruh unsur tersebut terwujud dalam suatu proses perkembangan yang terarah. Secara umum teleologik dipahami sebagai kajian filosofis yang menelusuri adanya indikasi perencanaan, fungsi, atau tujuan yang terkandung di dalam alam semesta maupun dalam perjalanan sejarah umat manusia.

Nilai teleologik menurut Sanusi (1994) adalah nilai yang berkaitan dengan tujuan akhir dari suatu tindakan. Artinya, setiap perbuatan atau keputusan manusia harus didasarkan pada hasil yang ingin dicapai, bukan hanya prosesnya saja. Nilai ini menekankan bahwa hidup harus dijalani dengan tujuan yang jelas, berorientasi pada hasil yang bermanfaat, dan berkontribusi terhadap kemajuan diri maupun masyarakat.

Dalam kerangka pendidikan, pendekatan teleologik menekankan bahwa setiap aktivitas pembelajaran, kebijakan manajerial, serta

pengembangan sistem pendidikan harus diarahkan pada tujuan moral, sosial, dan spiritual yang ideal. Maka, dalam konteks *manajemen peningkatan mutu pembelajaran santri*, nilai teleologik menempatkan visi besar pendidikan Islam sebagai pemandu strategis dalam setiap proses peningkatan mutu. Dalam perspektif Islam, orientasi tujuan dalam pendidikan tidak semata-mata bersifat duniawi (seperti pencapaian nilai akademik), tetapi juga bersifat *ukhrawi* dan transendental, yakni membentuk insan yang beriman, berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utama dari pembelajaran santri adalah mencetak insan kamil, pribadi yang seimbang antara intelektual, spiritual, sosial, dan moral, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Baqarah: 129:

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 129)

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah *tazkiyah* (penyucian diri) dan pengembangan hikmah (kebijaksanaan), yang keduanya menjadi bagian dari orientasi teleologik dalam sistem pendidikan pesantren. Manajemen mutu pembelajaran yang berorientasi pada nilai teleologik akan:

- a. Memiliki arah dan visi strategis yang jelas
 - 1) Setiap program peningkatan mutu dirancang berdasarkan tujuan jangka panjang: mencetak lulusan yang unggul secara akhlak, ilmu, dan kontribusi sosial.
 - 2) Visi pesantren menjadi kompas moral dan operasional dalam merancang kebijakan mutu.
- b. Menekankan keberlanjutan (*sustainability*) tujuan pendidikan
 - 1) Tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek (*output*), tetapi juga pada dampak jangka panjang (*outcome dan impact*), yaitu kebermanfaatan santri bagi umat.

- 2) Menilai mutu pembelajaran bukan hanya dari nilai akademik, tetapi juga dari perubahan sikap, akhlak, dan tanggung jawab sosial.
- c. Mengintegrasikan spiritualitas dalam indikator mutu
Keberhasilan manajemen mutu tidak hanya diukur dengan standar administratif, tetapi juga dengan pencapaian nilai-nilai keimanan, keikhlasan, dan pengabdian sebagai bagian dari hasil pendidikan.
- d. Mengutamakan proses pembentukan karakter dan misi hidup santri
Pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan konten, tetapi diarahkan pada pencarian makna hidup, misi sosial, dan kontribusi terhadap perubahan masyarakat.

Dalam pendekatan teleologik, lulusan unggul bukan hanya dilihat dari aspek kognitif atau keterampilan teknis, tetapi dari sejauh mana lulusan tersebut mampu menjalani hidup dengan tujuan luhur, mengaktualisasikan dirinya dalam kebaikan sosial, dan menjadi pemimpin yang bermakna di tengah masyarakat. Karakteristik lulusan unggul dalam kerangka teleologik meliputi:

- a. Komitmen pada nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal.
- b. Kesadaran misi hidup dan tanggung jawab sosial.
- c. Kemampuan membawa perubahan berbasis nilai dan visi jangka panjang.

Pendidikan berbasis pesantren yang menekankan nilai teleologik secara tidak langsung membentuk lanskap kepemimpinan moral-spiritual yang tahan terhadap krisis moralitas dan mampu memberikan arah di tengah dinamika global.

C. Landasan Teori dan Konsep

1. Teori Manajemen

Istilah manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *managiere*, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siasah*, *idarah*, *tadbir* yang keseluruhannya mengarah pada makna mengelola, melakukan,

melaksanakan, mengurus sesuatu. Secara sederhana manajemen didefinisikan sebagai pengelolaan.

Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Sementara itu dalam Bahasa Indonesia sendiri manajemen diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran.

Terry (1953) menjelaskan bahwa *Management is performance of conceiving desired result by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan pemberdayaan manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

Sedangkan Griffin (2013) mendefinisikan manajemen sebagai suatu rangkaian aktifitas mencakup perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Sudjana (2004), manajemen dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Charles (2008) menyebutkan bahwa *management the art of getting thing done through people*”, yaitu seni memperoleh tindakan melalui orang lain.

Menurut Paul W. Thurston dikutip oleh Bafadal (2003) bahwa manajemen adalah *process of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently*, yaitu proses kerja dengan dan

mendayagunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Manajemen berarti suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi serta pemanfaatan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Pemikiran tersebut menegaskan bahwa manajemen adalah proses pelaksanaan yang melibatkan beberapa unsur seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Apabila ditinjau sudut pandang fungsional, kerap manajemen diartikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui dan dengan orang lain. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran sumber daya manusia sebagai elemen sentral dalam pencapaian sasaran organisasi secara kolektif. Pengertian di atas jika dikaitkan dengan organisasi sekolah, manajemen sekolah dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pimpinan sekolah untuk mengarahkan aktivitas semua komponen yang ada ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Proses pencapaian tujuan ini melalui kerjasama yang terintegrasi semua komponen sekolah secara horizontal maupun vertikal.

Beragamnya definisi yang diungkapkan oleh para ahli mencerminkan keberagaman sudut pandang yang berkembang seiring dengan perjalanan sejarah ilmu manajemen itu sendiri. Banyak kesulitan yang dialami dalam melacak sejarah manajemen, namun demikian dipastikan bahwa prinsip ilmu manajemen telah terjadi dan ada sejak ribuan tahun yang lalu dalam berbagai peradaban.

Salah satu bukti bahwa prinsip-prinsip manajemen telah diterapkan dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Proses Pembangunan piramida tersebut melibatkan lebih dari 100.000 orang tenaga kerja dalam kurun waktu 20 tahun. Piramida tersebut tidak akan berhasil dibangun

jika tidak ada seseorang tanpa memperdulikan apa sebutan manajer ketika itu yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia, serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan pekerja dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana.

Jika melihat dari sejarah di atas, manajemen dapat dipahami sebagai suatu kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki individu untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik secara mandiri maupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien.

Manajemen dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan kegiatan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan melibatkan kontribusi dari orang lain. Selanjutnya Stoner (1995) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengawasan terhadap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Secara umum, terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen, yaitu:

- a. Manajemen sebagai suatu bentuk kemampuan atau keahlian yang menjadi cikal bakal berkembangnya manajemen suatu profesi. Sebagai suatu disiplin ilmu, manajemen menitikberatkan pada penguasaan keterampilan manajerial, yang secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: keterampilan teknis (*technical skills*), keterampilan hubungan antar manusia (*human skills*), dan keterampilan konseptual (*conceptual skills*).
- b. Manajemen sebagai proses, yakni serangkaian langkah yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Mengartikan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang berkesinambungan dan saling terkait, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

- c. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (*style*) atau pendekatan personal seseorang dalam memimpin, memengaruhi, dan memberdayakan orang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini menunjukkan bahwa selain memerlukan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajemen juga melibatkan intuisi, kreativitas, serta kepekaan interpersonal dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif.

Sebuah organisasi atau lembaga membutuhkan upaya penataan secara baik agar dapat berjalan atau melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik sesuai yang direncanakan. Upaya yang dimaksud disebut sebagai sebuah proses manajemen. Lembaga pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari proses manajemen dalam rangka memperlancar proses pembelajaran dan upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai yang telah diprogramkan.

Sementara itu, Syafaruddin (2005) mengemukakan pendapat mengenai manajemen, bahwa manajemen merupakan kemampuan untuk mengarahkan serta mencapai hasil yang diharapkan sebagai tujuan organisasi melalui pemanfaatan berbagai upaya dan sumber daya yang tersedia. Dalam pandangan lainnya, ia juga menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses kerja sama antara individu, kelompok, dan sumber daya lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kedua pandangan tersebut merujuk pada pemikiran para ahli manajemen pendidikan seperti G.R. Terry, Hersey, dan Blanchard.

Berdasarkan kedua pendapat ini dapat dipahami bahwa manajemen dipandang sebagai kemampuan untuk mengarahkan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi. Selain itu, manajemen juga mencakup proses kerja sama antara individu dan kelompok dalam mengelola serta mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, maka manajemen dapat dipahami sebagai sebuah sistem terpadu, yang di mana setiap komponen

atau unsur di dalamnya memiliki peran tertentu yang saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan tugas serta menjaga kepercayaan yang diberikan, seorang manajer dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen secara konsisten dan bertanggung jawab.

Menurut Malayu (2007), prinsip adalah suatu pernyataan fundamental yang dapat dijadikan pedoman dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip ini lahir dari hasil penelitian serta pengalaman, bersifat tetap (permanen) dan universal. Setiap disiplin ilmu memiliki prinsip-prinsip atau asas yang mencerminkan inti kebenaran dasar dalam bidang keilmuannya masing-masing.

Terdapat prinsip umum manajemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry Fayol (1949) yaitu 1) Pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting, karena adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, baik dari segi waktu, pengetahuan, keterampilan, maupun konsentrasi. 2) Wewenang dan tanggung jawab. Perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Pembagian yang proporsional antara atasan dan bawahan akan mendorong efektivitas kerja dan akuntabilitas. 3) Disiplin. Ketaatan terhadap aturan mencerminkan penghormatan terhadap otoritas dan menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban serta kelancaran operasional organisasi. 4) Kesatuan perintah. Asas ini menegaskan bahwa setiap bawahan seharusnya hanya menerima instruksi dari satu orang atasan. Akan tetapi atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. 5) Kesatuan arah. Setiap anggota dalam suatu unit kerja harus mengikuti satu rencana tindakan, satu tujuan, dan berada di bawah satu koordinasi kepemimpinan. 6) Mengutamakan kepentingan umum atau tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi. 7) *Remuneration of Personnnnel*. Hendaknya gaji, tunjangan, maupun jaminan sosial harus disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan pegawai agar tercipta

kepuasan, loyalitas, dan produktivitas yang maksimal, baik dari pihak karyawan maupun atasan. 8) Sentralisasi wewenang. Setiap organisasi memerlukan pusat pengambilan keputusan yang terkoordinasi, artinya dipusatkan tanpa mengabaikan situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan bersifat *relative* bukan mutlak. 9) Hirarkis. pentingnya struktur hierarki atau garis komando dalam organisasi. 10) Order. Semua sumber daya, baik material maupun manusia, harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Barang-barang harus terorganisir sesuai fungsi dan lokasi, sementara karyawan harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, agar tercipta efisiensi kerja. 11) Keadilan. Perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap seluruh anggota organisasi akan mendorong bawahan mematuhi perintah atasan dan bergairah dalam bekerja. 12) Inisiatif. Seorang pimpinan harus memberikan dorongan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan berani mengambil tindakan, memikirkan solusi, serta menyelesaikan tugas secara mandiri. Kebebasan ini tidak hanya meningkatkan rasa tanggung jawab, tetapi juga mendorong kreativitas dan efisiensi kerja. 13) Kestabilan jabatan. Meminimalisir melakukan mutasi agar keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya semakin besar dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman.

Pada dasarnya prinsip manajemen sangat bergantung pada ketersediaan data dan informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif. Suatu aktivitas pengambilan keputusan sangat didukung oleh informasi begitupun untuk melaksanakan kegiatan rutin dan insidental diperlukan informasi yang telah dirancang sedemikian rupa agar memudahkan manajer dan pihak terkait dalam mengakses, mengelola, serta memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien.

Proses manajemen mencakup pengaturan, pengendalian, dan pengelolaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena

itu, dibutuhkan seorang manajer atau pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara dinamis, terarah, dan berkesinambungan demi keberhasilan organisasi secara menyeluruh.

Kerja sama terbangun secara efektif apabila seorang manajer mampu berperan layaknya seorang komposer yang dapat memimpin, memadukan, dan sekaligus mengarahkan semua komponen pada pembentukan satu lagu yang berkualitas. Dalam organisasi sekolah, seorang kepala sekolah sebagai manajer dituntut mampu memimpin seluruh komponen, mengintegrasikan sumber daya yang ada, serta mengarahkan seluruh potensi menuju tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

Kegiatan manajemen pada dasarnya melibatkan proses alokasi dan pengendalian terhadap sumber daya keuangan, manusia, dan fisik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, manajemen menerapkan pendekatan sistemik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis proses kerja, menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, serta merumuskan teori manajemen yang dapat diterapkan secara luas.

a. Fungsi dan Tujuan Manajemen

Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen meliputi berbagai aktivitas yang biasa disebut dengan fungsi manajemen. Berkaitan dengan fungsi manajemen, maka itu berarti pendekatannya adalah melalui pendekatan fungsi manajemen itu sendiri.

Mahdi (1997) menyatakan bahwa fungsi manajemen sekaligus merupakan tugas utama kepemimpinan yang mencakup empat aspek penting dalam pelaksanaannya, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam menjalankan proses manajerial secara efektif.

Sementara itu, Robbins dan Coulter (2007) mengemukakan bahwa fungsi fundamental dalam manajemen terdiri atas empat elemen utama, yakni perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut dianggap sebagai inti dari aktivitas manajerial yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Sukanto Reksohadiprodjo (1992) dalam karyanya Dasar-Dasar Manajemen menyatakan bahwa manajemen mencakup sejumlah fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi inti manajemen umumnya meliputi empat aspek utama: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini menjadi kerangka dasar dalam operasionalisasi manajemen di berbagai bidang.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian tujuan tersebut. Syafaruddin (2005) menghubungkannya dengan pendidikan sehingga mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses penetapan tujuan dan sasaran dalam organisasi pendidikan, yang mencakup perumusan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Dalam tahap perencanaan, seluruh aktivitas lembaga dirumuskan dan ditetapkan secara menyeluruh, mencakup penentuan apa yang harus dilakukan, alasan pelaksanaannya, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, serta metode atau cara pelaksanaannya. Perencanaan ini menjadi landasan strategis bagi arah dan keberhasilan kegiatan lembaga secara keseluruhan.

Dikatakan bahwa perencanaan adalah langkah awal dijadikan modal dasar dalam menentukan tindakan selanjutnya demi tercapai tujuan. Perencanaan seharusnya dikelola dengan matang, karena tanpa fondasi awal yang kokoh kegiatan dari fungsi manajemen yang lain tentu akan kehilangan arah bahkan akan gagal.

Secara umum, perencanaan mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, merumuskan tujuan yang hendak dicapai secara jelas dan terukur. Kedua, memilih program atau strategi yang paling relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, mengidentifikasi serta mengalokasikan sumber daya (yang pada umumnya bersifat terbatas) secara optimal guna mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana.

Penetapan tujuan merupakan fondasi utama yang menentukan arah keseluruhan aktivitas organisasi. Tujuan tersebut menjadi acuan dalam merumuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, serta alasan, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks organisasi pendidikan, setiap program yang dirancang harus selaras dengan tujuan awal yang telah disusun secara matang, sehingga mampu mengaktualisasikan visi dan misi lembaga secara efektif.

Ketiga kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga tujuan perencanaan sebagai mestinya sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan;
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan;
3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasi maupun kuantitasnya;

4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan;
5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu;
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan;
7. Menyeraskan dan memadukan berbagai sub-kegiatan;
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemukan;
9. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang baik harus memiliki asas, pencapaian tujuan, dukungan data yang akurat, menyeluruh serta komprehensif dan *integrated* serta praktis.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah langkah kedua dalam proses manajemen, dimana perencanaan dapat dilaksanakan dalam *teamwork* yang terstruktur secara sistematis. Pada tahap ini, seluruh sumber daya yang tersedia (baik manusia, material, maupun non-material) dioptimalkan untuk membentuk susunan kerja yang mendukung pencapaian tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian mencakup pembagian tugas yang telah direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok kerja, penetapan hubungan kerja di antara mereka, serta penyediaan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang esensial dan harus menjadi fokus utama bagi setiap manajer agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara terstruktur dan efisien.

Fungsi pengorganisasian dilakukan bertujuan supaya dapat mewujudkan struktur organisasi yang jelas dan sistematis. Melalui proses ini, pembagian tugas di setiap bidang, batas-batas wewenang, serta tanggung jawab masing-masing unit kerja

dirumuskan secara rinci. Selain itu, pengorganisasian juga mencakup penetapan kebutuhan sumber daya manusia dan material yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Menurut Robbins (2007) mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian diantaranya 1) menetapkan tugas yang harus dilaksanakan, 2) menentukan individu atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut, 3) mengelompokkan tugas-tugas ke dalam struktur yang sesuai, 4) menetapkan garis koordinasi dan hubungan pelaporan antarunit, 5) menentukan tingkat otoritas dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan proses penetapan struktur organisasi yang mencakup pembagian tugas secara sistematis, serta penentuan wewenang dan tanggung jawab bagi pimpinan maupun seluruh personel yang terlibat dalam organisasi. Proses ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan efektivitas kerja dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga tujuan utama dari proses pengorganisasian adalah membagi suatu kegiatan besar menjadi serangkaian kegiatan yang lebih kecil dan terstruktur. Melalui pengorganisasian, manajer memperoleh kemudahan dalam melakukan pengawasan serta dalam menetapkan individu yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan. Proses ini mencakup penetapan jenis tugas yang harus diselesaikan, penunjukan pelaksana tugas, pengelompokan pekerjaan yang serupa, penetapan tanggung jawab, serta penentuan tingkat otoritas dalam pengambilan keputusan.

Struktur organisasi yang dimaksud adalah menetapkan mengenai pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas-tugas kerja dalam suatu institusi. Melalui struktur ini, dapat

dilihat secara jelas posisi kerja, pembagian dan jenis pekerjaan, hubungan antara atasan dan bawahan, pembentukan unit-unit atau bagian kerja, tingkat manajemen, serta jalur komunikasi. Dengan demikian, struktur organisasi berfungsi sebagai pedoman dalam pengelompokan satuan kerja dan pembagian tanggung jawab, termasuk mekanisme pelimpahan wewenang. Setiap tugas yang diberikan dalam struktur tersebut mengandung tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas sebagaimana Sabda Rasulullah saw.:

Artinya: *“Rasulullah bersabda: ”apabila telah disia-siakan amanah maka tunggulah saatnya”. Sahabat bertanya: “bagaimana menyia-nyiakannya Ya Rasulullah”. Rasulullah menjawab: “Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari).*

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan tahap berikutnya dalam proses manajemen, yang dapat dimaknai sebagai aktivitas menggerakkan, memberdayakan, dan menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Dalam konteks sumber daya manusia, *actuating* mencakup tindakan untuk memberdayakan, mengarahkan, memotivasi, serta memimpin individu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pelaksanaan menjadi wujud nyata dari rencana yang telah disusun, di mana keberhasilan realisasi rencana tersebut tercermin dalam aktivitas operasional yang mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Permasalahan dalam proses penggerakan pada dasarnya sangat berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer dalam menjalin hubungan interpersonal dengan guru, tenaga kependidikan, dan karyawan. Oleh karena itu, diperlukan

kompetensi manajerial dalam berkomunikasi secara efektif, memiliki kreativitas dan inisiatif yang tinggi, serta mampu membangkitkan semangat dan motivasi kerja seluruh anggota organisasi.

Fungsi penggerakan berperan sebagai bentuk implementasi dari hasil perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun sebelumnya. Fokus utama dari fungsi ini terletak pada upaya menciptakan sinergi kerja sama antarpersonel dalam kelompok, serta mendorong peningkatan semangat dan motivasi kerja seluruh anggota organisasi guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Kegiatan pengarahan dan bimbingan, sebagai bagian dari fungsi penggerakan (*actuating*) dalam manajemen memerlukan penciptaan dan pengembangan komunikasi secara efektif dan efisien. Fungsi penggerakan tidak hanya merupakan perwujudan dari pengarahan, tetapi juga berlangsung secara simultan dengannya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi komponen integral dalam pelaksanaan fungsi penggerakan untuk menjamin keterpaduan dan kelancaran aktivitas organisasi.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Didin (2011) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Dengan demikian, pengawasan dapat dipahami sebagai proses pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi dari arah dan tujuan perencanaan yang telah dirumuskan.

Secara prinsip, terdapat tiga tahapan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu: 1) Menetapkan alat ukur atau standar, 2) Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap proses serta hasil pelaksanaan kegiatan, 3) mengambil tindakan korektif dan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam pelaksanaan tugas, menilai efektivitas proses dan output kegiatan, serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi pengendalian, umumnya diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, yang memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana program-program organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks organisasi pendidikan sebagai lembaga publik, pengendalian dan pengawasan harus dilaksanakan secara melekat dan berkelanjutan guna memastikan akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi pelaksanaan program. Pengendalian tidak hanya berfokus pada menjaga kesehatan organisasi dari sisi struktur dan program, tetapi juga mencakup aktivitas pengawasan secara struktural dan fungsional terhadap pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah dirumuskan. Meskipun pengendalian dapat bersifat umum, pengawasan memiliki karakteristik yang lebih spesifik, karena bertujuan memastikan bahwa setiap program direncanakan, diarahkan, dijalankan, dan didukung secara optimal baik dalam hal pelaksanaan maupun pembiayaan.

Menurut Handoko (1999) terdapat tiga jenis utama dari dasar pengawasan, yaitu (1) pengawasan pendahuluan (*feed forward control*), (2) pengawasan (*concurrent control*), dan (3) pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan pendahuluan, yang juga dikenal sebagai *steering control*,

dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan atau penyimpangan terhadap standar dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memungkinkan dilakukannya tindakan korektif sebelum suatu tahapan kegiatan selesai dilaksanakan.

Pendekatan pengawasan yang proaktif bersifat lebih aktif dan antisipatif, dengan cara mendeteksi potensi permasalahan serta mengambil langkah-langkah korektif sebelum masalah tersebut benar-benar muncul. Efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu terkait dinamika lingkungan organisasi maupun perkembangan pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manajemen dalam Pespektif Islam

Manajemen dalam perspektif Islam diistilahkan dengan kata *al-tadbir* (pengaturan), kata ini terambil dari kata *dabbara* (mengatur), salah satunya terdapat dalam surah As-Sajadah/32: 5:

Artinya: *“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”*.

Berdasarkan kandungan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah Swt. berperan sebagai pengatur dan pengelola seluruh ciptaan-Nya (*al- mudabbir/manager*) dari langit hingga ke bumi. Seluruh urusan makhluk kemudian kembali kepada-Nya dalam satu hari yang kadar waktunya setara dengan seribu tahun menurut perhitungan dunia. Keteraturan alam semesta ini merupakan manifestasi dari kebesaran dan keagungan Allah dalam mengelola ciptaan-Nya. Oleh karena manusia ditetapkan sebagai khalifah di bumi, maka sudah sepatutnya ia menjalankan tugas pengelolaan bumi dengan sebaik-baiknya, meneladani keteraturan dan keharmonisan pengelolaan Ilahi terhadap semesta.

Sebagian kalangan juga mengaitkan konsep manajemen dengan istilah “*Rabb*” dalam bahasa Arab, yang secara etimologis memiliki makna memperbaiki, mengurus, menguasai, menciptakan, dan memiliki. Dengan demikian, kata “*Rabb*” mencerminkan esensi dari tindakan pengelolaan dan pengaturan secara menyeluruh terhadap sesuatu, sebagaimana dalam konteks ketuhanan, Allah sebagai Rabb adalah Zat yang menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta secara sempurna.

Menurut Rasyid Ridha (1999) “*rabb*” berkaitan erat dengan makna pengaturan dan pemeliharaan. Kata ini mengandung pengertian sebagai Zat yang memelihara, menopang, menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta. Bagi orang yang beriman, pemahaman terhadap makna *rabb* akan melahirkan kesadaran spiritual untuk beribadah kepada-Nya. Selain itu, konsep rabbani juga mengandung makna seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum agama, kebijaksanaan dalam mengatur dan membina umat, serta berupaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan sosial. Istilah “*rabb*” dalam bahasa Arab juga dimaknai sebagai pemilik, penguasa, dan pengendali, serta merujuk pada Zat yang melakukan perbaikan secara terus-menerus makna yang secara mutlak hanya layak disandarkan kepada Allah Swt. Manajemen dapat dipandang sebagai seni bekerja dengan orang lain, hal ini sudah dikatakan dalam Alquran surah Az-Zukhruf/43: 32, yang mempunyai arti pembagian tugas antara semua komponen organisasi. Ayat ini menjelaskan perbedaan yang fungsinya adalah untuk menjalankan sistem.

Ramayulis menyatakan bahwa konsep manajemen memiliki makna yang sepadan dengan istilah *al-tadbir* (pengaturan) yang terdapat dalam QS As Sajadah ayat 5 yaitu:

Artinya: "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu".

Kata سبدي ini untuk menjelaskan pemikiran atau pengaturan sehingga apa yang terjadi di belakang yakni kesudahan dampak dan akibatnya telah diperhitungkan dengan matang sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt adalah yang mengatur alam ini. Dan selaku *khalifah* yang diutus Allah swt, manusia diberi amanah untuk meneladani sifat tersebut, yakni menjalankan tugas pengelolaan dan pemakmuran bumi secara bertanggung jawab, beretika, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Manajemen yang dikaitkan dengan dunia pendidikan muncul sebagai respons atas pentingnya pengelolaan sistem pendidikan secara optimal. Manajemen pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu proses atau rangkaian aktivitas yang berorientasi pada pengelolaan kerja sama antarindividu dalam suatu organisasi pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi guna mencapai hasil yang maksimal.

Ini dapat dilihat dari alquran surat *Al Mujadilah* ayat 11 berikut

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَلَفَسَحُوْا ۗ اَللّٰهُ لَكُمْ وَّاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا ۗ اَللّٰهُ يَرْفَعُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Shihab (2002) menjelaskan bahwa siapa yang memiliki pengetahuan, dalam bentuk apa pun, tidak dapat disamakan dengan mereka yang tidak memiliki pengetahuan. Namun, ilmu yang dimaksud bukan sekadar akumulasi informasi, melainkan ilmu yang bermanfaat yakni pengetahuan yang mampu mengantarkan seseorang pada pemahaman hakikat sesuatu, serta mendorongnya untuk menyesuaikan sikap dan amal perbuatannya sejalan dengan pengetahuan tersebut.

Manajemen pendidikan adalah proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber daya secara efisien dan efektif. Manajemen sekolah mengandung arti pengoptimalisasian sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Optimalisasi sumber daya berkenaan dengan pemberdayaan sekolah adalah alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan atau sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan yang tinggi pula.

Ramayulis menyatakan bahwa pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan.

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan.

Seiring dengan pernyataan di atas, pendidikan adalah usaha yang berlandaskan Islam untuk membantu manusia dalam mengembangkan dan mendewasakan kepribadiannya, baik

jasmaniah maupun rohaniah untuk memikul tanggung jawab memenuhi tuntunan zamannya dan masa depannya”.

Dengan demikian, pendidikan dalam pandangan Islam dipahami sebagai serangkaian usaha terarah yang bertujuan mempersiapkan manusia agar memiliki kesadaran spiritual, kapasitas intelektual, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah kekhalifahan di muka bumi secara optimal dan berkelanjutan.

Hakikat pendidikan dalam pandangan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi baik (*fitrah*) yang dimiliki setiap individu, agar mampu berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera. Untuk mendukung proses pengembangan potensi tersebut secara optimal, dibutuhkan manajemen pendidikan yang berkualitas, yang mampu mengatur dan mengelola seluruh sumber daya dan proses pembelajaran secara efektif dan efisien.

Pendidikan yang diselenggarakan secara benar dan efektif akan melahirkan generasi yang kreatif, produktif, dan mampu berkontribusi nyata dalam menciptakan kemaslahatan yang memberikan manfaat bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Pendidikan semacam ini juga menjadi fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat dan bangsa yang beradab, serta mencapai kesejahteraan secara lahiriah maupun batiniah. Islam sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pembinaan generasi. Peringatan ini Allah berikan agar senantiasa waspada jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Firman Allah dalam Alquran surat An Nisa ayat 9:

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Peringatan Allah Swt. mengenai kemungkinan munculnya generasi yang lemah tercermin melalui perintah untuk mengucapkan perkataan yang benar. Jika dikaitkan dengan ayat-ayat lain, ucapan yang dimaksud dapat dipahami sebagai doa yang diajarkan Allah Swt., yang memuat visi pendidikan dan pembinaan terhadap generasi penerus. Untuk mewujudkan generasi yang tangguh, sebagaimana yang diisyaratkan dalam peringatan tersebut, diperlukan keberadaan lembaga pendidikan yang berkualitas yakni lembaga yang dikelola secara baik, efektif, dan efisien, sehingga mampu mencetak insan berkarakter dan berdaya saing. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dibutuhkan lembaga yang memiliki manajemen mutu yang baik, efektif dan efisien pula. Oleh karena itu, seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan organisasi atau institusi pendidikan memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan peran dan bidang masing-masing.

Dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, dibutuhkan pengawasan (supervisi), baik yang dilakukan oleh intern organisasi atau lembaga pendidikan, khususnya oleh pimpinan atau kepala sekolah maupun oleh instansi yang memiliki wewenang melakukan kegiatan pengawasan atau supervisi. Kegiatan supervisi ini mencakup evaluasi terhadap aspek administratif lembaga secara keseluruhan, serta pemeriksaan kelengkapan dan kualitas administrasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawab para pendidik.

Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa mutu proses pembelajaran di lingkungan organisasi atau lembaga pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian,

output yang dihasilkan (peserta didik) benar-benar merupakan individu berkualitas, yang memiliki kompetensi dan daya saing dalam menghadapi tantangan era modern serta mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Perbaikan diri menjadi lebih bermutu tentunya melalui proses perubahan. Upaya perubahan untuk menjadi yang lebih baik terdapat dalam QS Al Anfal ayat 53 dan QS Ar Ra'du ayat 11 yang menginspirasi manajemen perubahan

Artinya: (Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan- Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Bahwa kedua ayat tersebut membicarakan mengenai perubahan pada QS Al Anfal berbicara mengenai perubahan nikmat sedangkan Ar Ra'du menggunakan kata *ي* sehingga mencakup perubahan apapun. Bila dilihat kedua ayat tersebut berbicara mengenai perubahan kaum ini berarti perubahan terjadi bukan hanya pada diri individu akan tetapi perubahan dalam suatu organisasi yang tertata dalam sistem manajemen.

Dalam perpestik Islam, manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik tolak dari sebuah niat yang baik. Niat tersebut menjadi landasan moral yang melahirkan motivasi untuk menjalankan aktivitas secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Pengembangan manajemen dalam Islam berlandaskan pada empat prinsip fundamental, yakni kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer yang mengemban tanggung jawab kepemimpinan dituntut untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan keempat nilai tersebut guna mencapai efektivitas dan keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.

Dalam pelaksanaan proses manajemen, diperlukan sosok yang mampu menggerakkan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kerja sama dalam suatu organisasi. Individu yang menjalankan fungsi tersebut, sekaligus bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi, disebut sebagai manajer. Istilah manajemen sendiri mengandung makna pengendalian dan pengelolaan, sehingga keberadaan manajer menjadi sentral dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Dalam konteks lembaga pendidikan, dibutuhkan manajemen pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan, serta mampu merumuskan strategi yang efektif untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

Pemikiran ini menegaskan bahwa manajemen pendidikan terdiri dari dua unsur, yakni kegiatan kajian teoritis yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan penerapan hasil kajian tersebut dalam praktik untuk mendukung kelancaran operasional lembaga atau organisasi pendidikan, seperti sekolah.

c. Manajemen Peningkatan Mutu Pembelajaran

Peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan melalui lembaga pendidikan tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kualitas pembelajaran merupakan

komponen kunci yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dalam meningkatkan kualitas sekolah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan mutu pembelajaran, seperti yang disarankan oleh Sudarwan Danim yaitu dengan melibatkan enam faktor yang dominan:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah yang efektif.
2. Siswa, “anak sebagai pusat pembelajaran” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali
3. Pelibatan guru secara maksimal.
4. Kurikulum yang tetap tetapi dinamis, sehingga tujuan mutu dapat dicapai.
5. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan/instansi.
6. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (*teamwork*) yang saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target (*goals*) akan tercapai dengan baik

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat diwujudkan melalui penguatan aktivitas dan kreativitas peserta didik, peningkatan kedisiplinan dalam belajar, serta pengembangan motivasi intrinsik untuk terus belajar secara berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, maka yang harus diperhatikan adalah beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pembelajaran, Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Siswa dan Guru
- b) Kurikulum
- c) Sarana dan prasarana pendidikan

- d) Pengelolaan sekolah, meliputi pengelolaan kelas, guru, siswa, sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib dan kepemimpinan
- e) Pengelolaan proses pembelajaran, meliputi penampilan guru, penguasaan materi, serta penggunaan strategi pembelajaran
- f) Pengelolaan dana
- g) Evaluasi
- h) Kemitraan, meliputi hubungan sekolah dengan lembaga lain.

Pengelolaan setiap aspek dalam upaya peningkatan mutu sekolah merupakan bagian dari suatu sistem terpadu yang saling berkaitan dan saling mendukung. Oleh karena itu, kemampuan kepala sekolah dalam mengelola seluruh komponen pendidikan secara efektif menjadi suatu keharusan, guna memastikan tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan melalui penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Pemerintah telah menetapkan sistem tata kelola pendidikan yang baik, seimbang, dan berkelanjutan melalui Permendiknas no 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah. Tata kelola pendidikan pendidikan tersebut meliputi: (1) Perencanaan Program; (2) Pelaksanaan Rencana Kerja; (3) Pengawasan dan Evaluasi; (4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah; (5) Sistem Informasi Manajemen; (6) Penilaian Khusus.

Perencanaan program pada suatu lembaga pendidikan merefleksikan integrasi dari visi, misi, tujuan, serta rencana kerja lembaga, yang disusun dalam kerangka jangka panjang, menengah, dan pendek. Tahapan pelaksanaan rencana kerja merupakan bentuk konkret dari implementasi program yang telah dirancang sebelumnya. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tersebut, perlu disusun pedoman dasar yang mencakup struktur organisasi, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pengorganisasian bidang-bidang pendidikan, seperti bidang kesiswaan, kurikulum, pendidik

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran.

Pengawasan dan evaluasi dianggap sebagai aspek yang penting dalam mengelola pendidikan. Sekolah hendaknya sudah menyusun suatu program pengawasan secara objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Supervisi manajerial, akademik, dan klinis seharusnya dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan kegiatan yang mendukung optimalisasi proses pembelajaran, yang merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, pelaksanaan supervisi juga perlu disinergikan dengan kegiatan evaluasi guna menilai efektivitas dan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

Kepemimpinan kepala sekolah yang selaras dengan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan akan lebih optimal apabila didukung oleh struktur kepemimpinan yang memadai, yakni dengan adanya satu orang wakil kepala sekolah serta sejumlah staf pembantu kepala sekolah, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas tugas di lingkungan sekolah.

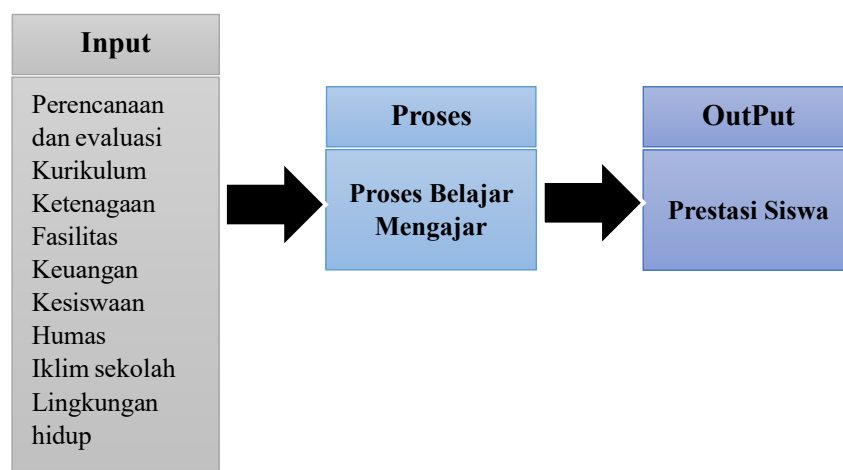
Untuk mendukung terciptanya manajemen pendidikan yang efektif, sistem informasi manajemen perlu dikelola secara optimal dengan dukungan sarana informasi yang mudah diakses. Hal ini bertujuan untuk memperlancar pelayanan dalam hal permintaan dan penyampaian informasi, serta memenuhi kebutuhan pelaporan kepada dinas pendidikan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Manajemen pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab guru semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh praktik manajerial di tingkat lembaga, yang berkontribusi secara signifikan terhadap keberlangsungan dan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Secara keseluruhan, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi melibatkan berbagai aspek pendukung dalam sistem manajemen sekolah. Seluruh aktivitas manajerial di

lingkungan lembaga pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran, manajemen sekolah perlu secara aktif merancang dan melaksanakan manajemen pembelajaran secara terencana dan berkesinambungan.

Manajemen pembelajaran bukan hanya aktifitas yang terjadi di dalam kelas antara pendidik dan peserta didik, akan tetapi manajemen pembelajaran juga terkait dengan komponen pendidikan lainnya, seperti kurikulum, sarana dan prasaranan, pembiayaan, kurikulum, hubungan masyarakat, lingkungan dan sebagainya.

Secara visual urusan-urusan yang menjadi wewenang sekolah dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1 Wewenang dan Tanggung Jawab Sekolah

Perubahan paradigma pendidikan dari yang semula berorientasi sentralistik menuju pendekatan berbasis sekolah telah mengalihkan sebagian besar urusan dan tanggung jawab pendidikan kepada pihak sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dipandang sebagai salah satu strategi alternatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan melaksanakan fungsi-fungsi manajerial di setiap bidang

atau unit kerja, di mana keseluruhan aktivitas tersebut secara esensial berorientasi pada optimalisasi proses pembelajaran.

Manajemen kurikulum merupakan keseluruhan upaya kolektif yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, dengan penekanan pada peningkatan kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar. Kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan belajar mengajar. Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional.

Dalam peraturan Pemerintah no 32 thn 2013 pasal 77J bahwa struktur kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan :

- a) Pendidikan agama
- b) Pendidikan kewarganegaraan
- c) Bahasa
- d) Matematika
- e) Ilmu pengetahuan alam
- f) Ilmu pengetahuan sosial
- g) pendidikan jasmani dan olah raga i. ketrampilan/kejuruan, dan
- h) muatan lokal

Dalam pengelolaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, penyesuaian antara kurikulum dengan implementasi kegiatan pembelajaran menjadi aspek yang sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan manajemen kurikulum yang sistematis dan tepat, yang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Hal ini penting mengingat kurikulum merupakan salah satu unsur input pendidikan yang paling dominan mendapat perhatian dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Implementasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan dapat dikembangkan, diperkaya, atau diperdalam sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing sekolah. Manajemen kurikulum merupakan suatu proses penyesuaian antara kurikulum nasional dengan konteks sekolah, yang didasarkan pada visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh institusi pendidikan tersebut.

Sayangnya dalam praktik pembelajaran pengembangan kurikulum masih berorientasi pada kemajuan akademik, padahal jelas bahwa dalam tujuan pendidikan nasional meliputi ranah pengetahuan, sikap dan ketrampilan secara menyeluruh. Kondisi yang mengabaikan ketiga ranah tersebut pada gilirannya akan menjadi penghambat kepribadian manusia seutuhnya.

Manajemen sarana dan prasarana adalah bagian yang penting sebagai penunjang keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Sarana pendidikan mencakup seluruh fasilitas yang secara langsung digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, guna memastikan proses pembelajaran berlangsung secara tertib, efektif, dan efisien. Sementara itu, prasarana pendidikan merujuk pada fasilitas yang secara tidak langsung mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana harus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh fasilitas yang tersedia, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.

Manajemen pembiayaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara sistematis guna mendukung tercapainya tujuan organisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Pembiayaan pendidikan mencakup alokasi dana yang diperoleh dan dibelanjakan untuk mendukung berbagai aspek operasional pendidikan, seperti pembayaran gaji pendidik, peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana dan prasarana belajar, renovasi fasilitas, penyediaan perlengkapan, pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler, serta pengadaan bahan ajar. Dengan demikian, manajemen pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Hubungan masyarakat termasuk dalam fungsi khusus manajemen (*specialized management function*) artinya hubungan masyarakat berperan dalam membangun dan memelihara komunikasi dua arah, baik internal maupun eksternal, guna menciptakan pemahaman dan kerja sama antara organisasi dan publiknya. Fungsi ini mencakup identifikasi serta respons terhadap opini publik yang selaras atau bertentangan dengan kebijakan organisasi. Selain itu, humas berkontribusi dalam mendukung fungsi manajerial dengan mengantisipasi, memantau, dan merespons berbagai peluang serta tantangan, termasuk menangani isu atau citra negatif yang berpotensi menurunkan reputasi lembaga. Dalam konteks ini, humas bertugas menjaga citra positif organisasi agar tetap kompetitif dan kredibel. Strategi yang digunakan biasanya bersifat edukatif, normatif, dan persuasif, yaitu dengan pendekatan ajakan atau imbauan yang tidak memaksakan, guna menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan masyarakat.

Hubungan masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran, mengingat bahwa standar mutu berasal dari harapan masyarakat yang sekaligus berperan sebagai pengguna langsung hasil proses pembelajaran. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan dalam lingkungan lembaga pendidikan.

Aktivitas pembelajaran di lingkungan lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran sentral kepala sekolah, guru, konselor atau guru bimbingan dan konseling, pengawas sekolah, serta peserta didik. Proses pendidikan tidak semata merupakan

interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik, melainkan membutuhkan dukungan tenaga kependidikan sebagai elemen penunjang dalam pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan. Kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu diperhatikan secara menyeluruh tiga komponen utama, yakni input, proses, dan output pendidikan. Input yang berkualitas mencakup pendidik yang kompeten, peserta didik yang memiliki potensi unggul, kurikulum yang relevan dan bermutu, fasilitas penunjang yang memadai, serta aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Dengan berpedoman dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sekolah atau kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan input pembelajaran yang nantinya akan mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dalam lingkungan belajar. Sementara proses pembelajaran bermutu adalah meliputi jalannya belajar mengajar, penerapan teknologi, interaksi antara pendidik dengan peserta didik, interaksi mereka dengan staf lain seperti konselor, staf administrasi, tenaga medis, pustakawan, laboran dan sebagainya. Sementara output pembelajaran adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan standar mutu pendidikan, maka proses pembelajaran idealnya memenuhi tiga komponen utama, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kualitas suatu pembelajaran dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ketiga aspek tersebut diterapkan dan diintegrasikan secara konsisten dalam praktik pembelajaran.

Dalam Permendikbud No 21 tahun 2016 tentang standar isi, terdapat beberapa indikator minimal yang harus dipenuhi, antara lain:

pertama, perangkat pembelajaran harus disusun mengacu pada kompetensi lulusan; kedua, pengembangan kurikulum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan ketiga, pelaksanaan kurikulum di sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional.

Isi pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah sebagai lembaga pendidikan, sepanjang tetap mengacu pada standar minimal yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan memenuhi sejumlah indikator tertentu, sekolah juga memiliki ruang untuk melakukan pengembangan kurikulum secara kontekstual dan inovatif.

Selanjutnya standar proses yang tercantum dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 memiliki sejumlah indikator penting, antara lain: (1) sekolah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, interaktif, dan berpusat pada peserta didik; serta (3) pengawasan dan penilaian autentik dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran.

Sementara itu, Standar Penilaian Pendidikan yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 memuat beberapa indikator, yaitu: (1) aspek penilaian mencakup keseluruhan ranah kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan); (2) teknik penilaian dilakukan secara objektif dan akuntabel; (3) hasil penilaian dijadikan dasar dalam tindak lanjut pembelajaran; (4) instrumen penilaian disusun sesuai dengan aspek kompetensi yang diukur; serta (5) pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ketiga standar nasional pendidikan tersebut terjadi langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Standar minimal yang tercantum dalam setiap indikator menjadi pedoman bagi

penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu, terukur, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh.

d. Fungsi Manajemen Peningkatan Mutu Pembelajaran

Proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, serta pengawasan terhadap jalannya pembelajaran guna menjamin efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Tahapan tersebut harus dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan, sebagai bagian integral dari manajemen pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan.

Manajemen pembelajaran diawali dengan tahap perencanaan pembelajaran. Menurut Dick dan Raiser (1989), perencanaan pembelajaran atau *An Instructional plan consist a number of component that, when integrated, provided you with an outline for delivering effective instruction to learners.*

Guru sebagai pengelola pembelajaran dituntut memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan berbagai sumber, baik berupa sumber daya manusia, pendanaan, maupun sumber belajar, guna menjamin tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Perencanaan, sebagai titik awal dalam proses manajerial pembelajaran, memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan tahapan selanjutnya. Dalam implementasinya, guru perlu memahami dan menguasai silabus secara menyeluruh sebagai landasan untuk menyusun program pembelajaran, yang mencakup program tahunan dan semester. Kedua program tersebut harus disusun secara selaras dengan kalender pendidikan sebagai dasar dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Jadi dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

a) Menguasai Silabus

Silabus berfungsi sebagai kerangka acuan utama dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Secara minimal, silabus memuat komponen-komponen penting yang meliputi: identitas mata pelajaran, identitas satuan pendidikan, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, nilai-nilai karakter, strategi pembelajaran, teknik penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar yang relevan.

b) Menyusun program tahunan dan semesteran

Dalam proses penyusunan program semester, terdapat beberapa langkah sistematis yang dapat ditempuh, yaitu: (1) menghitung jumlah hari dan jam efektif dalam satu semester, (2) menginventarisasi mata pelajaran yang akan disampaikan selama periode tersebut, (3) melakukan distribusi alokasi waktu secara proporsional sesuai dengan jam efektif yang tersedia, dan (4) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan hasil analisis tersebut.

Sementara itu, pengorganisasian dapat dimaknai sebagai serangkaian proses pengelompokan individu, sarana, tugas, tanggung jawab, serta wewenang secara terpadu guna membentuk struktur organisasi yang mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Kegiatan pengorganisasian dalam pembelajaran merujuk pada upaya sistematis dalam mengelola berbagai sumber daya pembelajaran, seperti peserta didik, pendidik, media, serta sarana lainnya, guna mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penetapan tata tertib atau aturan main (*rules of the game*) yang harus dipatuhi selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

Adapun pelaksanaan (*actuating*) diartikan sebagai aksi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran menjadi tahap krusial karena pada tahap inilah

proses belajar mengajar berlangsung, yang pada akhirnya sangat menentukan kualitas dan capaian hasil belajar peserta didik.

Dari segi hasil proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar. Proses pembelajaran merupakan implementasi kegiatan belajar-mengajar yang harus dikelola secara optimal agar dapat menghasilkan pencapaian hasil belajar yang berkualitas tinggi. Manajemen yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi kunci dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam Indikator mutu pembelajaran, proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan tepat ada 15 indikator, yaitu:

- a) Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai dengan ketentuan, untuk tingkat SMP adalah 32 siswa per rombel.
- b) Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran; sejak awal semester dijelaskan silabus, penyesuaian waktu, menyiapkan siswa secara fisik dan psikis, memberi motivasi belajar, mengajukan pertanyaan dan mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan cakupan materi.
- c) Pembelajaran Berorientasi Inkuiri: Proses pembelajaran mendorong peserta didik untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri.
- d) Pendekatan Ilmiah (*Scientific Approach*): Pendidik memfasilitasi siswa dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis, penyimpulan, serta penyampaian hasil temuan secara logis dan komunikatif.

- e) Berbasis Kompetensi: Proses pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- f) Integrasi Antarmateri (Terpadu): Materi pembelajaran disajikan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata.
- g) Kebenaran Multi Dimensi: Pembelajaran mengakui keberagaman jawaban siswa yang benar, dengan guru berperan sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek aktif.
- h) Berorientasi pada Keterampilan Aplikatif: Pembelajaran diarahkan pada penguasaan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
- i) Pemberdayaan Peserta Didik sebagai Pembelajar Sepanjang Hayat: Pembelajaran membentuk siswa yang mandiri, reflektif, dan terbiasa belajar sepanjang hayat.
- j) Konsep Pembelajaran Universal: Menanamkan prinsip bahwa setiap orang dapat menjadi guru dan siswa, serta setiap tempat adalah ruang belajar.
- k) Pengakuan terhadap Perbedaan Individual: Guru menyesuaikan strategi dengan kemampuan belajar, latar belakang budaya, dan kecepatan belajar masing-masing siswa.
- l) Metode yang Sesuai dengan Karakteristik Siswa: Penerapan metode pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan gaya belajar dan kebutuhan individu peserta didik.
- m) Pemanfaatan Media Pembelajaran: Optimalisasi berbagai media untuk mendukung pemahaman konsep dan keterampilan.
- n) Pembelajaran Berbasis Multi-Sumber: Menggunakan aneka sumber belajar baik konvensional maupun digital.

- o) Manajemen Penutupan Pembelajaran: Guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran, memberikan umpan balik, menyusun tindak lanjut, menginformasikan kegiatan selanjutnya, dan menutup pelajaran sesuai waktu yang ditentukan.

Pengawasan mencakup penetapan standar, supervisi pelaksanaan, serta pengukuran kinerja terhadap standar yang telah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks manajemen pembelajaran, seluruh fungsi manajerial yang dilaksanakan baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi akan dapat diukur keberhasilannya melalui efektivitas fungsi pengawasan.

Indikator dari sebuah keberhasilan pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan di sekolah diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan kualitas komponen pendidikan itu sendiri. Komponen-komponen tersebut mencakup mutu lulusan (output), kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, kinerja tenaga kependidikan (seperti staf administrasi, laboran, teknisi, dan pustakawan), efektivitas proses pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas manajemen sekolah, penerapan kurikulum, sistem penilaian, serta unsur-unsur pendukung lainnya. Seluruh komponen tersebut perlu dipantau secara sistematis melalui proses pengawasan untuk mengidentifikasi dampak positifnya terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan pengawas sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peningkatan mutu pendidikan. Kolaborasi antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya harus terjalin secara berkelanjutan dalam rangka pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan di

sekolah secara optimal, selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pendidikan, fungsi pengawasan memegang peran sentral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu institusi pendidikan. Pengawasan pendidikan merupakan bentuk layanan profesional yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada para pemangku kepentingan pendidikan, khususnya guru secara individu maupun kelompok, dalam rangka memperbaiki mutu proses pembelajaran serta hasil yang dicapai.

Bantuan yang diberikan kepada guru idealnya didasarkan pada hasil pengamatan sistematis dan penilaian yang objektif serta mendalam, merujuk pada perencanaan program pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar relevan dan tepat sasaran dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, setiap bentuk bantuan yang diberikan harus berorientasi pada perbaikan serta pengembangan situasi pembelajaran menuju arah yang lebih efektif dan bermakna.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan dalam bidang pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada aspek kognitif dan psikomotorik peserta didik, tetapi juga mencakup pengembangan aspek afektif yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter. Yang secara jelas tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah:

1. Peningkatan pengawasan yang berkualitas. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ketika guru mengajar dikelas, percakapan langsung maupun kepada teman sejawatnya atau dengan sebagian murid-muridnya.

2. Pengembangan profesional. Dimana dalam hal ini pengawas dapat membantu guru dalam memahami pengajaran, kehidupan kelas dan mengembangkan keterampilan mengajarnya.
3. Meningkatkan motivasi guru untuk mengembangkan kemampuan sendiri dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan (supervisi) harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental. Prinsip-prinsip tersebut antara lain supervisi pengajaran hendaknya menciptakan relasi kemanusiaan yang harmonis, dilakukan secara kontinu, bersifat demokratis, terintegrasi dengan keseluruhan program pendidikan, mencakup seluruh dimensi pengembangan pembelajaran (komprehensif), bersifat membangun (konstruktif), serta dilaksanakan secara objektif.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa upaya maksimalisasi hasil dalam manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran strategis proses pengawasan. Dengan kata lain, manajemen pendidikan dan fungsi kepengawasan yang dijalankan oleh pengawas pendidikan merupakan dua unsur yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam implementasi pembelajaran, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Kementerian Agama, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah melalui fungsi pengawasan manajerial serta oleh guru senior dalam bentuk supervisi internal. Melalui mekanisme pengawasan ini, diharapkan berbagai potensi penyimpangan dapat dicegah sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan hasil kesepakatan bersama. Selain itu, pengelolaan sumber

daya material yang optimal juga turut mendukung tercapainya tujuan organisasi. Inti dari pengawasan terletak pada proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan aktivitas guna memastikan kesesuaian dengan perencanaan serta mendeteksi adanya penyimpangan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilakukan secara langsung (langsung mengamati dan mengevaluasi) maupun tidak langsung (melalui laporan atau indikator lainnya).

Proses pengawasan berperan penting dalam menjamin terpenuhinya standar pencapaian tujuan. Secara umum, pengawasan dipahami sebagai suatu upaya sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator serta rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah, pengawasan mencakup kegiatan supervisi terhadap program pengajaran dan pembelajaran yang wajib dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas proses pendidikan. Beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan jika merujuk beberapa literasi adalah:

1. Pendekatan Pengawasan yang Bersifat Membina

Pengawasan seyogianya tidak berorientasi pada pencarian kesalahan, melainkan lebih pada pemberian pembinaan dan solusi terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Pemberian Bimbingan Secara Tidak Langsung

Bantuan yang diberikan oleh pihak pengawas dilakukan melalui pendekatan tidak langsung dengan memberikan dorongan kepada individu untuk melakukan perbaikan diri secara mandiri. Pendekatan ini bertujuan untuk

menumbuhkan kepercayaan diri serta membangun budaya kerja yang produktif di lingkungan sekolah.

3. Pemberian Umpan Balik yang Tepat Waktu dan Konstruktif

Setiap masukan atau umpan balik harus segera disampaikan agar pihak yang bersangkutan dapat memahami relevansi antara saran yang diberikan dengan situasi aktual yang dihadapi. Pemberian saran idealnya dilakukan melalui diskusi, sehingga memunculkan dialog yang membahas solusi atas permasalahan yang ada.

4. Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala (Periodik)

Pengawasan hendaknya dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan. Kehadiran kepala sekolah dalam supervisi tidak hanya berperan sebagai pemantau, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada guru atau tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan tugasnya.

5. Pengawasan dalam Nuansa Kemitraan

Pengawasan sebaiknya dilakukan dalam suasana kemitraan yang harmonis, sehingga memungkinkan guru dan tenaga kependidikan menyampaikan hambatan yang mereka hadapi secara terbuka. Suasana kerja yang bersifat kolegal ini akan memudahkan pencarian solusi serta mempererat hubungan kerja yang sinergis dan kompak.

Keberhasilan seorang pengawas pendidikan tercermin dari capaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang ditunjukkan melalui indikator seperti komitmen kerja, antusiasme, integritas, keadilan dalam bertindak, inisiatif dalam pembinaan, serta kemampuan dalam melakukan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks jabatan fungsional, baik pengawas sekolah pratama, muda, madya, maupun utama, memiliki tanggung jawab strategis dalam

membina dan mengarahkan guru untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing.

Syafaruddin (2005) menjelaskan bahwa supervisi dalam konteks pendidikan memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran agar mencapai hasil yang optimal. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara sistematis pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Peningkatan profesionalisme ini kemudian tercermin dalam praktik pengajaran yang lebih efektif dan efisien, yang secara langsung menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan optimal peserta didik.

Tugas utama pengawas sekolah selanjutnya adalah membina pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Penilaian dilakukan untuk menentukan tingkat mutu pendidikan berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan. Sementara itu, kegiatan pembinaan diwujudkan dalam bentuk pemberian arahan, saran, serta bimbingan secara profesional.

Seseorang diberi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan disebut sebagai *supervisor*. Peran supervisor sangat krusial dalam peningkatan mutu pendidikan karena berfungsi sebagai koordinator, konsultan, pemimpin, sekaligus evaluator. Untuk itu, seorang supervisor harus mampu menempatkan dirinya secara optimal agar kualitas lembaga pendidikan dapat terus ditingkatkan. Secara umum, sasaran utama supervisi pendidikan mencakup aspek personal dan non-personal. Supervisi terhadap aspek personal merupakan bentuk pengawasan terhadap individu yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di sekolah, seperti

kepala sekolah, guru, guru bimbingan dan konseling, staf administrasi, peserta didik, pustakawan, serta tenaga kependidikan lainnya.

Sementara itu, supervisi terhadap aspek non-personil merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh supervisor terhadap kesiapan dan kelengkapan berbagai sarana serta prasarana sekolah yang berperan penting dalam mendukung proses pendidikan. Unsur-unsur non-personil tersebut mencakup fasilitas seperti perpustakaan, administrasi sekolah, ketersediaan buku ajar (buku paket), program perencanaan pendidikan, pelaksanaan sistem pendidikan, serta sarana pendidikan lainnya yang menunjang keberlangsungan proses pembelajaran secara menyeluruh.

Dalam konteks pendidikan, mutu dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan (*quality in fact*) dan dari tingkat kepuasan peserta didik serta masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan (*quality in perception*). Salah satu fungsi penting dalam manajemen, termasuk manajemen pendidikan, adalah pengawasan. Baik mutu yang bersifat faktual maupun yang bersandar pada persepsi dan harapan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan serta kesinambungan kinerja suatu organisasi. Hal ini pun relevan dalam konteks lembaga pendidikan seperti sekolah.

Pengawasan dalam rangka peningkatan mutu di sekolah, apabila ditinjau dari pendekatan yang berlaku saat ini, lebih berorientasi pada kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Instrumen yang umum digunakan adalah seperangkat aturan dan standar yang diterapkan melalui kegiatan pemantauan atau yang lebih dikenal sebagai monitoring and evaluation (*Monev*).

Monitoring berfungsi untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program pendidikan secara berkala. Melalui proses ini, dapat diidentifikasi program-program peningkatan mutu yang belum terealisasi secara optimal. Fokus utama pengawasan adalah pengendalian terhadap pelaksanaan program yang sedang berlangsung, dengan pendekatan yang lebih bersifat klinis. Hasil dari pengawasan ini menyediakan umpan balik penting bagi pihak sekolah dan stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan. Jika ditemukan adanya deviasi dari standar yang telah ditentukan, maka langkah perbaikan perlu segera diambil.

Lebih lanjut Syafaruddin (2005) menjelaskan bahwa pengawasan memiliki peran strategis dalam proses manajerial, yaitu untuk memantau pelaksanaan kegiatan, menjamin ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Pengawasan mencakup evaluasi kinerja dengan mengacu pada tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya menjadi bagian integral dari fungsi manajemen, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan efektivitas pencapaian hasil belajar maupun tujuan organisasi secara keseluruhan.

Dengan kata lain, pengawasan merupakan tahap krusial yang menentukan keberlangsungan dan kualitas kinerja organisasi, apakah telah berjalan sesuai dengan fungsi utamanya dalam menyediakan layanan atau menghasilkan produk bagi masyarakat. Fungsi ini menjadi alat bantu penting bagi manajer atau administrator dalam mencapai sasaran organisasi secara efisien dan bertanggung jawab. Pengawasan yang efektif haruslah memenuhi tiga kondisi dasar, yaitu:

1. Adanya standar yang jelas dan terukur sebagai acuan terhadap hasil ideal yang diharapkan.
2. Harus tersedia informasi yang akurat mengenai pelaksanaan aktual, sehingga memungkinkan identifikasi terhadap penyimpangan dari standar tersebut.
3. Pengawasan harus diikuti dengan langkah korektif berupa tindakan perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan, guna mengarahkan kembali proses menuju tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan fungsi dan peran pengawasan di sekolah pada dasarnya dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses *Quality Assurance* (penjaminan mutu), yang selaras dengan upaya *Quality Improvement* (peningkatan mutu). Penjaminan mutu di sekolah, yang umumnya bersifat *top-down*, dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pemegang otoritas kebijakan, sementara peningkatan mutu merupakan bagian dari pemberdayaan anggota organisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan tersebut mencakup pengembangan kompetensi individu maupun kapasitas organisasi secara menyeluruh, dengan pendekatan *bottom-up* berbasis inisiatif internal.

Dalam konteks ini, pengawasan pendidikan di sekolah semestinya diarahkan untuk memastikan terpenuhinya standar mutu melalui tahapan *Quality Assurance*, yaitu proses pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, peningkatan mutu menjadi suatu gerakan kolektif dengan pengawas sebagai motor penggerak utama melalui pelaksanaan supervisi akademik. Dalam implementasinya, kepala sekolah berperan lebih dominan dalam pelaksanaan supervisi tersebut, terutama apabila sistem

pengawasan ini dijalankan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS).

Pengawasan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus mengacu pada sistem dan mekanisme yang telah terstandarisasi, yang dalam praktiknya dikenal sebagai supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan yang berbasis pada prinsip-prinsip ilmiah, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi supervisi ini, seorang supervisor dituntut memiliki kemampuan analitis yang tajam serta kepekaan yang tinggi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pendidikan, yang tidak selalu tampak secara kasat mata. Oleh karena itu, supervisi akademik tidak hanya berorientasi pada aspek fisik atau material, tetapi lebih pada penciptaan kondisi belajar yang kondusif dan peningkatan kualitas akademik secara menyeluruh.

Supervisi akademik tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari kesalahan dalam kinerja warga sekolah, melainkan sebagai bentuk pendampingan profesional yang bertujuan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengatasi berbagai kendala dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, supervisi akademik merupakan pengawasan profesional yang berlandaskan pada kaidah-kaidah ilmiah, serta menuntut pemahaman yang mendalam terhadap aspek pedagogis, lebih dari sekadar evaluasi administratif biasa.

Supervisi akademik juga merupakan bentuk layanan profesional yang dikembangkan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme seluruh komponen sekolah, khususnya para guru sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya supervisi yang berorientasi pada pengembangan kualitas pembelajaran, guru diharapkan dapat

membangun sikap profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga terwujud proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermutu.

Secara implisit, supervisi memberikan kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui pembinaan yang sistematis terhadap praktik pengajaran. Supervisi terhadap guru idealnya mampu menggali dan mendorong potensi terbaik dalam diri pendidik, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Dalam konteks yang lebih luas, supervisi dipahami sebagai bentuk layanan pembinaan profesional bagi guru guna meningkatkan kemampuan pedagogis dan profesionalnya, termasuk dalam mengenalkan berbagai strategi dan inovasi pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Pada tataran praktis, terdapat dua jenis supervisi yang dapat diterapkan di sekolah, yaitu supervisi akademik dan supervisi administrasi. Supervisi akademik fokus pada aspek-aspek langsung dari proses pembelajaran, seperti strategi mengajar, pendekatan pedagogis, dan interaksi guru-siswa di kelas. Sementara itu, supervisi administrasi menitikberatkan pada kelengkapan dan keteraturan dokumen serta perangkat pendukung pembelajaran, seperti administrasi guru, jadwal pelajaran, dan sarana pendukung lainnya. Kedua bentuk supervisi ini dapat diterapkan secara sinergis untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara optimal, sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang diharapkan.

Kegiatan supervisi merupakan bagian integral dari fungsi manajerial kepala sekolah yang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan, dengan tujuan utama memberikan bantuan teknis kepada guru agar dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas

kinerjanya, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan supervisi, kepala sekolah diharapkan fokus pada pengamatan dan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan aktivitas akademik, khususnya aspek-aspek yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung ketika peserta didik sedang belajar.

Sebagaimana dikemukakan oleh Burdin Matry (1983), supervisi dimaksudkan sebagai suatu bentuk bantuan kepada guru untuk mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar.

Dalam konteks kekinian, supervisi pendidikan perlu mencakup empat dimensi utama, yaitu: pembinaan terhadap pengelolaan kurikulum, perbaikan dalam proses pembelajaran, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik, serta pemeliharaan moral dan semangat kerja guru. Keempat aspek ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Dalam pengembangan administrasi dan supervisi pendidikan dinyatakan bahwa supervisi harus diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Menciptakan dorongan dan motivasi kerja yang tinggi bagi para guru dan tenaga kependidikan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Mengupayakan inovasi dalam metode pembelajaran, yakni dengan mengembangkan dan menerapkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.
3. Membangun iklim kerja yang harmonis di lingkungan sekolah, baik antara guru dan peserta didik, antar sesama

guru, maupun antara guru dan kepala sekolah serta seluruh komponen staf pendidikan.

4. Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah melalui berbagai program pembinaan berkelanjutan, seperti *workshop*, seminar, *in service training*, *up grading* dan lain sebagainya.

Pada tahap ini, pengawasan atau supervisi dipahami sebagai suatu aktivitas yang mencakup observasi, pembinaan, serta pemberian dorongan terhadap kinerja individu lain yang dilaksanakan secara aktif oleh kepala sekolah. Supervisi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran, dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. Supervisi menjadi esensial karena merespons berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan sekolah.

Dalam rangka membangun mutu pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan pengguna layanan pendidikan (*user education*), kegiatan supervisi dan pengawasan harus diposisikan sebagai instrumen pembinaan yang mendukung kelancaran proses pembelajaran. Supervisi tidak dapat bersifat temporer atau insidental, melainkan harus dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, dan integral, dengan pendekatan pembinaan yang konstruktif terhadap guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan.

Oleh sebab itu, kepala sekolah dituntut untuk secara proaktif menerapkan manajemen pembelajaran yang efektif, melalui pelaksanaan program supervisi pendidikan sebagai wujud tanggung jawab profesionalnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kehadiran supervisi yang bersifat konstruktif ini, atau dapat juga disebut sebagai upaya peningkatan akademik, memberikan dampak signifikan pada pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya dalam aspek

moral dan pembelajaran. Lebih lanjut, semangat belajar peserta didik dapat tumbuh optimal dalam iklim sekolah yang didesain berdasarkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*).

egiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, beserta berbagai upaya intensif dan ekstensif lainnya, harus dilaksanakan secara sinergis dan didukung penuh oleh seluruh komunitas akademik di lingkungan sekolah. Supervisi tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencakup pengawasan diri secara berkelanjutan (kontinu) yang melekat dalam praktik keseharian, serta didukung oleh pembinaan berbasis nilai-nilai religius baik kepada guru maupun peserta didik. Kolaborasi semacam ini berdampak pada optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam penguatan dimensi moral peserta didik sebagai langkah antisipatif terhadap gejala dekadensi moral.

Namun demikian, peran pengawas pendidikan tidak akan berjalan secara efektif apabila sistem birokrasi pendidikan tidak mampu menjalankan fungsi pelayanannya secara optimal terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Pemberian pelayanan maksimal kepada sekolah merupakan strategi strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Optimalisasi pelayanan ini hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen pendidikan melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing secara bertanggung jawab dan terintegrasi.

2. Konsep Pembelajaran

Pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan, baik dalam jalur informal, formal, maupun nonformal. Dalam jalur informal,

tanggung jawab utama pendidikan berada di tangan orang tua dan keluarga di lingkungan rumah, yang bertugas menanamkan nilai-nilai luhur dan pembinaan karakter secara berkelanjutan. Sedangkan pada jalur formal, tanggung jawab ini dilimpahkan kepada guru dan tenaga pendidik di sekolah, yang memiliki kewajiban untuk mentransfer pengetahuan, membentuk sikap, mengasah keterampilan, serta membangun kepribadian peserta didik agar mencerminkan nilai-nilai moral dan religius yang menjadi dasar pendidikan.

Adapun pendidikan nonformal merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat luas, yang bertujuan membentuk pribadi anak agar memiliki perilaku dan sikap yang selaras dengan norma kehidupan bermasyarakat. Ketiga jalur pendidikan tersebut harus berlangsung secara terpadu, terstruktur, dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan sistem pendidikan yang utuh.

Purbakawatja dan Harahap (1985) menekankan bahwa pendidikan merupakan aktivitas sadar yang dilakukan oleh orang dewasa guna membimbing anak menuju kedewasaan, yakni kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara moral. Pendidik dalam konteks ini tidak terbatas pada orang tua, melainkan juga mencakup guru, pemuka agama, kepala asrama, dan tokoh lainnya yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendidik.

Lebih lanjut, pendidikan juga bertujuan untuk menuntun peserta didik dalam mengembangkan seluruh potensi jasmaniah dan rohaniyah yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Dja'far, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan rangkaian aktivitas pembimbingan dan pemberdayaan potensi peserta didik, baik fisik maupun spiritual, dalam rangka mencapai cita-cita hidup yang dicita-citakan oleh generasi pendidik sebelumnya.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai bentuk upaya pendidikan yang dilakukan oleh beragam pihak terhadap peserta didik, yang bertujuan untuk membentuk

karakter dan kepribadian peserta didik secara holistik, baik dalam aspek jasmaniah maupun rohaniah. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam kehidupannya.

Dalam dinamika praktik pendidikan saat ini, terjadi pergeseran istilah dari pengajaran menjadi pembelajaran. Istilah pembelajaran menekankan pada sentralitas peran peserta didik dalam proses belajar, sementara pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, pendidik dituntut untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran agar mampu menumbuhkan inspirasi, motivasi, semangat belajar, serta kreativitas peserta didik. Hal ini pada akhirnya diharapkan mengarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembelajaran, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep belajar menurut pandangan para ahli. Menurut Sudjana (2005), belajar merupakan suatu proses yang ditandai oleh adanya perubahan dalam diri individu. Perubahan ini dapat mencakup peningkatan dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, keterampilan, kebiasaan, dan aspek-aspek lainnya. Morgan (1986), mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen dan merupakan hasil dari latihan atau pengalaman. Sementara itu, Oemar Hamalik (2009), menyatakan bahwa belajar melibatkan perubahan dalam persepsi dan perilaku, termasuk pula perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan individu, baik secara pribadi maupun sosial.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang mengarah pada terjadinya perubahan perilaku, keterampilan, dan pengetahuan sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan proses belajar mengajar, seorang guru harus memperhatikan sejumlah prinsip dasar belajar yang berorientasi pada keberhasilan peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) Pembelajaran merupakan tanggung jawab langsung dari peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas belajar harus bersifat aktif dan dilakukan oleh siswa, bukan oleh orang lain.
- b) Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan tingkat perkembangan yang berbeda, sehingga proses belajar harus disesuaikan dengan kapasitas individual masing-masing siswa.
- c) Keberhasilan belajar akan lebih optimal apabila siswa mendapatkan penguatan atau umpan balik secara langsung dan berkelanjutan selama proses belajar berlangsung.
- d) Penguasaan secara menyeluruh dan sempurna terhadap setiap tahapan pembelajaran akan meningkatkan makna dan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan.
- e) Pemberian kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada siswa terhadap proses belajarnya akan mendorong munculnya motivasi belajar yang lebih tinggi serta meningkatkan kemandirian dalam belajar.

Pembelajaran merupakan kelanjutan dari aktivitas belajar yang berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran didefinisikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan yang mendukung terjadinya proses belajar.

Sugandi (dalam sumber lain) mengemukakan bahwa pembelajaran memiliki sejumlah karakteristik utama, yakni:

- a) Dilaksanakan secara sadar dan disusun melalui perencanaan yang sistematis;
- b) Mampu menumbuhkan perhatian serta motivasi belajar peserta didik;
- c) Menyediakan materi ajar yang relevan, menantang, dan menarik bagi siswa;

- d) Mengintegrasikan alat bantu pembelajaran yang sesuai dan menarik secara visual maupun fungsional;
- e) Mewujudkan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- f) Mempersiapkan peserta didik untuk siap menerima pembelajaran, baik secara fisik maupun psikologis.

Disimpulkan bahwa pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi antara peserta didik, pendidik, serta sumber belajar dalam konteks yang saling memengaruhi demi pencapaian tujuan instruksional. Dalam praktiknya, pembelajaran merupakan upaya sistematis untuk mendorong peserta didik agar aktif dalam proses belajar, melalui pemilihan dan pengembangan strategi, metode, serta pendekatan yang paling efektif guna mencapai hasil pembelajaran yang optimal.

Tujuan dari kegiatan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang positif, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Perubahan ini dapat dikenali melalui indikator-indikator yang dapat diamati secara kasat mata, seperti dalam ekspresi verbal, perilaku motorik, maupun gaya hidup yang mencerminkan pertumbuhan psikologis.

Dalam perspektif Islam, konsep pembelajaran mengacu pada tiga istilah utama, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Kata tarbiyah berasal dari akar kata rabb, yang menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya pada Surah Al-Fatihah ayat kedua, mengandung makna proses bertahap dalam mengembangkan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan bentuk dan fungsi. Selanjutnya, ta'lim sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abduh dan Ridha, merupakan proses transfer pengetahuan kepada individu, tanpa batasan metode tertentu. Sedangkan ta'dib, menurut Syed Naquib al-Attas dan Shalaby (1993), memiliki makna yang lebih luas, meliputi pengajaran, penanaman nilai moral, kebijaksanaan, pengasuhan, dan pembentukan adab dalam diri peserta didik.

Ketiga istilah tersebut merepresentasikan aspek-aspek berbeda dalam proses pendidikan Islam dan seringkali diterapkan secara simultan dalam praktik pembelajaran untuk mencapai tujuan pembinaan keilmuan, moral, dan spiritual peserta didik.

Agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan berkualitas, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka konseptual yang mendasari pemikiran dan tindakan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Dalam konteks ini, prinsip pembelajaran dapat diartikan sebagai kebenaran atau keyakinan dasar yang dijadikan pijakan dalam berpikir dan bertindak secara sistematis.

Ahmad Rohani (2004) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran mencakup aktivitas, motivasi, individualitas, lingkungan belajar, konsentrasi, kebebasan, penggunaan media atau peragaan, kerja sama dan kompetisi, apersepsi, korelasi materi, efisiensi dan efektivitas, globalitas, serta penggunaan permainan dan hiburan sebagai pendekatan. Sementara itu, Sugandi (2013) menambahkan prinsip kesiapan belajar, perhatian, motivasi, partisipasi aktif siswa, pengalaman langsung, pengulangan, tantangan materi, umpan balik, penguatan, serta pengakuan terhadap perbedaan individual.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran merupakan landasan yang esensial dalam menyusun dan mengelola proses belajar mengajar yang terarah, dinamis, dan bermakna, dengan tujuan akhir tercapainya keberhasilan pembelajaran secara optimal.

Adapun prinsip pembelajaran yang harus dipahami dan dijalankan serta berlaku secara umum, yaitu:

a. Perhatian dan Motivasi

Perhatian dan motivasi merupakan dua aspek krusial dalam proses pembelajaran yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan teori belajar dalam kerangka pengolahan informasi, ditegaskan bahwa tanpa adanya perhatian dan motivasi, proses interaksi belajar tidak

akan terjadi secara optimal, sehingga keberlangsungan pendidikan pun terhambat.

Minat dan dorongan belajar dari peserta didik akan muncul apabila materi yang disampaikan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan mereka, baik untuk pembelajaran lanjutan maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Apabila peserta didik merasa bahwa materi pelajaran tersebut penting dan bermanfaat, maka perhatian dan motivasi intrinsik akan tumbuh dengan sendirinya. Namun, ketika minat tersebut belum muncul, maka tugas pendidik adalah membangkitkan dan menumbuhkannya melalui strategi yang tepat.

Dalam implementasi pembelajaran, perhatian dan motivasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi akan lebih selektif dalam menerima rangsangan pembelajaran dari lingkungan, dan mampu memusatkan perhatian pada informasi yang relevan. Perhatian yang terarah membantu siswa dalam mengenali tugas yang harus diselesaikan, memahami masalah yang dihadapi, serta memusatkan pemikiran untuk mencari solusi.

Lebih jauh, peserta didik yang memiliki ketertarikan pada bidang studi tertentu akan lebih mudah fokus dan menunjukkan motivasi yang tinggi dalam mempelajarinya. Dalam hal ini, motivasi dipandang sebagai kekuatan internal yang mendorong dan mengarahkan perilaku belajar peserta didik menuju pencapaian tujuan pendidikan. Motivasi yang kuat akan menciptakan kenyamanan dalam proses belajar, sehingga peserta didik merasa bahwa lembaga pendidikan adalah tempat yang kondusif untuk menimba ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, bila perhatian dan motivasi telah tumbuh dalam diri peserta didik, maka proses penyampaian informasi oleh pendidik akan berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Hal ini menegaskan pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan

belajar yang mampu menstimulasi minat dan dorongan belajar peserta didik secara berkelanjutan.

b. Keaktifan

Menurut Thomas M. Risk(1966), proses mengajar merupakan upaya membimbing peserta didik melalui pengalaman belajar. Hal ini menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada keaktifan peserta didik itu sendiri. Pengalaman belajar akan efektif apabila peserta didik terlibat aktif baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, peserta didik memproses dan memahami materi sesuai dengan kapasitas, minat, bakat, serta latar belakang masing-masing, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus berupa materi pelajaran untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik.

Pada dasarnya, tujuan utama dari pembelajaran adalah mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui interaksi yang konstruktif dan pengalaman belajar yang bermakna. Keaktifan belajar menjadi unsur krusial yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Aktivitas belajar mencakup dimensi mental dan fisik yang terintegrasi, yaitu berpikir dan berbuat secara simultan. Pembelajaran yang efektif harus melalui berbagai bentuk kegiatan aktif seperti berkreasi, mengamati, berlatih, bermain peran, bekerja kelompok, dan sebagainya.

Keaktifan peserta didik mengacu pada kemampuannya dalam membangun sendiri pemahaman terhadap materi yang dihadapi. Pendapat Thorndike (1913) melalui teori Law of Exercise menyatakan bahwa pembelajaran efektif memerlukan latihan yang konsisten disertai rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, pengalaman langsung melalui pengamatan, eksplorasi, dan eksperimen menjadi penting dalam pembentukan pengetahuan peserta didik.

Indikator keaktifan peserta didik dapat diamati dari sejauh mana keterlibatannya dalam proses pembelajaran, seperti: melaksanakan tugas yang diberikan guru, berpartisipasi dalam pemecahan masalah, bertanya saat mengalami kesulitan, mencari informasi pendukung, mengikuti diskusi kelompok, melakukan refleksi terhadap hasil belajar, serta menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata.

Lebih lanjut, Bilman Natalie (2005) mengemukakan bahwa keaktifan peserta didik harus mencakup seluruh aspek pembelajaran, baik fisik, intelektual, maupun emosional. Beberapa indikator konkret dari keaktifan ini antara lain:

- a) Visual: membaca, mengamati gambar atau diagram, dan memperhatikan.
- b) Lisan: menyampaikan pendapat, merumuskan ide, dan bertanya.
- c) Auditori: mendengarkan penjelasan guru atau diskusi.
- d) Menulis: membuat ringkasan, mengerjakan latihan, dan menyusun laporan.
- e) Emosional: menunjukkan minat dan antusiasme terhadap materi pelajaran.
- f) Mental: mengingat, menganalisis, membuat koneksi, dan menyusun gagasan secara logis.

Dalam upaya meningkatkan keaktifan peserta didik, guru perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses pembelajaran serta menerapkan metode yang sesuai dengan tujuan instruksional. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan mengenali peserta didik yang kurang aktif dan melakukan intervensi pedagogis yang mendukung, seperti pemberian motivasi, penguatan positif, dan penyusunan aktivitas pembelajaran yang menarik dan menantang. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun semangat belajar serta mendorong terjadinya proses berpikir aktif pada peserta didik.

c. Keterlibatan langsung

Prinsip pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik mengharuskan keterlibatan langsung dalam proses belajar, baik secara fisik maupun mental. Prinsip ini sesuai dengan pepatah pedagogis yang menyatakan, “*I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand*”, yang menegaskan bahwa pengalaman langsung merupakan bentuk pembelajaran yang paling bermakna. Pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif akan meningkatkan efektivitas proses belajar, karena menciptakan internalisasi pengetahuan yang lebih dalam.

Dalam konteks ini, Edgar Dale (1969) melalui konsep *cone of experience* atau kerucut pengalaman menyatakan bahwa pengalaman langsung adalah metode paling efektif dalam memperoleh pemahaman. Pembelajaran yang mengedepankan partisipasi aktif peserta didik mendorong keterlibatan lebih dari sekadar mengenal konsep dan fakta; namun juga melibatkan dimensi emosional (afektif) dan keterampilan nyata (psikomotor).

Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran seharusnya mencakup ketiga ranah pembelajaran: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan perasaan), dan psikomotor (keterampilan). Sebagai contoh, pemahaman terhadap kondisi orang yang kelaparan tidak akan menyentuh sisi emosional peserta didik jika hanya disampaikan secara teori. Akan tetapi, pengalaman langsung seperti berpuasa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyentuh ranah afektif secara nyata.

d. Pengulangan

Secara esensial, proses belajar merupakan suatu aktivitas pengulangan terhadap materi yang telah dipelajari. Pengulangan ini menjadi salah satu strategi penting dalam mencapai keberhasilan belajar yang optimal. Pembelajaran dapat diibaratkan sebagai

rangkaian mata rantai yang berkesinambungan, dimulai dari kegiatan membaca, menyimak penjelasan guru, hingga melakukan pengulangan secara mandiri atau kelompok. Bagi guru, kegiatan mengulang bukan hanya bagian dari rutinitas, melainkan sebagai upaya sistematis dalam memberikan tugas yang memperkuat pemahaman peserta didik.

Mengulang pelajaran memiliki berbagai manfaat, antara lain membentuk kebiasaan belajar mandiri, menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap proses belajarnya, serta mendorong keterlibatan aktif dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Secara psikologis, pengulangan membantu memperkuat penyimpanan informasi dalam memori jangka panjang.

Aktivitas mengulang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melalui membaca kembali, mendiskusikan dengan teman, maupun mempraktikkan materi yang telah diajarkan. Efektivitas dari proses pengulangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi fisik dan psikis peserta didik, serta ketersediaan fasilitas pendukung belajar.

Dalam proses pembelajaran, peran guru lebih sebagai fasilitator dan motivator yang menstimulasi peserta didik untuk mencapai prestasi terbaiknya. Namun, keberhasilan belajar tetap sangat bergantung pada kesiapan peserta didik sendiri. Tanpa adanya kesiapan yang matang, hasil belajar yang diperoleh cenderung tidak optimal. Oleh karena itu, pengulangan materi yang dilakukan secara sistematis dan terencana menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan capaian belajar.

Terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan agar proses belajar peserta didik lebih efektif dan produktif. Pertama, peserta didik perlu memahami secara menyeluruh arah dan tujuan pembelajaran. Kedua, mereka harus menyadari bahwa belajar bukan sekadar menghafal, melainkan membangun kekuatan mental dan pengalaman kognitif. Ketiga, peserta didik harus mampu memusatkan

perhatian dan menghindari gangguan selama belajar. Keempat, pengelolaan waktu belajar secara disiplin sangat diperlukan. Kelima, keseimbangan antara kerja kelompok dan kerja mandiri harus ditanamkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kemandirian.

Jika prinsip-prinsip tersebut diinternalisasi dalam diri peserta didik, maka mereka akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran, serta mampu memecahkan masalah dengan cara yang efektif dan bijaksana.

e. Perbedaan Individual

Setiap individu memiliki karakteristik, sifat bawaan, dan ciri khas yang membedakannya satu sama lain. Individu dapat ditinjau dari berbagai perspektif, baik secara filosofis maupun psikologis. Sejak masa sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek kajian filsafat, baik dalam aspek formal yang membahas hakikat manusia, maupun aspek material yang menelaah kondisi manusia sebagaimana adanya. Dalam psikologi, kepribadian seseorang diyakini sebagai hasil dari interaksi antara faktor hereditas (pembawaan) dan lingkungan. Manusia dikenal sebagai makhluk yang berpikir (*Homo Sapiens*) dan makhluk yang dapat dididik (*Homo Educandum*), yang mencerminkan beragam pendekatan dalam memahami dan memperlakukan manusia.

Karakteristik bawaan yang meliputi aspek biologis dan psikologis melekat pada individu sejak lahir hingga dewasa. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, guru sebagai pendidik dituntut untuk memahami dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan keberagaman karakteristik peserta didik. Perbedaan individu ini mencakup variasi dalam aspek fisik, kognitif, afektif, dan sosial. Teori psikologi menyatakan bahwa perbedaan individu mencakup variasi biologis maupun psikologis yang memengaruhi proses dan hasil belajar.

Manusia sebagai makhluk unik memiliki perbedaan dalam intelegensi, minat, bakat, kebiasaan, tingkah laku, serta latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan keluarga. Guru perlu memiliki kepekaan terhadap keragaman ini agar pembelajaran dapat berlangsung secara adil dan objektif. Nasution (2008) menyarankan beberapa strategi untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan individu, yakni: (1) pengajaran individual berdasarkan kecepatan belajar masing-masing siswa, (2) pemberian tugas tambahan, (3) penggunaan metode proyek yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, serta (4) pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan mereka.

Selanjutnya, dalam menyikapi perbedaan peserta didik, guru perlu menerapkan pendekatan yang variatif dan fleksibel, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Guru harus memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Jamaris (2014), perbedaan kemampuan dalam menerima dan mengolah materi ajar dapat diatasi melalui penerapan metode pembelajaran yang beragam. Peserta didik dengan kecerdasan tinggi dapat diarahkan untuk membantu temannya yang membutuhkan pendampingan belajar, sehingga terjadi kolaborasi positif dalam proses pembelajaran.

f. Tantangan

Dalam era kontemporer, dunia pendidikan menghadapi tantangan serius berupa penetrasi ideologi yang bertentangan dengan prinsip dasar sistem ketatanegaraan. Pendidikan sejatinya harus memiliki fondasi kuat sebagai benteng pelindung dari pengaruh ideologi destruktif yang berpotensi merusak integritas sistem pendidikan. Di tengah pesatnya pertumbuhan dan kemajuan pendidikan, justru muncul berbagai ancaman yang menguji ketahanan dan arah perkembangan pendidikan itu sendiri.

Salah satu faktor utama yang memberikan pengaruh signifikan adalah kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan ini ibarat dua sisi mata uang: di satu sisi memberikan dampak positif melalui kemudahan akses informasi global yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk menunjang proses belajar, seperti melalui platform digital edukatif semisal Ruang Guru dan media pembelajaran daring lainnya. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga menimbulkan ekses negatif berupa meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar, termasuk permasalahan moral dan keagamaan.

Dinamika pendidikan yang terus berubah turut mendorong persaingan yang semakin ketat. Akibatnya, peserta didik cenderung menekankan orientasi pada pencapaian daya saing tanpa diimbangi dengan pembangunan karakter. Jika tidak diantisipasi dengan penguatan nilai-nilai pendidikan, maka pola pikir peserta didik dapat terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang destruktif dan bahkan mendorong mereka pada tindakan-tindakan yang anarkis.

Oleh karena itu, peserta didik masa kini dituntut untuk mampu menghadapi perubahan zaman secara kritis dan adaptif, serta menyeimbangkannya dengan nilai-nilai religius sebagai penguat integritas dan karakter. Peserta didik harus diarahkan untuk menjadikan perkembangan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sebagai pengalih perhatian dari proses pendidikan yang mendalam.

Dalam konteks ini, peran guru menjadi sangat vital. Tantangan yang dihadapi guru pada era Revolusi Industri 4.0 berbeda dari masa sebelumnya. Jika guru masa lalu bergulat dengan keterbatasan sarana dan prasarana, maka guru masa kini menghadapi tantangan dalam membentuk karakter peserta didik yang telah terpengaruh oleh budaya instan dan pola pikir praktis. Hal ini menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Desain pembelajaran yang inovatif menjadi kunci penting untuk merespons tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi langkah strategis agar guru mampu menjembatani kebutuhan pembelajaran dengan karakteristik generasi digital saat ini. Meskipun teknologi tidak serta-merta menjadi faktor utama yang menentukan minat belajar, tetapi integrasi teknologi secara bijak akan membuka ruang bagi peserta didik untuk menyalurkan potensi intelektual dan kreativitasnya secara optimal.

g. Balikan dan Penguatan

Prinsip balikan (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*) merupakan implementasi nyata dari teori-teori belajar yang dikembangkan oleh para ahli psikologi pendidikan seperti Edward L. Thorndike, B.F. Skinner, dan aliran Gestalt. Thorndike (1932) melalui Law of Effect-nya menyatakan bahwa suatu perilaku akan cenderung diulang apabila memberikan efek yang menyenangkan bagi pelakunya. Hal ini diperkuat oleh teori Operant Conditioning dari Skinner (1953) yang menekankan bahwa penguatan, baik yang bersifat positif maupun negatif, mampu memengaruhi kecenderungan perilaku belajar peserta didik.

Menurut Skinner (1953), proses belajar akan lebih efektif jika diberikan penguatan yang sesuai. Penguatan positif, seperti pujian atau penghargaan, akan mendorong peserta didik untuk mengulangi perilaku yang sama, sedangkan penguatan negatif, seperti penghilangan konsekuensi yang tidak menyenangkan, juga dapat memperkuat respons yang diharapkan. Dengan demikian, baik konsekuensi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, apabila diberikan dengan tepat, dapat mendorong munculnya perilaku yang diinginkan dalam konteks pembelajaran.

Teori ini menekankan pentingnya hasil belajar yang dapat diamati dan diukur. Oleh karena itu, proses pengulangan dan latihan menjadi instrumen penting dalam membentuk kebiasaan belajar yang

efektif. Evaluasi dalam pendekatan ini berorientasi pada perilaku nyata yang tampak secara langsung. Guru dalam hal ini berperan bukan sebagai penyampai materi semata, melainkan sebagai fasilitator yang memberikan stimulus pembelajaran dan memperkuat respons peserta didik melalui penguatan yang tepat.

Contoh konkret dari penerapan penguatan positif adalah ketika seorang peserta didik mampu memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan guru, dan kemudian mendapatkan pujian. Hal ini akan meningkatkan kecenderungan untuk menjawab pertanyaan di masa mendatang. Sebaliknya, ketika peserta didik tidak memberikan respons, dan guru menunjukkan ketidakpuasan secara eksplisit, hal itu juga dapat berfungsi sebagai penguatan terhadap perilaku pasif jika tidak ditangani dengan strategi yang konstruktif. Dalam pandangan Skinner, baik respons aktif maupun pasif yang diberi konsekuensi akan cenderung diulang jika konsekuensi tersebut memperkuat pola perilaku tertentu.

h. Prinsip *Tadarruj* dan *Tartib*

Perkembangan pendidikan saat ini dihadapkan pada tantangan serius yang berasal dari pengaruh ideologi yang berpotensi melemahkan fondasi dasar sistem ketatanegaraan. Dalam konteks ini, pendidikan seyogianya berfungsi sebagai benteng yang kokoh untuk menangkal penetrasi ideologi-ideologi destruktif yang dapat merusak integritas dan nilai-nilai luhur pendidikan. Ironisnya, ketika dunia pendidikan tengah menunjukkan kemajuan pesat, saat yang sama pendidikan juga dibombardir oleh berbagai tantangan eksternal yang kompleks dan multidimensi.

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak ganda (ambivalen). Di satu sisi, kemajuan ini menghadirkan peluang besar berupa akses informasi yang sangat luas dan cepat bagi peserta didik. Dengan hanya menggunakan satu jari, peserta didik kini mampu

menjelajahi berbagai sumber pengetahuan global. Bahkan, tidak sedikit yang telah menciptakan berbagai media digital sebagai sarana penunjang proses pembelajaran, seperti aplikasi Ruang Guru dan platform digital lainnya.

Namun demikian, sisi negatif dari perkembangan teknologi tersebut juga tidak dapat diabaikan. Fenomena ini turut berkontribusi pada meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar, termasuk kecenderungan terhadap dekadensi moral dan penyimpangan terhadap nilai-nilai agama. Tantangan global ini turut mendorong terjadinya persaingan yang ketat dalam dunia pendidikan, di mana peserta didik terdorong untuk meningkatkan daya saing, meskipun dalam prosesnya rentan terhadap pengaruh pragmatisme dan instan.

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menginternalisasi nilai-nilai etika dan religiusitas kepada peserta didik sebagai landasan spiritual untuk menghadapi perubahan zaman. Peserta didik harus dibekali kemampuan kognitif yang kritis sekaligus kepekaan spiritual untuk menjadi insan yang adaptif dan berkarakter di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Di sisi lain, tantangan besar juga dihadapi oleh guru. Jika pada masa lalu problem utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, maka pada era Revolusi Industri 4.0 ini tantangannya telah bergeser pada aspek karakter peserta didik. Generasi digital saat ini cenderung bersifat instan, pragmatis, dan kurang menghargai proses pembelajaran yang berjenjang.

Oleh karena itu, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik zaman. Salah satu strategi penting adalah integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Meskipun penggunaan teknologi belum tentu secara langsung meningkatkan motivasi belajar, namun langkah ini sangat relevan untuk mengikuti irama zaman dan menarik partisipasi

aktif peserta didik. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana yang efektif dalam memfasilitasi potensi intelektual peserta didik agar lebih optimal.

i. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor esensial dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Dalam tradisi Islam, Rasulullah saw. memberikan anjuran agar komunikasi atau penyampaian ilmu disesuaikan dengan tingkat kemampuan intelektual seseorang, sebagaimana sabdanya, “Berbicaralah kepada manusia menurut kadar akalunya”. Hal ini menegaskan pentingnya pemilihan metode yang relevan dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penggunaan metode yang tepat tidak hanya mempermudah pencapaian tujuan, tetapi juga meningkatkan daya tarik pembelajaran melalui pendekatan yang variatif dan inovatif.

Dalam konteks pendidikan Islam, pemilihan metode harus memperhatikan sejumlah prinsip fundamental yang berkaitan dengan kondisi individual maupun sosial peserta didik dan pendidik. Prinsip-prinsip metodologis tersebut berperan sebagai pedoman normatif dalam pengembangan strategi pembelajaran. Setidaknya terdapat empat prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam penggunaan metode pendidikan Islam.

Pertama, prinsip agamis. Metode yang diterapkan dalam pendidikan Islam harus bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga menjadi pedoman pendidikan yang menjelaskan hakikat hidup dan tujuan pembelajaran. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 64, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan segala permasalahan dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman. Maka, seluruh metode pendidikan hendaknya berlandaskan pada nilai-nilai transendental tersebut.

Kedua, prinsip biologis. Aspek biologis peserta didik berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan intelektualnya. Seiring dengan pertumbuhan fisik, kemampuan berpikir dan memahami informasi pun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan fase perkembangan biologis peserta didik agar proses penyampaian materi menjadi optimal dan tidak memberatkan.

Ketiga, prinsip psikologis. Kondisi psikologis peserta didik menjadi determinan penting dalam proses penerimaan dan pemaknaan pembelajaran. Pendidikan yang tidak memperhatikan stabilitas emosional dan mental peserta didik cenderung tidak efektif. Maka, pendidik perlu mempertimbangkan aspek psikologis dalam memilih metode pembelajaran. Dalam kerangka Islam, akal merupakan bagian dari dimensi ruhani, sehingga pengembangan potensi psikologis juga merupakan bagian integral dari pendidikan yang holistik.

Keempat, prinsip sosiologis. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi sosial, baik antara peserta didik dengan sesama, maupun dengan pendidik. Dalam konteks ini, metode yang digunakan harus relevan dengan kondisi sosial peserta didik. Ketidaksesuaian metode dengan latar belakang sosial-budaya peserta didik dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam.

Keempat prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi metode pembelajaran Islam perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut secara menyeluruh. Dengan pendekatan metodologis yang tepat, proses pembelajaran agama Islam diharapkan tidak hanya mampu menyampaikan

pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik secara utuh.

j. Prinsip Psikologis

Menurut Ibn Khaldun (2000), dalam proses pendidikan anak, penting untuk mempertimbangkan kapasitas intelektual mereka. Bagi anak-anak yang memiliki tingkat pemahaman abstrak yang rendah, pendekatan konkret lebih dianjurkan untuk memfasilitasi proses belajar mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dalam pembelajaran, di mana setiap anak dipandang sebagai individu yang unik dengan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami dan menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan karakteristik masing-masing peserta didik.

Dalam konteks pendidikan, guru memegang peran sentral sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Istilah “guru” berasal dari kata Arab *al-mu'allim*, yang berarti seseorang yang menyampaikan ilmu dalam sebuah forum pembelajaran (*majelis taklim*). Secara konseptual, pengertian guru tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun dimasukkan dalam kategori lebih luas yakni “pendidik”.

Secara khusus, guru Pendidikan Agama Islam memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembinaan aspek spiritual, jasmani, rohani, intelektual, dan keterampilan siswa yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjalankan tugasnya, guru perlu mengedepankan prinsip psikologis yang berorientasi pada pemberian kemudahan kepada peserta didik dalam mengakses, memahami, dan menginternalisasi materi pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam pengajaran harus mampu menyederhanakan konsep-konsep yang kompleks agar dapat diterima secara utuh oleh peserta didik.

Guru sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan tidak dituntut untuk menggunakan metode-metode yang rumit atau spektakuler apabila bertentangan dengan prinsip psikologis, sosiologis, *tajarrub* (pengalaman), dan *tartib* (sistematika). Yang terpenting adalah bagaimana guru mampu menanamkan nilai-nilai dari materi pembelajaran yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan nyata oleh peserta didik, meskipun pemahaman konsepnya belum sepenuhnya terbentuk secara sempurna.

Pelaksanaan prinsip-prinsip pedagogis tersebut merupakan upaya strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan nasional di sektor pendidikan, serta merupakan bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu diartikan sebagai ukuran kualitas atau derajat suatu objek, termasuk kemampuan dan kecerdasan seseorang. Sementara itu, menurut Arcaro (1995), mutu merupakan proses sistematis yang diarahkan pada perbaikan berkelanjutan terhadap hasil yang dicapai, baik dalam bentuk produk maupun layanan, yang bersifat *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tak berwujud).

Mutu *tangible* merujuk pada kualitas yang dapat dilihat dan diamati secara langsung, baik dalam bentuk produk fisik maupun perilaku nyata. Contohnya adalah televisi yang memiliki tampilan visual yang jernih, suara yang baik, ketahanan penggunaan, serta kemudahan mendapatkan suku cadang. Dalam dunia pendidikan, mutu *tangible* dapat terlihat dari perilaku siswa yang tertib, aktif, serta sarana dan prasarana belajar yang memadai.

Sebaliknya, mutu *intangible* mencerminkan kualitas yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat dirasakan dan dialami, seperti suasana pembelajaran yang disiplin, hubungan interpersonal yang harmonis, serta lingkungan belajar yang kondusif. Kedua jenis

mutu ini saling melengkapi dan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pendidikan, baik dari segi proses maupun hasil yang dicapai.

Penerapan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor strategis yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Implikasi dari kebijakan ini adalah meningkatnya tanggung jawab kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Pemerintah daerah diharapkan memainkan peran fasilitatif melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga pendidik, serta mendukung berbagai program yang dirancang oleh satuan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam konteks pengelolaan mutu pendidikan, sekitar 85% dari masalah mutu bersumber dari aspek manajerial. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien sejak dini. Salah satu pendekatan manajerial yang terbukti efektif di dunia industri dan dapat diadaptasi dalam sektor pendidikan adalah *Total Quality Management* (TQM), atau dikenal dalam pendidikan sebagai *Total Quality Management in Education* (TQME). Pendekatan ini menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek pendidikan, termasuk produk layanan, sumber daya manusia, proses pembelajaran, dan lingkungan belajar.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 32 Tahun 2013 juga menegaskan pentingnya standar nasional pendidikan. Beberapa poin penting dalam peraturan ini mencakup penyelenggaraan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik; pentingnya keteladanan dari pendidik dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik; serta keharusan setiap satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam proses pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, mutu pendidikan merupakan hasil dari integrasi antara kualitas proses dan hasil yang dikelola secara sistematis melalui pendekatan manajemen mutu, dukungan kebijakan nasional, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam aspek proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Komitmen ini sejatinya perlu direspons secara konkret oleh seluruh satuan pendidikan, baik yang berada di bawah naungan pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk tindak lanjut yang strategis adalah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan profesional bagi pendidik. Upaya ini bertujuan untuk mendorong transformasi guru menjadi tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Jika hal ini dilaksanakan secara konsisten, maka visi peningkatan mutu pendidikan nasional dapat terwujud secara nyata di seluruh sekolah di Indonesia.

Dalam praktiknya, pendidikan merupakan proses interaksi dinamis antara pendidik dan peserta didik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pendidik, peserta didik, dan tujuan pembelajaran merupakan tiga elemen esensial yang saling melengkapi. Ketiganya membentuk suatu struktur segitiga fundamental dalam sistem pendidikan, di mana ketidakhadiran salah satunya akan menghilangkan substansi dari makna pendidikan itu sendiri. Walaupun teknologi dan media pembelajaran telah mengalami kemajuan signifikan, namun dalam situasi tertentu, peran guru tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh unsur lain tersebut.

Guru tetap menjadi faktor determinan dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan hasil dari kerja kolektif berbagai unsur yang saling terkait. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem, yang masing-masing memainkan peran signifikan dalam mendukung pencapaian kualitas yang diharapkan, baik dari sisi proses maupun hasil belajar.

Sudarwan Danim (2010), mengidentifikasi lima komponen utama yang harus menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kelima faktor tersebut dianggap sebagai elemen yang memiliki pengaruh dominan dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya.

a) Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan dapat dimaknai sebagai suatu proses memengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dalam konteks pendidikan, inti dari kepemimpinan sekolah terletak pada kemampuan pemimpinnya dalam memberikan pengaruh positif kepada seluruh elemen sekolah untuk bergerak secara sinergis menuju tujuan institusional.

Seorang kepala sekolah idealnya memiliki visi dan misi yang jelas serta mampu mewujudkan visi tersebut melalui tindakan strategis yang terencana. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah memegang sejumlah peran penting, terutama dalam aspek manajerial dan administratif.

Pertama, kepala sekolah berperan sebagai pengelola proses pembelajaran. Tugas ini mencakup perencanaan dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran selama satu tahun

ajaran, menyusun jadwal pelajaran, mengkoordinasikan pengembangan model pembelajaran, menetapkan norma dan kebijakan kenaikan kelas, melakukan pencatatan serta pelaporan hasil belajar peserta didik, serta mengelola dan mengembangkan koleksi buku perpustakaan dan sarana pembelajaran lainnya.

Kedua, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia (kepegawaian). Hal ini meliputi pengurusan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pemberian cuti, distribusi tugas di antara staf sekolah, penciptaan suasana kerja yang kolaboratif dan menyenangkan, serta penegakan disiplin dan etika profesi di lingkungan sekolah.

Selain menjalankan tugas internal, kepala sekolah juga dituntut untuk mampu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Ini mencakup penguatan hubungan kolaboratif antara sekolah dengan orang tua peserta didik, masyarakat sekitar, dan lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian, kepala sekolah tidak hanya bertugas sebagai manajer institusi, tetapi juga sebagai katalisator yang mampu mendorong sinergi lintas sektor demi optimalisasi pengembangan peserta didik secara menyeluruh.

b) Guru

Profesi guru merupakan suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pemenuhan standar keahlian tertentu, tanggung jawab yang tinggi, serta dedikasi terhadap tugas yang dijalankan. Sebagaimana profesi lain pada umumnya, guru memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan karena berperan langsung dalam proses pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Dalam kerangka profesionalisme, guru tidak hanya bertugas mengajar, melainkan juga mendidik, membimbing, dan menjadi teladan bagi peserta didik.

Ditinjau dari perspektif psikologi pendidikan, seorang guru dituntut untuk memahami bahwa setiap peserta didik adalah pribadi yang bermartabat dan memiliki hak untuk dihargai secara utuh. Oleh karena itu, interaksi antara guru dan peserta didik harus dilandasi dengan sikap saling percaya, saling menghargai, dan menghindari prasangka negatif, agar tercipta suasana belajar yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Guru bukan hanya sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai elemen utama dalam pelaksanaan pendidikan secara holistik. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Keterkaitan yang erat antara profesionalisme guru dan mutu pendidikan menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kompetensi dan kinerja guru itu sendiri.

Tanggung jawab guru tidak hanya terletak pada aktivitas mengajar, tetapi juga pada peningkatan hasil belajar peserta didik, yang sering kali diukur melalui indikator kuantitatif seperti tingkat kelulusan. Oleh karena itu, beban moral dan profesional untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik secara langsung melekat pada peran guru.

Dalam *triangle of education* yang terdiri atas peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan, guru menempati posisi sentral sebagai fasilitator pengembangan diri peserta didik. Guru bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan kepribadian utuh peserta didik, baik secara fisik maupun psikis, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Namun demikian, eksistensi guru sebagai pendidik profesional saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kemerosotan moral dan kesiapan intelektual lulusan pendidikan dalam menghadapi dunia kerja. Fenomena ini menjadi cerminan bahwa profesionalisme guru perlu terus ditingkatkan sebagai bagian integral dari peningkatan mutu pendidikan.

Kedudukan guru sebagai tenaga pendidik profesional ditujukan untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Dalam menjalankan perannya, guru harus mampu menjadi fasilitator, motivator, inspirator, dan pengembang strategi pembelajaran yang inovatif. Peran-peran tersebut menuntut adanya peningkatan kapasitas profesional yang berkelanjutan agar guru mampu menjawab dinamika dan tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang.

c) Peserta Didik

Dalam paradigma pendidikan modern, pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat (*learner-centered approach*) menjadi suatu keharusan yang mendasar. Pendekatan ini menekankan pentingnya menggali potensi dan kompetensi peserta didik secara optimal agar lembaga pendidikan mampu memetakan serta menginventarisasi kekuatan individual yang dimiliki oleh setiap peserta didik.

Peserta didik dalam dunia pendidikan dipandang sebagai entitas kompleks yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Fungsi utama peserta didik adalah sebagai subjek belajar, bukan sebagai pengendali proses pembelajaran. Dalam kerangka ini, peserta didik dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses konstruksi pengetahuan, serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap pencapaian hasil belajarnya. Artinya,

proses belajar bersifat otonom dan partisipatif, di mana peserta didik berperan aktif dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan.

Pendidikan dalam konteks ini diposisikan sebagai suatu proses pendampingan (*facilitation*) yang bertujuan membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangan usia dan kematangan psikologisnya. Setiap tahap perkembangan membawa serta tugas-tugas perkembangan yang khas, yang memerlukan kesiapan dan kemampuan belajar tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada sejauh mana ia memahami karakteristik perkembangan peserta didik serta keterampilan dalam mengimplementasikan pemahaman tersebut ke dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap potensi dan kemandirian peserta didik, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan perkembangan individu.

d) Kurikulum

Kurikulum merupakan komponen esensial dalam pelaksanaan pendidikan formal di sekolah. Setiap kegiatan pendidikan dirancang untuk mencapai serangkaian tujuan yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan kepribadian, keterampilan sosial, hingga kompetensi kerja. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh proses pembelajaran.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan praktik pendidikan, konsep kurikulum juga mengalami perluasan makna.

Dalam perspektif tradisional, kurikulum dipandang secara terbatas sebagai sekumpulan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Namun, pemahaman kontemporer mengklasifikasikan kurikulum menjadi dua dimensi utama: kurikulum sebagai dokumen rencana dan kurikulum sebagai sesuatu yang dijalankan secara fungsional di dalam kelas.

Sebagaimana dinyatakan oleh Rusmkiana (tahun), efektivitas suatu kurikulum tidak dapat diukur hanya dari dokumen tertulisnya, melainkan ditentukan oleh implementasi kurikulum tersebut dalam konteks pembelajaran di kelas. Kurikulum bukan semata-mata naskah teoritik, melainkan instrumen fungsional yang mengatur dinamika pembelajaran dan lingkungan belajar. Dengan kata lain, dokumen tertulis merupakan representasi formal dari kurikulum, sedangkan pelaksanaannya dalam kelas menjadi wujud kurikulum fungsional.

Selain diposisikan sebagai mata pelajaran atau konten pembelajaran, kurikulum juga dipahami sebagai perencanaan pengajaran. Dalam hal ini, kurikulum mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, aktivitas pengajaran, media pembelajaran, serta penjadwalan kegiatan belajar. Kurikulum juga merupakan sistem yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan sekolah, mencakup penetapan kebijakan, prosedur pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kurikulum harus senantiasa bersifat dinamis, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik.

e) Jaringan Kerjasama

Sekolah sebagai institusi pencetak generasi masa depan dituntut untuk memberikan pelayanan pendidikan yang unggul kepada para pemangku kepentingan (*users*), yang meliputi

peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas. Keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas akademik semata, melainkan juga pada keberhasilan dalam membangun kerja sama internal yang solid dan sinergis. Persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah umumnya dipengaruhi oleh kualitas layanan pendidikan yang diberikan, rekam jejak lulusan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta keterlibatan sekolah dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait.

Dalam konteks ini, konsep kerja sama sebagaimana dikemukakan oleh Murphy J (2002), merupakan bentuk hubungan saling menguntungkan dan bersifat timbal balik. Sekolah idealnya tidak bersifat eksklusif atau tertutup, melainkan terbuka terhadap kolaborasi eksternal dengan institusi lain demi mendukung pengembangan mutu pendidikan. Pembentukan jejaring kerja sama lintas sektor akan memberikan peluang luas bagi sekolah untuk memperkaya perspektif, menjalin sinergi global, dan memperkuat kapasitas institusi. Melalui kerja sama tersebut, sekolah dapat memperkuat pencapaian tujuan pendidikan, memperkaya pengalaman belajar peserta didik, serta menghubungkan aktivitas pembelajaran dengan realitas kehidupan sosial. Selain itu, kolaborasi strategis juga memungkinkan pemanfaatan optimal sumber daya komunitas, meningkatkan nilai-nilai seperti kemandirian, kreativitas, sikap toleran, dan keterbukaan peserta didik dalam proses pembelajaran, serta mendukung upaya pemecahan masalah kehidupan nyata secara lebih bermakna.

Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner serta profesionalisme guru yang kreatif dan inovatif merupakan elemen krusial dalam mendorong mutu pembelajaran. Keduanya memegang peranan penting sebagai agen perubahan yang dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, yang pada akhirnya tercermin dalam kualitas lulusan (*output*) dan dampak jangka panjang (*outcome*). Jika sekolah mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, maka masyarakat pun akan turut berkontribusi dalam mendukung berbagai kebutuhan sekolah. Dengan demikian, peningkatan mutu pembelajaran menjadi lebih mudah terwujud melalui hubungan timbal balik yang saling menguatkan antara sekolah dan masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hal ini menegaskan bahwa peran guru melampaui sekadar pengajar dalam ranah kognitif, melainkan juga berfungsi sebagai figur orang tua kedua yang bertugas membentuk karakter, membina akhlak, dan menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik.

Dalam konteks pendidikan Islam, pengelolaan lembaga pendidikan membutuhkan penerapan prinsip manajemen yang efektif. Manajemen pendidikan Islam dipahami sebagai proses sistematis dalam pengaturan dan pengelolaan lembaga pendidikan yang melibatkan seluruh sumber daya, baik muslim maupun non-muslim, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efisien dan efektif.

3. Konsep Mutu

Secara umum, mutu merujuk pada tingkat keunggulan atau derajat baik-buruknya suatu produk, layanan, atau proses. Dalam konteks pendidikan, mutu menunjukkan sejauh mana proses dan hasil pendidikan memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan. Sallis (2012) menekankan bahwa mutu dalam pendidikan bukan hanya pada hasil

(output), tetapi juga pada proses (input dan transformasi), serta persepsi pemangku kepentingan

Menurut Depdiknas (2003), Mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara proses dan hasil pendidikan dengan standar yang ditetapkan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan nasional pendidikan dengan realisasi di lapangan mengacu pada kebijakan pemerintah.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan pendekatan yang diadaptasi dari sistem manajemen mutu dalam industri manufaktur, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak tahap awal proses produksi. Dalam konteks pendidikan, mutu dimaknai sebagai tingkat kesesuaian antara layanan pendidikan yang disediakan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengembangan sekolah bermutu menuntut keselarasan antara input, proses, dan output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan.

Setiap lembaga pendidikan idealnya menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan layanan pendidikan dilandasi oleh permintaan terhadap hasil yang dihasilkan, yakni lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, lulusan pendidikan dikatakan bermutu apabila mereka mampu memenuhi, atau bahkan melebihi, ekspektasi stakeholder pendidikan.

Secara konseptual, orientasi manajemen mutu di tingkat satuan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan, memperbaiki kinerja kelembagaan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memuaskan pihak-pihak terkait. Manajemen mutu dalam pendidikan bukanlah sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan merupakan seperangkat prinsip dan prosedur yang terus-menerus ditingkatkan untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal.

Dengan demikian, manajemen mutu sekolah dapat didefinisikan sebagai strategi pengelolaan seluruh sumber daya sekolah, dengan melibatkan seluruh komponen sekolah untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, penuh semangat, dan terlibat aktif dalam proses peningkatan mutu. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan zaman.

Mutu pendidikan sendiri menjadi aspek krusial dalam pembangunan bangsa, dan selalu menjadi bagian dari prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Dalam pengembangan mutu pendidikan, terdapat dua pendekatan teori yang dominan. Pertama, pendekatan yang menekankan pentingnya faktor input, seperti kurikulum, perencanaan, evaluasi, tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, iklim sekolah, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Kedua, pendekatan yang menitikberatkan pada proses pendidikan, termasuk pengelolaan kelembagaan, pengambilan keputusan, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi yang berkesinambungan.

Lembaga pendidikan merupakan sarana utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang melibatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, banyak sekolah telah menerapkan pendekatan *Total Quality Management* (TQM), yang terbukti efektif dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam konteks pendidikan, Manajemen Mutu Terpadu atau *Total Quality Management* (TQM) dipahami sebagai suatu pendekatan filosofis dan metodologis yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Pendekatan ini memberikan seperangkat instrumen praktis yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan demikian, penerapan TQM merupakan salah satu strategi sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan

manajemen yang terstruktur dan terencana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, tidak hanya relevan pada masa kini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan.

Adapun komponen utama dalam model implementasi *Total Quality Management* di lingkungan pendidikan mencakup enam aspek pokok, yaitu: 1) Kepemimpinan, 2) Pendekatan fokus terhadap pelanggan, 3) Iklim organisasi, 4) Tim pemecahan masalah, 5) Tersedia data yang bermakna, serta 6) Metode ilmiah dan alat-alat.

a. Tolak Ukur Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu

Dalam implementasi *Total Quality Management* (TQM) pada lembaga pendidikan, kepuasan pelanggan menjadi orientasi utama. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkungan sekolah perlu berupaya mewujudkan layanan yang sesuai dengan ekspektasi tersebut. Keberhasilan penerapan TQM di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, diukur dari sejauh mana tingkat kepuasan pengguna layanan pendidikan, baik internal maupun eksternal. Suatu lembaga pendidikan dikatakan berhasil apabila mampu menyediakan pelayanan pendidikan yang memenuhi atau bahkan melampaui harapan para pemangku kepentingan.

Keberhasilan lembaga pendidikan dalam menerapkan manajemen mutu ditandai oleh indikator-indikator berikut: 1) Kepuasan peserta didik terhadap pelayanan yang diberikan oleh sekolah; 2) Kepuasan orang tua terhadap perlakuan dan perkembangan anaknya di sekolah; 3) Kepuasan pihak pengguna lulusan terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan; 4) Kepuasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap lingkungan kerja dan manajemen sekolah.

Untuk meningkatkan mutu sekolah atau madrasah, diperlukan berbagai strategi konkret, antara lain:

- a) Menyelaraskan komitmen mutu antara pimpinan dan seluruh komponen sekolah/madrasah.

- b) Merancang dan melaksanakan program peningkatan mutu secara terencana.
- c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi pendidikan.
- d) Menerapkan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang partisipatif dan transformatif.
- e) Menetapkan standar mutu lulusan yang jelas dan terukur.
- f) Menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak eksternal.
- g) Melakukan penataan organisasi sekolah agar lebih adaptif dan responsive.
- h) Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran;

TQM diakui sebagai pendekatan manajerial yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Melalui penerapan prinsip-prinsip mutu secara menyeluruh, TQM membantu sekolah dalam mengidentifikasi permasalahan, menetapkan solusi, serta melaksanakan perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Dalam konteks pendidikan, tantangan dan permasalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, keberadaan sistem manajemen mutu menjadi penting sebagai landasan untuk mencari solusi yang sistematis dan berorientasi pada hasil. Manajemen berbasis sekolah (MBS) juga merupakan pendekatan strategis yang mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi kepada sekolah untuk mengelola diri secara mandiri dan sesuai dengan konteks lokal.

Keith and Girling (1991), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa efektivitas sekolah, ditinjau dari karakteristik organisasionalnya, berkontribusi sebesar 32 persen terhadap variasi antar sekolah dalam pencapaian prestasi peserta didik. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan

formulasi manajemen sekolah yang tepat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Dengan diberikannya otonomi penuh, sekolah diharapkan mampu mengelola sumber dayanya secara koordinatif dan kreatif. Kemandirian institusional ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan program-program pendidikan dengan karakteristik peserta didik dan harapan pelanggan pendidikan. Dalam konteks ini, persaingan sehat antar sekolah menjadi pemicu terwujudnya peningkatan mutu yang berkelanjutan..

b. Manajemen Berbasis Sekolah

Pemikiran mengenai perlunya transformasi dalam sistem pengelolaan pendidikan telah mendorong lahirnya pendekatan baru yang menempatkan sekolah sebagai pusat utama dalam pelaksanaan pendidikan. Pendekatan ini dikenal sebagai *School-Based Quality Management* atau dalam konteks Indonesia disebut sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Pendekatan ini berorientasi pada pemberian otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

MPMBS didefinisikan sebagai suatu model manajemen yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan pendidikan nasional dan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan model ini bertujuan utama untuk meningkatkan mutu sekolah secara menyeluruh, yang mencakup efektivitas, efisiensi, inovasi, relevansi, aksesibilitas, serta pemerataan pendidikan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat (1), dijelaskan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan, di mana kepala sekolah/madrasah

bersama guru dan komite sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan internal, demi peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Agus Wibowo (2011), Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan manajerial yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri, dengan mengedepankan pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif. Sementara itu, Asmani menyatakan bahwa MBS adalah upaya pemberdayaan sekolah dalam mengelola seluruh potensi untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang unggul secara kognitif, psikomotorik, dan afektif.

Lebih lanjut, Rohiat mengemukakan bahwa pelaksanaan MBS dilandasi oleh beberapa pertimbangan strategis sebagai berikut:

- a) Otonomi yang lebih besar mendorong sekolah untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- b) Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya memungkinkan sekolah bersikap responsif dan adaptif terhadap kebutuhan aktual di lingkungan sekolah.
- c) Sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi internal dan eksternal, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga dapat melakukan perencanaan dan pengembangan secara optimal.
- d) Sekolah memahami kebutuhan peserta didik secara lebih komprehensif, sehingga proses pendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan siswa.
- e) Pengambilan keputusan yang dilakukan langsung oleh sekolah mencerminkan kepentingan nyata satuan pendidikan tersebut.
- f) Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan dapat ditingkatkan apabila diawasi secara langsung oleh masyarakat sekitar.

- g) Keterlibatan seluruh elemen sekolah dan masyarakat akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.
- h) Sekolah bertanggung jawab atas mutu pendidikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, orang tua, dan masyarakat umum, sehingga memiliki dorongan kuat untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan.
- i) Sekolah dapat bersaing secara sehat dengan sekolah lain melalui inovasi yang melibatkan berbagai pihak.
- j) Sekolah memiliki kemampuan adaptif yang tinggi dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan secara cepat dan tepat.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan strategi yang tepat dengan melibatkan seluruh elemen sekolah dan masyarakat secara aktif. Dukungan dari semua pihak tersebut memungkinkan sekolah untuk mengambil langkah-langkah inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual serta relevan dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Adapun aspek-aspek yang harus menjadi fokus dalam implementasi MPMBS mencakup: 1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah, 2) Pengelolaan kurikulum, 3) Pengelolaan proses belajar mengajar, 4) Pengelolaan sumber daya manusia (ketenagaan), 5) Pengelolaan sarana dan prasarana (peralatan dan perlengkapan), 6) Pengelolaan keuangan, 7) Pelayanan terhadap siswa, 8) Hubungan antara sekolah dengan masyarakat, serta 9) Pengelolaan iklim sekolah secara menyeluruh.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, penerapan MPMBS dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

- 1) Penyusunan profil sekolah secara komprehensif, akurat, valid, dan sistematis;

- 2) Pelaksanaan evaluasi diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan institusi;
- 3) Perumusan kebutuhan sekolah serta penyusunan visi, misi, dan tujuan berdasarkan hasil evaluasi diri;
- 4) Penyusunan program kerja jangka pendek dan jangka panjang dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan;
- 5) Implementasi program kerja tersebut secara terencana dan sistematis;
- 6) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja; dan
- 7) Penyusunan program lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

Tuntutan yang paling urgen dalam pembangunan pendidikan yang relevan dan berkualitas adalah penguatan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan penelitian tindakan sekolah dan analisis kebijakan pendidikan. Kepala sekolah perlu mampu melahirkan ide-ide inovatif yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan alternatif kebijakan pendidikan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada berbagai sektor kehidupan.

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran, posisi, dan aspirasi seluruh warga sekolah baik guru, tenaga administrasi, maupun staf pendukung lainnya. Melalui sinergi dan kolaborasi yang harmonis, kepala sekolah dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan kondusif dalam rangka perbaikan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Peningkatan efektivitas kinerja kepala sekolah merupakan kunci dalam pencapaian mutu pendidikan yang optimal. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah memainkan peran strategis sebagai penggerak utama dalam arah kebijakan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

4. Lulusan Unggul

a. Penguasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Lulusan yang unggul harus memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai sesuai dengan bidang studinya. Dalam konteks SMK, keterampilan vokasional menjadi prioritas, sehingga lulusan diharapkan mampu bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Kurikulum yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja, terutama di bidang teknologi dan keterampilan praktis, seperti yang diterapkan di SMKS Plus Al-Farhan Sukabumi. Di sisi lain, SMKS Jam'iyatul Aulad juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, mencetak lulusan yang kompeten secara akademik namun tetap berlandaskan moral dan etika agama.

b. Kecerdasan Spiritual dan Moral

Selain penguasaan ilmu pengetahuan, lulusan unggul dari sekolah berbasis pesantren juga diharapkan memiliki kecerdasan spiritual yang kuat. Pendidikan di pesantren memadukan aspek akademik dengan pendidikan agama, membentuk santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Dalam perspektif Islam, lulusan yang unggul adalah mereka yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di dunia kerja.

Kecerdasan spiritual ini mencakup penguasaan ajaran agama Islam yang mendalam, kemampuan untuk menjalankan ibadah dengan baik, serta kemampuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam berbagai situasi. Dengan demikian, lulusan yang unggul tidak hanya dinilai dari aspek akademik tetapi juga dari kualitas moral dan spiritualnya.

c. Keterampilan Vikasional dan Kewirausahaan

Di dunia modern yang semakin dinamis, keterampilan praktis sangat dibutuhkan. Lulusan yang unggul harus mampu mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari di sekolah untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Sekolah-sekolah seperti SMKS Plus Al-Farhan Sukabumi memberikan penekanan khusus pada pengembangan keterampilan vokasional dan kewirausahaan. Santri dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, sehingga mereka dapat langsung terjun ke industri atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Keterampilan ini mencakup kemampuan teknis dalam bidang kejuruan, seperti teknik kendaraan ringan, teknik instalasi listrik, serta keterampilan kewirausahaan seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, dan pemasaran. Dalam konsep lulusan yang unggul, keterampilan ini menjadi faktor pembeda yang memungkinkan lulusan untuk sukses di dunia profesional.

d. Kemampuan Beradaptasi dan Berinovasi

Lulusan yang unggul adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman. Dalam era digitalisasi dan globalisasi saat ini, kemampuan untuk terus belajar dan berinovasi menjadi sangat penting. Santri harus dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga mereka dapat menemukan solusi-solusi baru dalam menghadapi permasalahan yang kompleks.

Keterampilan adaptasi ini juga berkaitan dengan pengembangan soft skills, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Pendidikan di SMKS Jam'iyatul Aulad dan SMKS Plus Al-Farhan berupaya menumbuhkan keterampilan ini melalui pendekatan pembelajaran yang kolaboratif, diskusi kelompok, serta penerapan metode pembelajaran aktif.

e. Kepekaan Sosial dan Kepemimpinan

Lulusan unggul juga diharapkan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, memahami kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi nyata. Pendidikan di sekolah berbasis pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Selain itu, lulusan yang unggul juga dituntut memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk memimpin kelompok, tetapi juga kemampuan untuk memimpin diri sendiri, mengambil keputusan yang tepat, dan bertindak dengan integritas. Jiwa kepemimpinan ini dikembangkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan, serta peran aktif santri dalam organisasi sekolah dan pesantren.

f. Integrai Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan

Lulusan dari sekolah berbasis pesantren harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulan lulusan tidak hanya diukur dari prestasi akademik atau keterampilan teknis, tetapi juga dari kemampuannya untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, menjaga akhlak, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pendidikan karakter berbasis agama ini menjadi salah satu ciri khas dari sekolah-sekolah pesantren.

Konsep lulusan yang unggul dalam konteks *"Manajemen Peningkatan Mutu Pembelajaran Santri dalam Mewujudkan Lulusan yang Unggul"* mencakup beberapa dimensi utama: penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis, kecerdasan spiritual dan moral, kemampuan beradaptasi, kepekaan sosial, serta kepemimpinan. Melalui manajemen pembelajaran yang terencana dan berkualitas, sekolah berupaya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter dan

keterampilan yang siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Integrasi antara pendidikan akademik, agama, dan keterampilan vokasional menjadi fondasi dalam mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing.

5. Sekolah Islam Terpadu

a) Perkembangan Sekolah Islam Terpadu

Perkembangan Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Indonesia menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Dalam implementasinya, konsep keterpaduan pada sekolah-sekolah ini memiliki variasi bentuk. Ada institusi yang menggabungkan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, ada pula yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan materi keislaman hasil pengembangan internal sekolah, serta ada pula sekolah yang mengadopsi model dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT).

JSIT lahir sebagai bentuk keprihatinan atas lemahnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam sistem pendidikan nasional, baik pada institusi negeri maupun swasta. Berdasarkan dorongan tersebut, pada tahun 1993, sejumlah tokoh pendidik melakukan studi banding ke sekolah-sekolah di Malaysia dan Singapura yang dinilai memiliki pendekatan pendidikan Islam yang kuat dan representatif. Hasil studi tersebut kemudian menginspirasi terbentuknya sekolah-sekolah Islam Terpadu sebagai prototipe pendidikan Islam yang modern dan terpadu. Hingga akhir tahun 2017, terdapat 1.926 unit sekolah Islam terpadu di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 879 Taman Kanak-Kanak (TK), 723 Sekolah Dasar (SD), 256 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 68 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut Ketua JSIT Indonesia, Sukro Muhab, pendirian SIT didasari oleh semangat untuk membebaskan lembaga pendidikan dari pengaruh sekularisme. Dengan demikian, SIT bertujuan menyatukan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam

kurikulum dan proses pembelajaran yang terpadu secara menyeluruh. Lebih dari itu, JSIT memiliki cita-cita untuk menghadirkan sekolah Islam yang memiliki kualitas setara dengan standar pendidikan internasional.

Secara substansial, Sekolah Islam Terpadu mengusung model pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep "terpadu" dalam konteks ini merujuk pada penggabungan integral seluruh aspek pendidikan, baik kurikulum, strategi pembelajaran, maupun lingkungan belajar. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan Islam yang menyeluruh (*syamil*), tidak parsial (*juz'i*), dan tidak terfragmentasi antara ilmu dunia dan ilmu agama.

Paradigma pendidikan dalam SIT menempatkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan utama. Seluruh mata pelajaran, baik umum maupun keagamaan, dikembangkan dan disampaikan dalam bingkai nilai-nilai Islam. Dengan demikian, tidak terjadi dikotomi antara pelajaran umum seperti matematika, sains, atau bahasa dengan pelajaran agama, karena semua terintegrasi dalam nilai-nilai keislaman. Sementara itu, mata pelajaran agama juga dikontekstualisasikan agar relevan dengan kehidupan kontemporer dan tantangan masa depan.

Dalam praktik pembelajarannya, SIT menerapkan pendekatan yang menyinergikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan jasmaniah peserta didik secara seimbang. Hal ini dilakukan melalui penggunaan metode pembelajaran variatif, berbasis pemecahan masalah (*problem solving*), pengembangan kreativitas, serta pemberdayaan potensi otak kiri dan otak kanan.

Lebih jauh, SIT juga memadukan aspek '*aqliyyah*' (intelektual), '*ruhiyyah*' (spiritual), dan '*jasadiyyah*' (fisik). Artinya, peserta didik diharapkan berkembang secara menyeluruh: cerdas

secara akal, kuat secara spiritual dan beriman, serta sehat secara jasmani dan terampil dalam kehidupan sehari-hari.

Keterpaduan yang dimaksud juga mencakup lingkungan pendidikan yang luas, yakni antara sekolah, rumah, dan masyarakat. SIT menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan membangun sinergi dalam pengelolaan sekolah dan pembelajaran serta memperkuat karakter peserta didik. Kegiatan luar sekolah seperti studi lapangan dan interaksi sosial dirancang untuk mengenalkan peserta didik kepada realitas sosial dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, Sekolah Islam Terpadu hadir sebagai model pendidikan yang berupaya menyatukan antara nilai-nilai agama dan kompetensi akademik secara harmonis, menyeluruh, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia.

b) Prinsip Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan institusi pendidikan yang memiliki komitmen kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam seluruh dimensi penyelenggaraan sekolah. Visi yang diusung SIT tidak hanya terbatas pada pembelajaran akademik, melainkan mencakup pembinaan spiritual, moral, dan sosial peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu, yaitu:

- 1) Pendidikan dalam pandangan SIT diposisikan sebagai aktivitas dakwah yang mulia dan strategis, yang membutuhkan dedikasi, loyalitas, serta kerja keras dari seluruh elemen pendidik. Pengabdian di bidang pendidikan Islam bukan sekadar profesi,

melainkan amanah dakwah yang mengharuskan pelaksanaannya dilakukan secara tulus dan konsisten.

- 2) Pendidikan diselenggarakan dengan tulus dan ikhlas, dedikasi yang tinggi dan cara-cara yang bijak dan dipandang sebagai kewajiban menjalankan perintah Allah swt; mengajak, menuntun manusia ke jalan Allah swt. Hal ini senada dengan firman Allah swt dalam Alquran surat An Nahl;125

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Menjalankan aktivitas pendidikan adalah bagian dari perintah Allah swt yang harus ditunaikan dengan baik, profesional, dan penuh tanggung jawab. Al-Quran mempertegas prinsip ini pada surat An Nisa: 58.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

- 3) Pendidikan pada hakikatnya adalah mengajarkan seluruh Sekolah Islam Terpadu mengembangkan pendekatan kurikulum yang menyatukan nilai-nilai ilmu kauniyah (ilmu yang berasal dari pengamatan terhadap alam ciptaan Allah) dan ilmu qauliyah (ilmu yang bersumber dari wahyu melalui Al-Qur'an dan hadis). Pesan dan ajaran Islam yang terkandung dalam referensi Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab klasik yang masyhur di integrasikan ke dalam kurikulum pelajaran umum dan agama.

Mengedepankan keteladanan yang baik (*qudqa hasanah*) dalam membentuk karakter peserta didik melalui perilaku seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan yang paling utamanya aspek *ubudiyah* dan *akhlaqiyah*.

c) Misi dan Tujuan Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu (SIT) hadir sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi strategis dalam mengembangkan potensi fitrah peserta didik secara optimal. Tujuan utamanya adalah membentuk generasi berkarakter pemimpin yang memiliki integritas spiritual melalui ketakwaan serta kesiapan intelektual dan sosial. Visi tersebut berpijak pada nilai-nilai dasar Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, yang menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk menyempurnakan manusia sesuai dengan potensi dan kodrat penciptaannya.

Misi yang diemban oleh Sekolah Islam Terpadu mencerminkan keterpaduan antara capaian kurikulum nasional dan internalisasi nilai-nilai Islam. Adapun misi pendidikan tersebut antara lain:

- 1) Mencapai target pembelajaran sesuai rencana dan kurikulum nasional, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sistem pendidikan nasional yang berlaku.
- 2) Mengembangkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara benar dengan standar tahsin dan tartil, serta mendorong peserta didik untuk menghafal Al-Qur'an minimal dua juz pada setiap jenjang pendidikan.
- 3) Memperkuat mata pelajaran agama Islam melalui pengayaan kurikulum yang memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, serta membentuk kerangka berpikir, sikap, dan perilaku Islami (*fikrah*, *mauqif*, dan *suluk Islamiyah*).

- 4) Membina karakter peserta didik secara bertahap, untuk menciptakan profil lulusan yang memiliki integritas spiritual, kecerdasan intelektual, dan kepemimpinan sosial.

Sedangkan tujuan sekolah Islam terpadu adalah membentuk sepuluh karakter utama, yaitu:

- 1) *Salimul Aqidah*; meyakini Allah swt sebagai pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta dan menjauhkan diri dari segala pikiran, sikap dan perilaku bid'ah, khurafat, dan syirik.
- 2) *Salimul Ibadah*; terbiasa dan gemar melaksanakan ibadah yang meliputi: salat, shaum, tilawah Alquran, zikir dan doa sesuai petunjuk Alquran dan Alhadis.
- 3) *Matinul Khuluq*; menampilkan perilaku yang santun, tertib, disiplin, sabar, gigih, dan pemberani dalam menghadapi permasalahan hidup sehari-hari.
- 4) *Qadriun 'Alal Kasbi*; mandiri dalam memenuhi keperluan hidupnya dan memiliki bekal yang cukup dalam pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dalam usaha memenuhi kebutuhan nafkahnya.
- 5) *Mutsaqul Fikri*; memiliki kemampuan berpikir yang kritis, logis, sistematis, dan kreatif yang menjadikan dirinya berpengetahuan yang luas dan menguasai kompetensi akademik dengan sebaik-baiknya dan cermat serta cerdik dalam mengatasi segala problem yang dihadapi.
- 6) *Qowiyul Jism*; memiliki badan dan jiwa yang sehat serta bugar., stamina dan daya tahan tubuh yang kuat serta keterampilan beladiri yang berguna untuk dirinya dan orang lain.
- 7) *Mujahadah li Nafsihi*; memiliki kesungguhan dan motivasi yang tinggi dalam mengejar prestasi sekolah.
- 8) *Munazham fi Syu'nihi*; tertib dalam menata segala pekerjaan, tugas dan kewajiban serta mengambil resiko namun tetap cermat dan penuh perhitungan dalam melangkah.

- 9) *Harisun `alal Waqti*; selalu memanfaatkan waktu dan mengatur waktu dengan kegiatan yang bermanfaat.
- 10) *Nafi `un li Ghoirihi*; peduli kepada sesama dan lingkungan serta memiliki kepekaan untuk membantu orang lain.

d) Strategi Sekolah Islam Terpadu

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi pendidikan, Sekolah Islam Terpadu (SIT) menerapkan sejumlah strategi dan pendekatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas serta keaktifan penyelenggaraan pendidikan. Strategi tersebut berorientasi pada pengembangan peserta didik secara holistik melalui integrasi nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Adapun pendekatan-pendekatan strategis yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Lingkungan Sekolah yang Kondusif (Bi'ah Shālihah)
 Sekolah membangun lingkungan belajar yang aman, sehat, bersih, indah, dan bernuansa kekeluargaan. Fasilitas belajar dan tempat ibadah turut menjadi bagian integral dalam membentuk suasana kondusif untuk pembelajaran dan pembinaan karakter Islami.
- 2) Internalisasi Nilai Islam dalam Aturan dan Budaya Sekolah
 Setiap aturan dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah berlandaskan ajaran Islam, meliputi aspek perilaku, komunikasi, berpakaian, etika makan dan minum, serta interaksi antarwarga sekolah. Hal ini menciptakan budaya sekolah yang religius dan beradab.
- 3) Penerapan Pembelajaran Efektif dan Inovatif
 Sekolah menggunakan pendekatan pembelajaran yang menekankan eksplorasi sumber belajar yang luas, metode yang mendorong interaksi aktif, dan strategi pembelajaran berbasis

masalah (*problem-based learning*) serta pembelajaran kolaboratif dan kooperatif.

- 4) Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, belajar dengan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah, bertuhan, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan kreativitas peserta didik, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, belajar sepanjang hayat, perpaduan kompetisi dan solidaritas,
- 5) Melakukan proses Islamisasi dalam proses pembelajaran. Tujuan utama Islamisasi adalah membentuk kesadaran dan pola pikir yang integral dalam perspektif Islam. Peserta didik selalu diajak dalam berpikir dan memahami bahwa seluruh fenomena alam yang terbentang dan segala permasalahan serta dinamika yang muncul tidak dapat dilepaskan dari peran Allah swt yang maha bijaksana, pencipta, pemilik, pemelihara dan pengatur alam raya. Dengan Islamisasi pembelajaran diharapkan terjadi hubungan emosional yang kuat antara objek bahasan, peserta didik dan nilai-nilai Islam,
- 6) Memperkuat program pembinaan kesiswaan dengan kurikulum pendamping (ko-kurikuler) dan kurikulum tambahan (ektrakurikuler), pembinaan kepemimpinan serta mengefektifkan pendekatan mentoring (pengelompokan peserta didik ke dalam group-group pembinaan).

Sekolah Islam terpadu memiliki standar pembinaan peserta didik yang menekankan kepada pembiasaan perilaku membiasakan beribadah, pelatihan kepemimpinan, kepedulian sosial, seperti; tilawah Alquran, menjaga wudhu', shaum, doa dan zikir, sodaqoh, peduli dunia Islam, peduli mustadh'afiin, berbakti

kepada orang tua (birrul walidain), peduli lingkungan dan alam semesta,

- 7) Menjalin kemitraan yang efektif dengan pelbagai pihak yang terkait terutama orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Sekolah Islam Terpadu secara aktif membangun kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak terkait, khususnya orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Kemitraan ini dilandasi oleh prinsip kolaborasi yang kooperatif dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Sekolah berupaya menciptakan relasi yang setara di antara peserta didik, serta menyampaikan secara terbuka visi, misi, tujuan, dan strategi pengelolaan pendidikan kepada orang tua dan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan jembatan dialog yang efektif, terutama dalam bentuk majlis ta'lim bulanan yang melibatkan kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan unsur masyarakat, tercipta kesinambungan antara pendidikan di sekolah dan lingkungan rumah. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pencapaian tujuan pendidikan secara holistik, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter Islami,
- 8) Memastikan sekolah penuh waktu (*full day school*) dengan efektif waktu setiap hari selama delapan jam, sejak jam 07.300 hingga jam 15.30. Model waktu belajar yang lebih panjang ini dirancang untuk memberikan ruang yang memadai dalam penguatan pendidikan agama serta pembinaan karakter peserta didik. Pelaksanaan *full day school* menjadi ciri khas dari Sekolah Islam Terpadu, yang sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang tua. Mereka memandang bahwa durasi belajar yang lebih lama memungkinkan anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana pendidikan yang kondusif, bernuansa Islami, serta terhindar dari pengaruh lingkungan yang kurang mendukung nilai-nilai pendidikan,

- 9) Memastikan kepala sekolah dan guru memiliki visi, misi, semangat dan pemikiran (*ghirrah fikroh*) serta perilaku yang sejalan dengan falsafah, nilai, visi dan misi pendirian sekolah Islam terpadu. Salah satu pilar utama keberhasilan Sekolah Islam Terpadu adalah keberadaan kepala sekolah dan guru yang memiliki visi, misi, semangat (*ghirrah fikroh*), serta perilaku yang selaras dengan falsafah, nilai-nilai dasar, dan tujuan pendirian sekolah. Oleh karena itu, proses seleksi dan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara ketat dan terstandar. Kriteria seleksi tidak hanya mencakup kompetensi akademik dan pedagogik, melainkan juga pemikiran dan perilaku sosial yang mencerminkan integritas serta kesesuaian dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh sekolah. Proses rekrutmen ini umumnya dilakukan melalui jejaring dan rekomendasi dari komunitas yang telah dikenal baik dan dipercaya oleh penyelenggara pendidikan, guna memastikan kualitas dan kesesuaian karakter para calon pendidik dengan budaya serta visi institusi, dan
- 10) Memberlakukan tata tertib, norma dan etika yang dibuat berstandar kepada etika dan nilai Islami dan kepatutan sosial Memberika sanksi dan hukuman yang tegas kepada siapapun tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan.

D. Landasan Kebijakan

1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah dasar hukum tertinggi dalam sistem pendidikan Indonesia yang mengatur prinsip, arah, struktur, pelaksanaan, serta tujuan pendidikan nasional. UU ini dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, adil, merata, dan mampu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.

Sebelum lahirnya UU No. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, seiring perkembangan zaman, terutama setelah era reformasi 1998, muncul desakan dari berbagai pihak untuk menyusun sistem pendidikan yang: lebih demokratis, menghormati keberagaman, responsif terhadap globalisasi dan teknologi, lebih akomodatif terhadap pendidikan berbasis masyarakat.

Sistem Pendidikan Nasional sendiri adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan kepesantrenan juga termasuk dalam sistem pendidikan nasional, karena pesantren diakui sebagai salah satu bagian dari bentuk satuan pendidikan yang diakui oleh undang-undang khususnya pada jalur pendidikan keagamaan dan dapat dikategorikan dalam pendidikan formal maupun nonformal, tergantung pada bentuk dan struktur kelembagaannya.

UU No. 20 Tahun 2003 menjadi pondasi utama sistem pendidikan nasional Indonesia di era modern. Undang-undang ini tidak hanya mengatur struktur dan teknis pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai arah pembangunan manusia Indonesia yang holistik: cerdas secara intelektual, bermoral, dan siap menghadapi tantangan global.

2. PP No. 57 /2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi regulasi yang menggantikan PP No. 19 Tahun 2005 beserta perubahannya, dengan tujuan untuk menyesuaikan standar pendidikan nasional terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat. Penyesuaian tersebut dilakukan agar sistem pendidikan di Indonesia tetap relevan, adaptif, dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global maupun lokal. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah tolak ukur atau pedoman yang digunakan untuk menilai dan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia agar mutu pendidikan tetap terjamin dan merata di seluruh wilayah. Tujuan dari SNP ini adalah agar semua sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya bisa memberikan pendidikan yang layak, berkualitas, dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Tujuan dibuatnya Standar Pendidikan Nasional (SPN) di Indonesia adalah untuk menjamin mutu pendidikan secara nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara lebih rinci, tujuan dibuatnya Standar Pendidikan Nasional adalah:

- 1) Menjamin Mutu Pendidikan

Agar setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia memiliki acuan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat dijaga dan ditingkatkan secara merata.

- 2) Menjadi Dasar Pengembangan Kurikulum

Standar ini menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum, termasuk isi, proses, dan penilaian hasil belajar peserta didik.

- 3) Menjadi Acuan Penilaian dan Pengawasan

SPN digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menilai, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan.

- 4) Mewujudkan Pendidikan yang Relevan dan Berkualitas

Standar ini bertujuan agar pendidikan di Indonesia relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan zaman.

- 5) Memfasilitasi Pemerataan Akses dan Kesempatan

Dengan standar yang seragam, diharapkan tidak ada kesenjangan mutu pendidikan antara daerah satu dengan yang lain.

3. Permendeknas No. 63 /2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Permendiknas No. 63 Tahun 2009 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sistem penjamin mutu pendidikan ini terdiri dari dua bagian yaitu: Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjamin Mutu Internal berarti dikelola oleh sekolah itu sendiri, meliputi: 1) Pemenuhan SNP secara mandiri, 2) Evaluasi diri (EDM), 3) Perencanaan berbasis data, 4) Supervisi oleh kepala sekolah, dan 5) Pengawasan dan tindak lanjut. Sedangkan Sistem Penjamin Mutu Eksternal dilakukan oleh pihak luar (seperti BAN-S/M atau lembaga akreditasi) meliputi: 1) Akreditasi, 2) Evaluasi oleh dinas pendidikan, dan 3) Monitoring dan audit mutu.

Tujuan dari sistem penjamin mutu pendidikan adalah 1) menjamin setiap peserta didik mendapat layanan pendidikan yang bermutu, 2) Menjamin semua kegiatan pendidikan sesuai dengan SNP. 3) Membantu sekolah meningkatkan kualitas secara terus-menerus (continuous improvement). Sistem penjamin mutu pendidikan adalah alat penting agar pendidikan Indonesia tidak jalan di tempat, tapi terus berkembang dan berkualitas di setiap sekolah.

4. UU No. 18/2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah landasan hukum yang mengakui pesantren sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional sekaligus sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berakar dari tradisi, berperan penting dalam mencetak generasi

berakhlak dan berilmu, serta kini telah diakui secara hukum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

UU ini menjadi pengakuan resmi negara terhadap eksistensi dan peran strategis pesantren, yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum khusus. UU ini disusun untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan pesantren.
- b. Memastikan kesetaraan pesantren dengan lembaga pendidikan formal lainnya.
- c. Mendukung peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menjamin pesantren tetap menjalankan kekhasan dalam sistem dan kurikulumnya.

UU tentang pesantren ini menetapkan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu: 1) Fungsi pendidikan, 2) Fungsi dakwah Islamdan, 3) Fungsi pemberdayaan masyarakat. Selain itu Pemerintah harus mengalokasikan anggaran pesantren secara adil dan berkelanjutan, serta pesantren berhak mendapatkan dana dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Juga pesantren memiliki kebebasan untuk merancang kurikulum dan pemerintah wajib mengakui kurikulum khas tersebut dan memberikan fasilitas kepada pesantren.

5. Peraturan Menag RI No. 30 /2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren adalah peraturan turunan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur secara lebih teknis tentang syarat, proses, dan standar operasional pendirian serta penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk: 1) Menjamin kualitas dan legalitas pesantren. 2) Memberikan pedoman resmi tentang bagaimana

pesantren didirikan dan dijalankan. 3) Menegaskan pengakuan negara terhadap sistem dan kemandirian pesantren.

PMA No. 30 Tahun 2020 memperkuat kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan sah yang diakui oleh negara, dengan memberikan panduan teknis agar pesantren dapat didirikan dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, kemandirian, dan peraturan nasional. Ruang lingkup PMA ini mencakup tentang ketentuan umum pesantren, persyaratan pendirian pesantren, tata cara pendirian, penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.

6. Peraturan Menag RI No 31/2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren adalah regulasi yang menetapkan ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Peraturan ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. PMA ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin mutu dan arah pendidikan pesantren agar sesuai dengan sistem pendidikan nasional.
- b. Mengakui dan melindungi kekhasan pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis kitab kuning dan tradisi Islam.
- c. Memberikan pedoman bagi pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal.

Berdasarkan peraturan Menag RI No. 31/2020 ini pendidikan pesantren dibagi menjadi dua jalur. Pertama jalur pendidikan formal yang terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan Muadalah: Pendidikan formal berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
- b. Pendidikan Diniyah Formal (PDF): Pendidikan formal dengan jenjang ula, wustha, dan ulya.

- c. Ma'had Aly: Pendidikan tinggi pesantren dengan jenjang sarjana (marhalah ula), magister (marhalah tsaniyah), dan doktor (marhalah tsalisah).

Kedua jalur pendidikan non-formal, yang terdiri dari:

- a. Pengkajian Kitab Kuning: Pendidikan berbasis kajian kitab kuning sebagai rujukan utama.
- b. Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin: Kajian ilmu agama Islam yang terstruktur dan sistematis.
- c. Bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Untuk menjamin mutu pendidikan, pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh. Dewan Masyayikh yaitu Lembaga internal pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan. Dan Majelis Masyayikh yaitu Lembaga independen yang merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren secara nasional.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan judul dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan ke lapangan dan mengakses media untuk menemukan judul atau pembahasan yang sama. Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, belum ditemukan judul maupun pembahasan yang sama, namun ada beberapa penelitian dengan judul berbeda akan tetapi teori dan konsepnya ada yang berhubungan dengan materi yang penulis teliti, di antaranya:

1. Arianto, D. (2020). *Manajemen peningkatan mutu Madrasah Aliyah berbasis pesantren di OKU Timur* (Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). Repository UIN Raden Fatah.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa manajemen peningkatan mutu madrasah berbasis pesantren di OKI Timur terdiri atas: perencanaan standar isi diawali dengan pembentukan tim peengembang kurikulum madrasah (TPKM) yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan yayasan

dan di ketuai oleh kepala madrasah. Kerangka dasar kurikulum dirumuskan berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan teoritis, struktur kurikulum dibuat mengacu kepada kurikulum nasional (KTSP/Kurikulum 2013). Untuk muatan lokal disesuaikan dengan kultur dan budaya madrasah Aliyah berbasis pesantren masing-masing. Penguatan program peminatan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, beban belajar diimplementasikan dalam sistem paket. Penyusunan silabus dilakukan oleh masing-masing guru. Kalender pendidikan disusun berdasarkan kegiatan madrasah dengan menyesuaikan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian agama Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan standar isi dimulai dengan mengimplementasikan beban belajar dalam sistem paket. Jumlah mata pelajaran KKM berkisar 70-78, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila terdapat 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah nilai KKM, peserta didik yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan madrasah. Rumusan visi dan misi disesuaikan dengan madrasah Aliyah berbasis pesantren masing-masing. Penyusunan silabus dilakukan oleh guru masing-masing bekerjasama dengan MGMP. Sosialisasi visi, misi dan tujuan madrasah pada momen-momen bagi rapor, rapat dengan dinas, pelepasan siswa kelas XII, kegiatan ekskul dan jejaring alumni. Media sosialisasi berupa brosur, ceramah dan *banner*.

2. Yasin, M. (2018). *Manajemen mutu di lembaga pendidikan berprestasi: Studi multi situs MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa keberhasilan pencapaian prestasi pendidikan di MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri tidak terlepas dari adanya perencanaan mutu yang sistematis, terpadu, dan terarah. Perencanaan tersebut disusun secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek strategis dalam pengelolaan pendidikan. Pertama, dirumuskan visi dan misi yang dijadikan sebagai arah kebijakan institusi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Kedua, lembaga pendidikan menunjukkan komitmen kuat dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berstandar nasional, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), sistem akreditasi nasional, serta kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, setiap satuan pendidikan mengembangkan program unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik internal masing-masing sekolah. Ketiga, sekolah memberikan layanan pendidikan yang kondusif bagi proses pembelajaran, dengan suasana yang nyaman dan terfasilitasi secara optimal, serta mudah dipahami dan dihayati oleh seluruh warga sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan. Keempat, lembaga secara konsisten melakukan penguatan pada kualitas input peserta didik, yang disertai dengan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kualitas unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

3. Yamin, M., dkk. (2012). Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 123–135. Universitas Pasundan Bandung. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti penataran, seminar, pelatihan, dan workshop. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan berbagai inovasi dalam pembelajaran, meliputi pengembangan bahan ajar, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran, serta sistem penilaian dan asesmen. Inovasi dianggap sebagai kebutuhan mendasar dalam pengembangan mutu pendidikan. Namun demikian, berdasarkan pengalaman empirik, upaya-upaya tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang dilandasi oleh komitmen kuat terhadap mutu. Komitmen ini dimulai dengan adanya kesepakatan dan dedikasi terhadap visi dan misi bersama yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Perbaikan

berkelanjutan bergantung pada dua komponen utama: pertama, pemahaman terhadap proses, alat, dan keterampilan yang tepat; kedua, implementasi keterampilan tersebut melalui proyek-proyek kecil yang dapat dicapai secara bertahap (*small achievable projects*). Seluruh proses perbaikan ini dilandasi oleh prinsip siklus aksi (*action cycle*), yang bersifat tidak pernah berakhir (*never-ending cycle*) dan relevan untuk diterapkan dalam seluruh tahapan organisasi, terutama dalam konteks lembaga pendidikan.

4. Nur, M., dkk. (2016). *Manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Dayah Guci Kabupaten Pidie*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 4(1), 93–103. Universitas Syiah Kuala. menjelaskan bahwa perencanaan program sekolah memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai suatu proses sistematis yang menggambarkan penyusunan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan lembaga dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya. Kedua, sebagai aktivitas strategis yang memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan tahunan sekolah mencakup berbagai aspek, antara lain pengajaran (penyediaan guru, pembagian tugas mengajar), penyediaan sarana (buku, alat peraga, laboratorium), sistem evaluasi hasil belajar, serta program ekstrakurikuler. Dalam implementasinya, strategi manajemen sekolah dilakukan melalui sosialisasi program, analisis SWOT, penyelesaian masalah, peningkatan mutu, serta monitoring dan evaluasi program. Evaluasi berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan program dan disajikan dalam bentuk laporan teknis dan keuangan. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program sekolah antara lain rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan ekonomi. Kepala sekolah berupaya mengatasinya dengan menjamin mutu pendidikan dasar sembilan tahun yang lebih fungsional dan relevan, serta mendorong partisipasi tokoh masyarakat dalam pengembangan kurikulum dan jenis pembelajaran yang kontekstual.